BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

ANALISIS KETIMPANGAN GENDER SPASIAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN WILAYAH

PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

TIM PUG 2021

Kajian Pengarusutamaan Gender

Analisis Ketimpangan Gender Spasial dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Wilayah

©2022, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Pengarah dan Penanggung Jawab:
Abdurohman, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal

Tim Penyusun:
Aktiva Primananda Hadiarta, Rina Karlina, Nugraheni Kusumaningsih, Ali Moechtar, Ahmad Wira Kusuma, Hilda Choirunnisah, Rizki Saputri, Restu Rinayanti, Ika Kartika Sari, Cipto Adhi Setiawan, Dhoni Siamsyah Fadillah Akbar

Ucapan Terima Kasih secara Khusus untuk:
Hidayat Amir

Penerbit:
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Gedung R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710
Telp. +62 21 34833486
https://fiskal.kemenkeu.go.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN

KATA PENGANTAR

Kesetaraan gender telah menjadi isu yang mengemuka, tidak hanya pada level nasional, melainkan juga di tingkat global. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Tujuan kelima pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan. Gender merupakan isu multidimensi dan tercantum di hampir seluruh aspek SDGs. Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan pada tahun 2030.

Sejumlah regulasi internasional sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk komitmen di tingkat global. Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi garis kebijakan pemerintah sejak keluarnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, yang mengamanatkan seluruh departemen maupun lembaga pemerintah nondepartemen di pemerintah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota harus melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada kebijakan dan program pembangunan. Sejak itu berbagai kebijakan publik di berbagai sektor, di pusat dan daerah, telah secara eksplisit memasukkan nilai keadilan dan kesetaraan gender. RPJMN 2020-2024 juga telah mengarusutamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan PUG sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Namun demikian, diskriminasi gender dalam berbagai bidang di kehidupan bermasyarakat masih menimbulkan perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indonesia masih menghadapi tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kesetaraan gender dengan masih terdapatnya kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan, dimana kesenjangan gender ini juga dijumpai di sisi kewilayahan. Upaya memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender tidak lagi memadai jika tidak menyentuh akar permasalahan, yaitu hambatan kultural dan struktural yang terdapat di masyarakat. Tembok penghalang tersebut harus ditembus dengan memperteguh komitmen negara terhadap keadilan dan kesetaraan gender dan menjadikannya sebagai agenda utama pembangunan. Oleh karena itu, pada era *Gender Mainstreaming* ini, aspek kebijakan harus menjadi fokus. Keadilan dan kesetaraan gender akan sulit dicapai jika berbagai kebijakan yang dihasilkan masih bias gender, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi ketimpangan gender di Indonesia khususnya secara spasial, serta keterkaitannya dengan perekonomian wilayah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan melalui Pusat Kebijakan Ekonomi Makro telah menyusun suatu kajian berorientasi gender yang menganalisis ketimpangan gender spasial dan pengaruhnya terhadap

perekonomian wilayah. Kajian ini disusun sebagai upaya meningkatkan pemahaman, wawasan, dan *awareness* pemerintah dan masyarakat bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih jauh dari harapan dan kesenjangan gener masih terus berlangsung.

Saya mendukung penuh dan mengapresiasi terbitnya Laporan Kajian “Analisis Ketimpangan Gender Spasial dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Wilayah” ini sebagai laporan kajian berorientasi gender dan makroekonomi pertama di Badan Kebijakan Fiskal, yang berhasil memetakan disparitas gender antarprovinsi di Indonesia dikaitkan dengan perekonomian daerah. Analisis yang disajikan dalam kajian ini cukup komprehensif dalam mendeskripsikan fenomena ketimpangan gender, yang didukung temuan dari berbagai penelitian sebelumnya yang sangat kaya terkait isu gender dan faktor penyebabnya, serta menyusun rekomendasi pada daerah prioritas sesuai dengan karakteristik ketimpangan gender di tingkat lokal. Lebih lanjut, kajian ini dapat memperkuat *evidence* mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan dapat menjadi bahan advokasi dan KIE kepada Kementerian/Lembaga dan daerah untuk mendorong pelaksanaan PUG pada sektor/bidang prioritas untuk dapat meningkatkan kesetaraan gender.

Apresiasi juga secara khusus saya sampaikan kepada Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada serta Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga (KPAPO) Kementerian PPN/Bappenas atas masukan konstruktif yang telah diberikan untuk memperkaya hasil kajian ini.

Akhir kata, saya sampaikan selamat dan apresiasi kepada tim penyusun kajian gender dari Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal atas kontribusi dan dedikasinya dalam penyusunan kajian ini.

Jakarta, Januari 2022
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

Abdurohman

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki di semua aspek kehidupan. Hal ini dikarenakan perempuan merepresentasikan hampir setengah dari populasi di dunia, sehingga hampir tidak mungkin untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif tanpa adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Di sisi lain, untuk mendukung Visi Indonesia 2045 dan meraih bonus demografi secara optimal, pendidikan dan produktivitas perempuan menjadi salah satu hal yang utama. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara terhadap sumber daya dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin nyata untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di semua bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun sosial dan politik.

Kesetaraan gender merupakan prasyarat untuk dapat mencapai pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam perspektif internasional, kesetaraan gender merupakan komitmen yang tertuang pada salah satu butir dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disepakati oleh negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tujuan ke-5 SDGs "*Gender Equality*", yaitu "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan". Peningkatan kualitas dan kuantitas keterlibatan atau pemberdayaan perempuan dalam tenaga kerja dan aktivitas ekonomi akan membantu peningkatan pendapatan negara melalui peningkatan produktivitas secara agregat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan negara. Selain memiliki manfaat ekonomi (kuantitatif/aspek makro), peningkatan kesetaraan gender juga memiliki manfaat ke diri perempuan, anak, keluarga, dan masyarakat (kualitatif/mikro). Kesetaraan gender akan menghasilkan perempuan yang lebih sehat, berpendidikan, produktif secara ekonomi, berkontribusi dalam pengambilan keputusan, serta anak bertumbuh dan berkembang lebih maksimal karena mendapatkan pendidikan dan pengasuhan seimbang dari kedua orang tua (ada pembagian peran domestik yang seimbang).

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan telah menjadi bagian integral dalam agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian dituangkan ke dalam RPJPN dan RPJMN. Namun, dalam hal perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya, ternyata masih terdapat kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki. **Tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kesetaraan gender masih dihadapi oleh Indonesia dengan masih terdapatnya kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan**, antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi,

ketenagakerjaan, serta kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan. Selain itu, aspek hukum, politik, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan juga turut berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian kesetaraan gender dalam pembangunan nasional maupun regional. Kesenjangan gender tersebut diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang cenderung meningkatkan kerentanan perempuan, memperburuk ketimpangan gender, dan menghambat kesetaraan gender.

Di sisi lain, ketimpangan pembangunan dan pemberdayaan gender antarwilayah di Indonesia juga masih terjadi, di mana Kawasan Timur Indonesia cenderung memiliki capaian pembangunan dan pemberdayaan gender yang masih rendah. Kesenjangan gender ini tidak hanya terjadi antarprovinsi, tetapi juga antar kabupaten/kota dalam suatu provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan peran perempuan dengan laki-laki yang cukup signifikan dalam pembangunan regional. Ekonomi dan pembangunan regional merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, oleh karena itu percepatan pembangunan manusia berbasis gender dari perspektif kewilayahan merupakan aspek krusial untuk mewujudkan tujuan kesetaraan gender dalam rangka mendorong kinerja perekonomian dan pembangunan regional maupun nasional.

Berbagai kondisi tersebut di atas melatarbelakangi penyusunan kajian "Analisis Ketimpangan Gender Spasial dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Wilayah". Melalui *mixed method sequential explanatory* menggunakan analisis ekonometri (regresi data panel) dan analisis spasial (*Geographic Information System)* serta didukung oleh *literatur review*, kajian ini menunjukkan hasil sebagai berikut: (i) berbagai aspek kesenjangan gender pada dasarnya berangkat dari pengaruh norma sosial gender dan budaya patriarki, sebagai salah satu akar masalah yang mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, hingga pengambilan keputusan; (ii) ketimpangan gender dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian wilayah (PDRB); (iii) Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang paling banyak memiliki indikator ketimpangan gender di atas ketimpangan nasional disertai pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah nasional selama rata-rata sepuluh tahun terakhir; (iv) Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang paling banyak memiliki indikator ketimpangan gender di atas ketimpangan nasional namun pertumbuhan ekonominya selama rata-rata sepuluh tahun terakhir sudah berada di atas nasional; (v) selain berbagai tantangan yang sifatnya *local context* di tiap daerah, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta isu kelembagaan PUG di daerah merupakan isu generik yang terjadi hampir di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi lemahnya komitmen pimpinan, *turn over* SDM yang tinggi, kapasitas SDM yang terbatas, hingga belum tersedianya data terpilah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3
RINGKASAN EKSEKUTIF 5
DAFTAR ISI 7
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL 9
BAB I. PENDAHULUAN 13
1.1. Latar Belakang 13
1.2. Tujuan Kajian 16
1.3. Ruang Lingkup Kajian 16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN PUSTAKA 18
3.1. Pengarusutamaan Gender Dalam Agenda Pembangunan Nasional 18
3.2. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ketimpangan Gender 19
3.3. Berbagai Bentuk Ketidakadilan Gender 20
3.4. Situasi Ketimpangan Gender di Tingkat Global 23
3.5. Perkembangan *Gender-Related Index* di Indonesia 27
BAB III. METODOLOGI METODOLOGI 34
3.1. Jenis Penelitian 34
3.2. Data Penelitian 35
3.3. Metode Analisis Situasi dan Distribusi Ketimpangan Gender Spasial 35
3.4. Metode Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 36
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL DAN PEMBAHASAN 40
4.1. Situasi dan Distribusi Ketimpangan Gender di Bidang Pendidikan 40
4.1.1. Rata-rata Lama Sekolah 40
4.1.2. Harapan Lama Sekolah 44
4.1.3. Angka Partisipasi Murni 47
4.1.4. Penyebab Umum Ketimpangan Gender Dalam Aspek Pendidikan 48
4.2. Situasi dan Distribusi Ketimpangan Gender di Bidang Kesehatan 51
4.2.1. Umur Harapan Hidup 51
4.2.2. Keluhan Kesehatan 55
4.2.3. Angka Kematian Ibu dan Stunting 58
4.2.4. Penyebab Umum Ketimpangan Gender Dalam Aspek Kesehatan 61
4.3. Situasi dan Distribusi Ketimpangan Gender di Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan . 63
4.3.1. Pengeluaran Per Kapita 63
4.3.2. Sumbangan Pendapatan 68

4.3.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 72
4.3.4. Tenaga Profesional 76
4.3.5. Penyebab Umum Ketimpangan Gender dalam Aspek Ekonomi dan Ketenagakerjaan 80
4.4. Situasi dan Distribusi Ketimpangan Gender di Bidang Politik dan Jabatan Publik 82
4.4.1. Keterlibatan Dalam Parlemen 82
4.4.2. Partisipasi pada Sektor Pemerintahan dan Swasta 84
4.4.3. Penyebab Umum Ketimpangan Gender dalam Aspek Politik dan Jabatan Publik 87
4.5. Hasil Pemodelan Ekonometri 88
4.6. Daerah Prioritas Penanganan Ketimpangan Gender dan Karakteristiknya 89
4.6.1. Papua dan Papua Barat 91
4.6.2. Nusa Tenggara Barat 93
4.6.3. Maluku Utara 96
4.6.4. Jawa Barat dan Banten 98
4.6.5. Kalimantan Tengah 102
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 106
5.1. Kesimpulan 106
5.2. Rekomendasi 108
5.2.1. Pembentukan Norma Gender 108
5.2.2. Pencegahan Perkawinan Anak 109
5.2.3. Keberpihakan Pembangunan pada Perempuan *(Affirmative Action)* untuk Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Ketenagakerjaan 110
5.2.4. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) untuk Pengembangan Ekonomi Lokal dan Aspek Prioritas 113
5.2.5. Anggaran Responsif Gender (ARG) 114
5.2.6. Pendekatan Perencanaan Program PUG yang Sesuai dengan Kondisi Lokal Daerah 115
5.2.7. Saran untuk Penelitian Selanjutnya 117
DAFTAR PUSTAKA 118

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

➢ GAMBAR

Gambar 1. Kesetaraan Gender Sebagai Tujuan Kelima Sustainable Development Goals..... 13
Gambar 2. Human Development Index (HDI) Negara ASEAN-6 24
Gambar 3. Global Gender Gap Index (GGI) Negara ASEAN-6 Tahun 2021..... 25
Gambar 4. Gender Inequality Index Negara ASEAN-6 Tahun 2019 26
Gambar 5. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 28
Gambar 6. Distribusi Spasial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB 28
Gambar 7. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)..... 29
Gambar 8. Distribusi Spasial Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan PDRB 30
Gambar 9. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)..... 31
Gambar 10. Distribusi Spasial Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan PDRB 31
Gambar 11. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Nasional Berdasarkan Jenis Kelamin ... 40
Gambar 12. Rata-rata Lama Sekolah Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020... 41
Gambar 13. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Rata-rata Lama Sekolah 42
Gambar 14. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Ketimpangan Rata-rata Lama Sekolah..... 43
Gambar 15. Kuadran Growth Provinsi dan Ketimpangan Rata-rata Lama Sekolah 44
Gambar 16. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Nasional Berdasarkan Jenis Kelamin..... 44
Gambar 17. Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020.... 45
Gambar 18. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Harapan Lama Sekolah..... 46
Gambar 19. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Ketimpangan Harapan Lama Sekolah 46
Gambar 20. Kuadran Growth Provinsi dan Ketimpangan Harapan Lama Sekolah 47
Gambar 21. Angka Partisipasi Murni Berdasarkan Jenis Kelamin 48
Gambar 22. Perkembangan Umur Harapan Hidup Nasional Berdasarkan Jenis Kelamin 51
Gambar 23. Statistik Risiko Kesehatan Berdasarkan Gender..... 52
Gambar 24. Umur Harapan Hidup Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020..... 53
Gambar 25. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Umur Harapan Hidup 53
Gambar 26. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Ketimpangan Umur Harapan Hidup..... 54
Gambar 27. Kuadran Growth Provinsi dan Ketimpangan Umur Harapan Hidup 54
Gambar 28. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin 55
Gambar 29. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan yang Mengganggu Aktivitas dan yang Melakukan Rawat Jalan Selama Sebulan Terakhir 56
Gambar 30. Persentase Keluhan Kesehatan Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020 56

Gambar 31. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Keluhan Kesehatan 57
Gambar 32. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Ketimpangan Keluhan Kesehatan 57
Gambar 33. Kuadran Growth Provinsi dan Ketimpangan Keluhan Kesehatan 58
Gambar 34. Kematian Balita Menurut Pendidikan Ibu 59
Gambar 35. Angka Kematian Ibu di Indonesia per 100.000 Kelahiran Hidup 59
Gambar 36. Pelayanan Kesehatan terhadap Ibu pada Periode Hamil dan Melahirkan 60
Gambar 37. Persentase Stunting pada Balita di Indonesia 60
Gambar 38. Angka Stunting pada Balita Menurut Provinsi Tahun 2019 61
Gambar 39. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Nasional Berdasarkan Jenis Kelamin 64
Gambar 40. Pengeluaran Per Kapita Nasional Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020 64
Gambar 41. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Pengeluaran Per Kapita 65
Gambar 42. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Ketimpangan Pengeluaran Per Kapita 67
Gambar 43. Kuadran Growth Provinsi dan Ketimpangan Pengeluaran Per Kapita 68
Gambar 44. Perkembangan Sumbangan Pendapatan Nasional Berdasarkan Jenis Kelamin ... 68
Gambar 45. Sumbangan Pendapatan Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020 .. 69
Gambar 46. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Sumbangan Pendapatan 70
Gambar 47. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Sumbangan Pendapatan 71
Gambar 48. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Sumbangan Pendapatan 72
Gambar 49. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Nasional Berdasarkan Jenis Kelamin 73
Gambar 50. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Nasional Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020 74
Gambar 51. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 75
Gambar 52. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Ketimpangan TPAK 75
Gambar 53. Kuadran Growth Provinsi dan Ketimpangan TPAK 76
Gambar 54. Persentase Tenaga Profesional di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin 77
Gambar 55. Tenaga Profesional Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020 77
Gambar 56. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Tenaga Profesional 78
Gambar 57. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Ketimpangan Tenaga Profesional 79
Gambar 58. Kuadran Growth Provinsi dan Ketimpangan Tenaga Profesional 80
Gambar 59. Proporsi Anggota Parlemen di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin 82
Gambar 60. Keterlibatan dalam Parlemen Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020 83
Gambar 61. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Keterwakilan di Parlemen 83
Gambar 62. Proporsi ASN Perempuan Berdasarkan Jenis Jabatan (% total per jabatan) 84
Gambar 63. Proporsi Perempuan di Jabatan Struktural ASN (% total per jabatan) 85
Gambar 64. Proporsi Jabatan Manajerial Berdasarkan Jenis Kelamin (%) 86

Gambar 65. Persentase Perusahaan dengan Manajerial Perempuan Berdasarkan Bidang Pekerjaan (%) 86
Gambar 66. Ringkasan Ketimpanga Gender dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi 90

➢ TABEL

Tabel 1. Hasil Estimasi dengan Model Fixed Effect 88

Tabel 2. Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Usia di Jawa Barat 100

BAB I. PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki di semua aspek kehidupan. Hal ini dikarenakan perempuan merepresentasikan hampir setengah dari populasi di dunia, sehingga hampir tidak mungkin untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif tanpa adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, rasio penduduk perempuan di Indonesia hampir sebanding dengan laki-laki, yaitu sebesar 49,42% dari total penduduk. Di sisi lain, untuk mendukung Visi Indonesia 2045 dan meraih bonus demografi secara optimal, pendidikan dan produktivitas perempuan menjadi salah satu hal yang utama. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara terhadap sumber daya dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin nyata untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di semua bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun sosial dan politik.

Dalam perspektif internasional, kesetaraan gender merupakan komitmen yang tertuang pada salah satu butir dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang telah disepakati oleh negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tujuan ke-5 SDGs "*Gender Equality*", yaitu "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan". Kesetaraan gender merupakan prasyarat untuk dapat mencapai pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan *(sustainable development).*

Gambar 1. Kesetaraan Gender Sebagai Tujuan Kelima Sustainable Development Goals

Sumber: KPPPA, 2020

Berbagai kajian menunjukkan bahwa kesenjangan gender mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan kesenjangan sosial dan penurunan kualitas lingkungan di dunia (Yildiz, 2016). Oleh karena itu, peningkatan kontribusi dan pemberdayaan perempuan menjadi penting untuk mendukung tujuan pembangunan. Strategi yang berfokus untuk meningkatkan tenaga kerja perempuan dan mengurangi kemisikinan dapat mempercepat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan (Yildiz, 2016). Menurut McKinsey & Company (2018), usaha untuk memberdayakan perempuan di negara-negara Asia Pasifik dapat memberikan tambahan USD4,5 triliun pada PDB di tahun 2025 atau setara dengan peningkatan sebesar 12 persen dari skenario baseline. Sementara menurut World Bank (2020), dengan mengurangi ketimpangan gender dalam angkatan kerja Indonesia, akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 9 persen pada tahun 2025.

Peningkatan kualitas dan kuantitas keterlibatan atau pemberdayaan perempuan dalam tenaga kerja dan aktivitas ekonomi akan membantu peningkatan pendapatan negara melalui peningkatan produktivitas secara agregat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan negara. Selain memiliki manfaat ekonomi (kuantitatif/aspek makro), peningkatan kesetaraan gender juga memiliki manfaat ke diri perempuan, anak, keluarga, dan masyarakat (kualitatif/mikro). Kesetaraan gender akan menghasilkan perempuan yang lebih sehat, berpendidikan, produktif secara ekonomi, berkontribusi dalam pengambilan keputusan, serta anak bertumbuh dan berkembang lebih maksimal karena mendapatkan pendidikan dan pengasuhan seimbang dari kedua orang tua (ada pembagian peran domestik yang seimbang).

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan telah menjadi bagian integral dalam agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian dituangkan ke dalam RPJPN dan RPJMN. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Dalam RPJMN 2020–2024, PUG merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan, di mana kesetaraan gender menjadi salah satu fokus pembangunan Pemerintah. Lebih lanjut, salah satu bentuk penerapan strategi PUG dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran, adalah melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Penganggaran responsif gender merupakan suatu pendekatan fiskal untuk menurunkan ketimpangan dan memajukan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang berkeadilan (Chakraborty, Ingrams, & Singh, 2018).

Namun demikian, dalam hal perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya, ternyata masih terdapat kesenjangan antara penduduk

perempuan dan laki-laki. Tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kesetaraan gender masih dihadapi oleh Indonesia dengan masih terdapatnya kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan, antara lain pendidikan, kesehatan, serta kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan (Siscawati et al, 2020). Selain itu, aspek hukum, politik, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan juga turut berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian kesetaraan gender dalam pembangunan nasional maupun regional. Ketimpangan gender memiliki keterkaitan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama terkait investasi modal manusia sebagai faktor utama penggerak perekonomian, serta daya saing suatu wilayah/negara.

Di sisi lain, disparitas pembangunan gender dan pemberdayaan gender antar wilayah di Indonesia juga masih terjadi, di mana Kawasan Timur Indonesia cenderung memiliki capaian pembangunan dan pemberdayaan gender yang masih rendah. Kesenjangan gender ini tidak hanya terjadi antarprovinsi, tetapi juga antar kabupaten/kota dalam suatu provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan peran perempuan dengan laki-laki yang cukup signifikan dalam pembangunan regional. Ekonomi dan pembangunan regional merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, namun peningkatan atau percepatan pembangunan manusia berbasis gender dari perspektif kewilayahan bukan semata-mata untuk tujuan kesetaraan gender saja. Kebijakan afirmasi untuk menekan atau mengurangi kesenjangan gender yang terjadi berdasarkan kawasan di Indonesia, terutama pada wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas yang harus dilakukan, di mana hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah yang tercantum dalam Nawa Cita Pembangunan, yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran”.

Pada dasarnya perempuan telah diuntungkan dalam perkembangan ekonomi dan sosial dalam beberapa dekade terakhir, namun hingga saat ini perempuan masih banyak berada di golongan yang rentan akibat rendahnya akses pada sumber daya dan otoritas (Warth & Koparanova, 2012). Diskriminasi gender telah menjadi masalah yang kompleks mengingat diskriminasi ini terjadi multidimensi dan telah terakumulasi sejak lama. *Gender gap* atau adanya diskriminasi atas gender telah memberikan rintangan pada kelompok tertentu, khususnya perempuan untuk mengakses berbagai peluang ekonomi. Norma gender yang tidak setara yang terbentuk di masyarakat sering menghambat kemajuan perempuan, baik di ruang domestik maupun publik.

Kondisi ketimpangan gender diperparah dengan adanya pandemi Covid-19, yang cenderung meningkatkan kerentanan perempuan, memperburuk ketimpangan gender, dan menghambat kesetaraan gender. Semua epidemi selalu memiliki efek gender, di mana pada umumnya selalu memperburuk ketimpangan gender dan merusak kesetaraan gender yang sudah terbangun, yang disebabkan oleh relatif lebih rentannya perempuan terhadap guncangan ekonomi dan sosial dibandingkan laki-laki (Antonopoulos, 2009; Blanton et al., 2019; Floro and Dymski, 2000; Floro et al., 2009). Dampak pandemi pada perempuan dirasakan antara lain akibat kehilangan

pekerjaan/mata pencaharian, pemotongan upah dan jam kerja, serta tekanan akibat bertambahnya tanggung jawab pada pekerjaan dan keluarga/rumah tangga (Baird & Hill, 2020).

Perempuan merupakan salah satu faktor krusial dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kerangka keseimbangan antargenerasi, diperlukan perubahan paradigma bahwa perempuan merupakan sebagai pihak yang setara dan memiliki kontribusi yang berharga, bukan hanya sebagai kelompok yang rentan atau sebagai kelompok penerima saja yang perlu dilindungi. Dari level penyusunan kebijakan, pembangunan yang berkelanjutan juga tidak dapat tercapai jika penyusunan kebijakan tidak mempertimbangkan kebutuhan seluruh populasi, baik perempuan maupun laki-laki. Kebijakan responsif gender sangat diperlukan untuk dapat mengatasi kondisi ketimpangan gender. Strategi pengarusutamaan gender diimplementasikan dengan memasukkan perspektif gender di seluruh bidang pembangunan sehingga diharapkan dapat menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok, baik laki-laki maupun perempuan.

1.2. Tujuan Kajian

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi kajian ini, maka beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini meliputi:

1. Menganalisis situasi dan distribusi ketimpangan gender di Indonesia dikaitkan dengan perekonomian wilayah, dilihat dari dimensi pembangunan gender dan pemberdayaan gender (aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan jabatan publik).
2. Menganalisis indikator ketimpangan gender yang paling berpengaruh terhadap perekonomian wilayah (Produk Domestik Regional Bruto).
3. Menentukan daerah prioritas penanganan ketimpangan gender dan mendeskripsikan karakteristik ketimpangannya.

1.3. Ruang Lingkup Kajian

1. Wilayah kajian adalah 34 provinsi di Indonesia, dengan menggunakan data yang tersedia dalam kurun waktu tahun 2010 s.d. 2020.
2. Variabel penelitian atau data yang digunakan adalah komponen-komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), serta berdasarkan studi pustaka dan masukan dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD).
3. Kajian ini bertujuan melihat pengaruh indikator ketimpangan ketimpangan gender terhadap perekonomian wilayah, sehingga indikator makroekonomi yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

BAB II.
TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Pengarusutamaan Gender Dalam Agenda Pembangunan Nasional

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan (RPJMN 2020-2024).

Pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan pada dasarnya sudah dimulai sejak Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, dimana memberikan instruksi kepada seluruh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Gubernur serta Bupati/Walikota untuk menerapkan pengarusutamaan gender. Melalui instruksi ini, isu yang terkait dengan gender dalam proses pembangunan agar diidentifikasi dan ditangani secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.

Dasar pelaksanaan PUG dalam pembangunan 20 tahun ke depan dikuatkan melalui Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, PUG merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan, dimana kesetaraan gender menjadi salah satu fokus pembangunan Pemerintah. Hal ini sejalan dengan salah satu pritoritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Salah satu upaya untuk mencapai kesetaraan gender diwujudkan dengan implementasi program pengarusutamaan gender, yang dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan capaian kesetaraan gender antarwilayah secara merata.

Di sisi lain, untuk mendukung Visi Indonesia 2045 dan meraih bonus demografi secara optimal, pendidikan dan produktivitas perempuan menjadi salah satu hal yang utama. Visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dan ekonomi terbesar dunia memerlukan prasyarat yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan menguasai teknologi, baik laki-laki maupun perempuan (Bappenas, 2021). Sementara itu, kondisi demografi Indonesia yang suportif dari besarnya proporsi penduduk usia produktif mendatangkan potensi bonus demografi yang

akan mencapai puncaknya pada periode 2028-2031, dimana saat itu rasio ketergantungan akan berada pada titik terendah. Bonus demografi tersebut hanyalah perhitungan nominal dan memerlukan tindak lanjut untuk meraihnya secara optimal. Beberapa kunci utama untuk dapat meraih bonus demografi yang optimal diantaranya adalah: (i) mendorong pengarusutamaan gender di berbagai bidang; (ii) menjaga tingkat kesehatan penduduk yang yang prima sebelum memasuki usia produkif; (iii) memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas penduduk usia produktif dan lansia, terutama perempuan yang masih menghadapi isu gender (Bappenas, 2021). Tenaga kerja (perempuan dan laki-laki) yang produktif, adaptif, dan kompetitif akan menghasilkan produktivitas tinggi yang pada akhirnya akan meningkatkan upah pekerja. Dengan pengarusutamaan gender, upah tidak hanya meningkat tetapi juga semakin setara. Upah pekerja tersebut akan meningkatkan konsumsi dan investasi, dimana kemudian konsumsi dan investasi tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Selain memiliki manfaat ekonomi (kuantitatif/aspek makro), peningkatan kesetaraan gender juga memiliki manfaat ke diri perempuan, anak, keluarga, dan masyarakat (kualitatif/mikro). Kesetaraan gender akan menghasilkan perempuan yang lebih sehat, berpendidikan, produktif secara ekonomi, berkontribusi dalam pengambilan keputusan, serta anak bertumbuh dan berkembang lebih maksimal karena mendapatkan pendidikan dan pengasuhan seimbang dari kedua orang tua (ada pembagian peran domestik yang seimbang).

3.2. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ketimpangan Gender

Kondisi ketimpangan gender diperparah dengan adanya pandemi Covid-19, yang cenderung meningkatkan kerentanan perempuan, memperburuk ketimpangan gender, dan menghambat kesetaraan gender. Pandemi Covid-19 memiliki efek gender yang mempengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda, serta cenderung memperburuk ketimpangan gender di berbagai bidang. Hal ini didorong akibat adanya perbedaan kondisi biologis, fisiologis, dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, serta perbedaan peran, status, dan kegiatan mereka di masyarakat. Perempuan sebagai salah satu kelompok rentan relatif terdampak lebih berat akibat pandemi dibandingkan laki-laki. Dampak pandemi pada perempuan dirasakan diantaranya akibat kehilangan pekerjaan/mata pencaharian, pemotongan upah dan jam kerja, tekanan akibat bertambahnya tanggung jawab pada pekerjaan dan keluarga/rumah tangga, risiko kesehatan bagi pekerja perempuan yang mendominasi sektor kesehatan dan pelayanan, hingga kesulitan pada akses layanan kesehatan perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan perempuan terhadap pandemi Covid-19 ini dapat dilihat dari aspek ekonomi, sosial, maupun kesehatan.

Dari sisi ekonomi, perempuan pada umumnya memiliki akses yang lebih sedikit ke sumber daya produktif dibandingkan laki-laki, sehingga pendapatan dan *bargaining power* perempuan lebih rendah. Terlebih lagi, pasar tenaga kerja cenderung melibatkan perempuan ke dalam pekerjaan

dengan upah yang lebih rendah. Kerentanan perempuan di pasar tenaga kerja diperkuat oleh anggapan bahwa perempuan adalah pencari nafkah sekunder, sehingga laki-laki memiliki klaim yang lebih kuat atas pekerjaan daripada perempuan. Hal-hal tersebut menyebabkan perempuan lebih rentan secara ekonomi dibandingkan laki-laki, terutama pada saat pandemi.

Dari aspek sosial, norma gender dan sosial budaya cenderung menempatkan perempuan sebagai pengasuh utama dan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Hal ini menyebabkan perempuan cenderung terlibat pada pekerjaan tak berbayar di rumah tangga (*unpaid work)* lebih banyak daripada laki-laki, dimana hal ini menambah beban fisik dan psikologis perempuan, yang berpotensi memicu berbagai efek domino mulai dari munculnya stress hingga meningkatkan risiko kekerasan pada perempuan.

Dari sisi kesehatan, perempuan memiliki kebutuhan spesifik terkait kondisi biologisnya, seperti hamil, melahirkan, menstruasi, hingga kontrasepsi. Keterbatasan layanan kesehatan bagi perempuan di saat pandemi akibat pengalihan tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19 menimbulkan kerentanan tersendiri, mengingat perempuan cenderung lebih membutuhkan layanan kesehatan rutin dibandingkan laki-laki. Faktor kerentanan lain adalah sekitar 70% pekerja kesehatan, sosial, dan sektor pelayanan langsung adalah perempuan, dimana kondisi ini menimbulkan risiko keterpaparan virus Covid-19 yang tinggi.

Berbagai dampak pandemi Covid-19 terhadap perempuan tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan penanganan Covid-19 yang responsif gender atau spesifik gender. Potensi perempuan sebagai modal pembangunan perlu didukung rumusan kebijakan yang mampu mendorong partisipasi ekonomi dan kesempatan berusaha untuk perempuan, sebagai upaya menciptakan pemulihan ekonomi nasional yang inklusif.

3.3. Berbagai Bentuk Ketidakadilan Gender

3.3.1. Stereotip Gender

Stereotip gender adalah pandangan umum atau prakonsepsi tentang atribut atau karakteristik, atau peran yang harus atau harus dimiliki oleh, atau dilakukan oleh, perempuan dan laki-laki (OHCHR, 2014). Ketika kapasitas baik perempuan dan laki-laki dalam pengembangan diri menjadi terbatasi atau terbentuk berdasarkan stereotip gender, maka hal ini sangatlah berbahaya. Strereotip gender dapat melanggengkan ketidaksetaraan, contohnya anggapan bahwa “perempuan tidak rasional” dapat mempersempit kesempatan mereka untuk mengembangkan karir dan menapaki karir yang lebih tinggi. Stereotip gender lain misalnya “perempuan memiliki bakat mengasuh”, sering menjadikan kewajiban pengasuhan anak menjadi tanggung jawab eksklusif yang dibebankan bagi perempuan.

Stereotip yang lain misalnya yang mengaitkan kemampuan matematika itu adalah domain dari laki-laki yang terjadi di banyak negara maju sehingga keterwakilan perempuan di bidang matematika menjadi sangat kurang (Breda et al. 2020). Ini berkontribusi besar terhadap ketidaksetaraan gender di pasar tenaga kerja, dan ini menunjukkan hilangnya bakat potensial yang secara khusus dapat membantu memenuhi permintaan keterampilan yang meningkat terkait dengan pengembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan *(artificial intelligence*) (Ceci et al. 2014; Perez-Felkner, Nix, and Thomas 2017; Russo and Brittain 2014). Stereotip gender yang salah sering menjadi penyebab diskriminasi terhadap perempuan dan menjadi faktor yang berkontribusi dalam pelanggaran hak-hak yang luas seperti hak atas kesehatan, standar hidup yang layak, pendidikan, perkawinan dan hubungan keluarga, pekerjaan, kebebasan berekspresi, kebebasan bergerak, partisipasi dan perwakilan politik, pemulihan yang efektif, dan kebebasan dari kekerasan berbasis gender (OHCHR, 2014).

3.3.2. Sub-ordinasi

Sub-ordinasi berarti sesuatu yang lain kurang penting daripada yang lain (Cobuild, 2010). Arti lainnya adalah bahwa subordinasi berarti memiliki kekuasaan atau otoritas yang lebih rendah daripada orang lain dalam suatu kelompok atau organisasi (Hornby, 2003). Dengan demikian, subordinasi perempuan merupakan suatu kondisi di mana perempuan diposisikan lebih inferior daripada laki-laki yang membuat perempuan menjadi kurang memiliki akses ke sumber daya maupun pengambilan keputusan. Beberapa bentuk subordinasi dapat meliputi diskriminasi, pengabaian, eksploitasi, kekerasan baik dalam keluarga, masyarakat maupun tempat kerja. Beberapa contoh kongkritnya misalnya preferensi atas anak laki-laki, ketidakadilan dalam pembagian makanan, beban kerja maupun kesempatan dalam menempuh pendidikan pada anak perempuan, pelecehan seksual, hingga tidak ada hak atas kontrol reproduksi.

Sub-ordinasi sendiri berasal dari prinsip patriaki yang merupakan hambatan utama bagi kemajuan dan perkembangan perempuan (Sultana 2012). Menurut Lim (1997), patriarki adalah sistem dominasi laki-laki dan sub-ordinasi perempuan dalam ekonomi, masyarakat dan budaya yang mewarnai banyak sejarah manusia hingga saat ini. Institusi patriarki dan hubungan sosial bertanggung jawab atas status inferior atau sekunderisasi perempuan di pasar tenaga kerja upahan kapitalis (Sultana 2012).

3.3.3. Marjinalisasi

Marjinalisasi perempuan adalah masalah universal dan sudah lama memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang sangat besar; namun, intensitas dan konsekuensi dari marginalisasi tersebut bervariasi antar negara dan budaya (WEF, 2015). Beberapa bentuk marjinalisasi seperti diskriminasi dalam perekrutan pekerjaan, promosi, dan penilaian kinerja dalam organisasi dan stereotip dalam pengaturan sosial yang berdasarkan prasangka pada kelompok tertentu (Collins

et al. 2015) sehingga orang-orang pada kelompok tersebut akan berada dalam posisi tidak berdaya (Bako and Syed 2018). Dalam *Women World Survey Report* (Leach 2015) yang memfokuskan pada isu marjinalisasi perempuan, dikemukakan bahwa pemberdayaan perempuan tidak dapat dicapai tanpa pemberdayaan ekonomi mereka dan penciptaan lingkungan yang mendukung. Pada tahun 1979 telah disahkan konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) untuk mengatasi diskriminasi gender. Meskipun telah ada kemajuan yang dicapai oleh banyak negara dalam pengentasan diskriminasi gender, akan tetapi tingkat keberhasilannya beragam antar negara (Bako and Syed 2018) yang tentunya sangat banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang ada di negara tersebut.

3.3.4. Beban Ganda

Di semua negara, perempuan dan anak perempuan melakukan sebagian besar pekerjaan yang tidak dibayar (Smee and Martin 2016). Rata-rata, perempuan menghabiskan waktu dua kali lebih banyak untuk pekerjaan rumah tangga daripada laki-laki dan empat kali lebih banyak waktu untuk mengasuh anak (Duflo 2012). Telah semakin diakui bahwa waktu, intensitas dan status rendah yang terkait dengan pekerjaan perawatan yang tidak dibayar merupakan hambatan utama bagi partisipasi setara perempuan dalam angkatan kerja formal (Sepulvda, 2013). Laki-laki tidak mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan tidak dibayar pada tingkat yang sama di mana perempuan meningkatkan partisipasi ekonomi mereka (Cornwall and Edwards 2015). Penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kepulauan Solomon mendukung temuan ini; menunjukkan bahwa perempuan terus melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan kewajiban masyarakat, meskipun ketergantungan pada kontribusi ekonomi perempuan semakin meningkat (Pollard, 2000). Di sisi lain, meskipun pekerjaan yang dibayar dan tidak dibayar diperhitungkan, namun perempuan lebih lama bekerja daripada laki-laki (Cook and Razavi 2012). Temuan dari survei atas penggunaan waktu yang dilakukan di Pasifik menunjukkan bahwa perempuan memiliki beban kerja daripada laki-laki ketika pekerjaan yang dibayar dan tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan yang tidak dibayar digabungkan (Mohammed 2008).

3.3.5. Kekerasan terhadap Perempuan

Ketidaksetaraan gender seringkali meningkatkan risiko tindakan kekerasan oleh laki-laki terhadap perempuan (WHO 2009). Misalnya, kepercayaan tradisional bahwa laki-laki memiliki hak untuk mengontrol perempuan membuat perempuan dan anak perempuan rentan terhadap kekerasan fisik, emosional dan seksual oleh laki-laki (Linus Ilika 2014). Ketidaksetaraan gender menyulitkan korban pelecehan untuk mendapatkan dukungan (Heise, 2002a). Kekerasan terhadap perempuan paling sering dilakukan oleh pasangan intim, tetapi dalam banyak bentuk

lain: kekerasan oleh anggota keluarga, pelecehan seksual dan pelecehan oleh figur otoritas, perdagangan untuk prostitusi, pernikahan anak, kekerasan terkait mas kawin, pembunuhan demi kehormatan, kekerasan seksual dilakukan oleh tentara pada saat perang dan sebagainya (Heise 2002b). Konsekuensi kesehatan dari kekerasan tersebut berkisar dari cedera fisik dan kehamilan yang tidak diinginkan hingga infeksi menular seksual (termasuk HIV), masalah emosional seperti kecemasan dan depresi serta (dalam kasus ekstrem) pembunuhan atau bunuh diri (Sarkar 2008).

3.4. Situasi Ketimpangan Gender di Tingkat Global

Permasalahan gender telah menjadi wacana yang mengemuka dalam pembahasan di berbagai forum publik, baik di tingkat global maupun nasional. Diskursus peran sosial antara laki-laki dan perempuan telah menjadi pembahasan panjang, bahkan tidak jarang menjadi polemik dan perdebatan yang berkepanjangan. Perbedaan persepsi dan sudut pandang dalam pembahasan permasalahan gender tidak dapat dilepaskan dari pengaruh adat, budaya dan agama. Di tingkat global, kesetaraan gender telah lama menjadi bahan pembahasan dan menjadi salah satu agenda dalam pembahasan kesepakatan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu insiatif peta jalan global dalam upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik yang berkelanjutan, dengan mencantumkan "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan" sebagai tujuan kelima SDGs. Upaya ini bertujuan untuk memberikan kesetaraan dan pemberdayaan bagi kaum perempuan sebagai aktor dan *agent* yang berperan aktif dalam proses pembangunan ekonomi, sosial dan politik.

Upaya pencapaian tujuan SDGs kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tentu akan beririsan (*cross-cutting*) dengan pencapaian tujuan SDGs lainnya, misalnya terkait pendidikan dan kesehatan. Irisan antar *goals* SDGs ini menjadikan upaya pencapaian tujuan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh (*holistic approach*), sehingga membutuhkan kerjasama, sinergi dan peran aktif para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam konteks sederhana, isu kesetaraan gender berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Pengembangan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan diharapkan akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga menjadi modal penting dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pembangunan suatu negara.

Di tingkat global, beberapa lembaga internasional telah memperkenalkan beberapa kriteria dan instrumen standar yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan gender. UNDP memperkenalkan pemanfaatan *Human Development Index* (HDI) untuk mengukur kesetaraan gender suatu negara, dengan memilah data berdasarkan HDI *Female* dan HDI *Male*. Untuk melengkapi pemanfaatan data HDI tersebut, UNDP juga telah memperkenalkan *Gender Inequality Index* (GII). Selain UNDP, *World Economic Forum* (WEF) juga memperkenalkan indeks pengukuran ketimpangan gender lainnya dalam bentuk *Gender Gap Index* (GGI), sementara

OECD juga telah meluncurkan *Social Institutions and Gender Index* (SIGI). Hingga saat ini, instrumen yang sering digunakan sebagai standar internasional dalam pengukuran ketimpangan gender adalah GII dan GGI. Barnat, MacFeely, dan Peltola (2019) melakukan studi terkait beragam pengukuran indeks kesetaraan gender dengan mengomparasikan berbagai instrumen global terkait ketimpangan gender, yaitu GGI, GII, dan SIGI. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia dan negara berkembang lainnya termasuk ke dalam kelompok dengan kinerja aspek kesetaraan gender menengah dan memiliki skor yang cukup baik dalam hal kesetaraan gender di bidang pendidikan dan kondisi sosial. Namun, apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, pencapaian kesearaan gender di Indonesia masih belum cukup baik dan masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara maju.

HDI merupakan suatu indeks yang digunakan secara global untuk mengukur pencapaian target pembangunan sumber daya manusia dengan menggunakan tiga dimensi dasar *goals* dalam SDGs, yaitu SDG 3 – *Good Health and Well-being*, SDG 4 – *Quality Education*, dan SDG 8 – *Decent Work and Economic Growth.* Dimensi pengukuran ini juga diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam dimensi pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Berdasarkan data HDI tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat ke-107 dari 189 negara dan memiliki angka HDI yang paling rendah dibandingkan negara ASEAN-6 lainnya. UNDP memasukkan Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam ke dalam kategori kelompok negara *high human development*, sementara Singapura dan Malaysia termasuk ke dalam kategori kelompok negara *very high human development.* Apabila dilihat dari angka HDI untuk perempuan, Indonesia berada pada posisi pertengahan apabila dibandingkan dengan negara ASEAN-6 lainnya, dan secara konsisten menunjukkan peningkatan nilai indeks dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, ditinjau dari aspek angka harapan hidup saat lahir dan rata-rata lama sekolah, HDI Indonesia terlihat paling rendah apabila dibandingkan negara ASEAN-6 lainnya.

Gambar 2. Human Development Index (HDI) Negara ASEAN-6

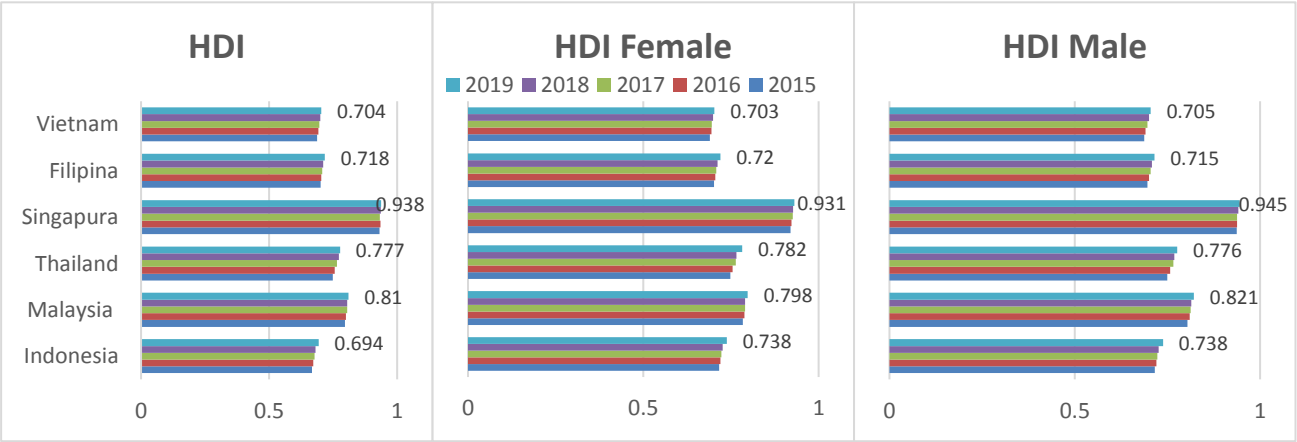

Sumber: UNDP (2021), diolah

WEF memperkenalkan ukuran ketimpangan gender *Global Gender Gap Index* (GGI), pada tahun 2006, yang membandingkan perubahan ketimpangan gender antarnegara dengan menggunakan empat dimensi yang terdiri dari: pertama, partisipasi dan peluang dalam perekonomian (*economic participation and opportunity*); kedua, pencapaian pendidikan (*education attainment*); ketiga, kesehatan dan kelangsungan hidup (*health and survival*); serta keempat, pemberdayaan politik (*political empowerment*). Berdasarkan *Global Gender Gap Report* Tahun 2021 diungkapkan bahwa secara global terdapat kemunduran dalam hal ketimpangan gender akibat pandemi Covid-19. Kemunduran tersebut terutama didorong oleh penurunan kinerja ketimpangan gender pada negara-negara besar. Berdasarkan rilis data GGI terbaru tahun 2021 dan dibandingkan dengan kondisi awal pada tahun 2006, seluruh negara ASEAN-6 mengalami penurunan peringkat, kecuali Singapura yang secara mengejutkan mengalami kenaikan peringkat. Berdasarkan data GGI, Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami kemunduran dalam upaya penurunan ketimpangan gender, dengan kontribusi penurunan terbesar berasal dari dimensi *economic participation and opportunity*. Meskipun mengalami kemunduran secara umum, namun dalam dimensi *health and survival* serta *education attainment*, Indonesia mengalami perkembangan yang lebih baik.

Gambar 3. Global Gender Gap Index (GGI) Negara ASEAN-6 Tahun 2021

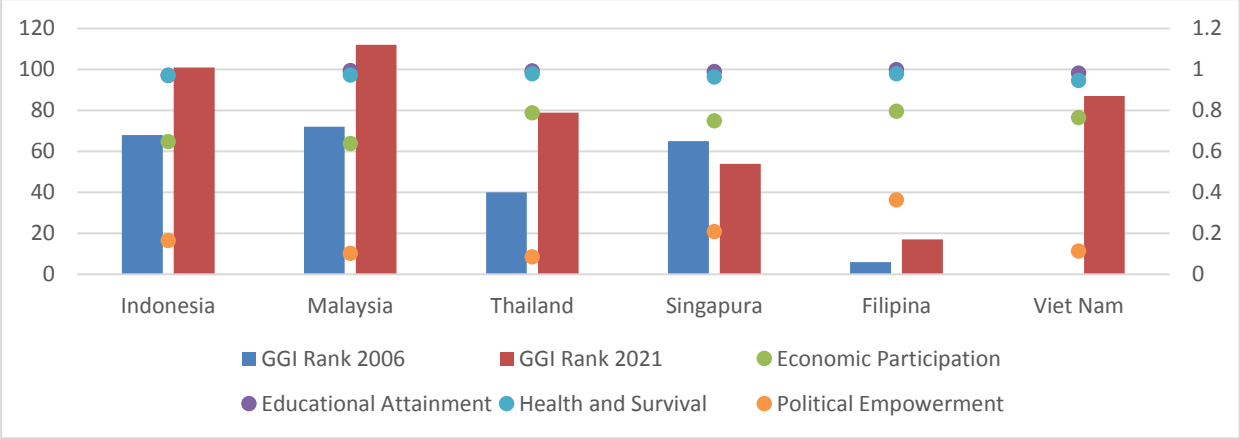

Sumber: World Economic Forum (2021)

Berdasarkan data *Global Gender Gap Index* (GGI) untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Indonesia juga termasuk negara yang mengalami penurunan ranking yang cukup signifikan pada tahun 2021. Secara umum, kawasan Asia Timur dan Pasifik telah mengalami peningkatan kinerja dalam penurunan ketimpangan gender pada tahun 2021, namun masih relatif tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Eropa Timur. Dengan skor GGI sebesar 0,688, Indonesia berada pada peringkat 10 dari 20 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik serta berada pada peringkat ke-101 dari 156 negara di dunia. Diantara negara-negara ASEAN-6, pencapaian Indonesia dalam kesetaraan gender juga relatif masih belum sebaik negara-negara ASEAN-6 lainnya. Meskipun demikian, apabila dilihat dari pencapaiannya, nilai dari masing-masing dimensi pengukuran GGI Indonesia berada di atas rata-rata global, kecuali

untuk dimensi *political empowerment.* Sebagai contoh, dalam hal partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibandingkan beberapa negara lainnya misalnya Mexico, Turki dan India, namun relatif masih tertinggal apabila dibandingkan dengan Italia dan Korea Selatan.

Pengukuran ketimpangan gender global lainnya adalah menggunakan *Gender Inequality Index* (GII). Pengukurannya didasarkan pada tiga aspek lainnya yang dianggap berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan status ekonomi. Aspek kesehatan reproduksi diukur dengan rasio kematian ibu dan angka kelahiran pada remaja. Aspek pemberdayaan diukur dengan proporsi kursi parlemen yang diduduki oleh perempuan, serta proporsi perempuan dan laki-laki dewasa berusia 25 tahun ke atas dengan setidaknya pendidikan menengah. Sedangkan, aspek status ekonomi diukur dengan tingkat partisipasi angkatan kerja dari populasi perempuan dan laki-laki berusia 15 tahun ke atas. Semakin besar angka indeks ini menunjukkan bahwa semakin besar kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki sehingga semakin besar pula dampak negatifnya terhadap pembangunan sumber daya manusia.

Gambar 4. Gender Inequality Index Negara ASEAN-6 Tahun 2019

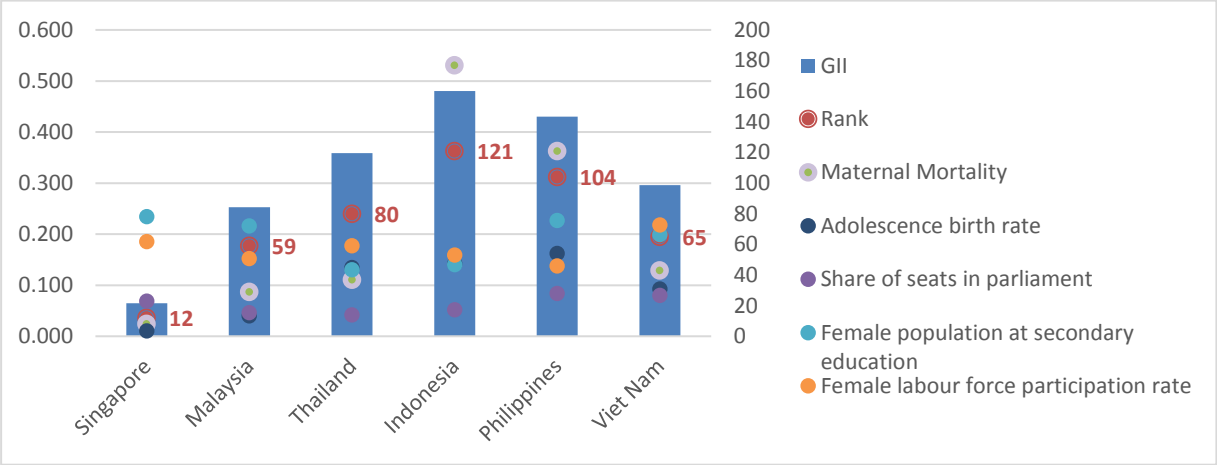

Sumber: UNDP (2021)

Berdasarkan rilis data tahun 2019, Indonesia memiliki nilai indeks GGI yang berada pada peringkat ke-121 dari 162 negara di dunia, jauh tertinggal apabila dibandingkan negara-negara ASEAN-6 lainnya. Aspek kesehatan di Indonesia berkontribusi paling tinggi terhadap tingginya index GII Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya persentase angka kelahiran pada remaja dan persentase rasio kematian ibu, dengan indeks Indonesia merupakan yang tertinggi apabila dibandingkan negara ASEAN-6 lainnya. Namun demikian, apabila melihat rincian subkomponennya, Indonesia memiliki keunggulan dalam beberapa aspek apabila dibandingkan dengan negara ASEAN-6 lainnya. Dalam hal partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, capaian Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan Singapura, Vietnam, dan Thailand. Selain itu, keterwakilan perempuan Indonesia yang duduk di kursi parlemen serta jumlah

perempuan yang menempuh pendidikan menengah di Indonesia juga masih lebih baik dibandingkan Filipina dan Vietnam.

Berdasarkan pengukuran ketiga indeks di atas, baik HDI, GGI, dan GII, terlihat bahwa pengukuran ketimpangan gender dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengukuran dan pendekatan. Secara umum, ketiga indeks menggunakan aspek kesehatan dan pendidikan sebagai aspek teknis yang mempengaruhi pengukuran indeks, selain mempertimbangkan pengukuran dari sisi ekonomi dan politik. Dengan melihat data terbaru capaian nilai indeks pengukuran ketimpangan gender baik melalui HDI, GGI, dan GII, secara umum Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan negara-negara lainnya, baik dalam lingkup kawasan maupun global. Secara umum, aspek kesehatan menjadi faktor dominan yang mengakibatkan capaian indeks kesetaraan gender Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Terlepas dari hal tersebut, kemunduran capaian aspek-aspek ketimpangan gender Indonesia pada setiap indeks tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi pemerintah guna mengurangi ketimpangan gender, serta meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional.

3.5. Perkembangan *Gender-Related Index* di Indonesia

Kesetaraan gender memiliki relevansi terhadap perekonomian suatu negara. Dengan tercapainya keseteraan gender, semua warga negara memiliki akses yang sama untuk meningkatkan produktivitas dalam kegiatan perekonomian, baik produksi maupun konsumsi. Wujud kesetaraan gender dapat dilihat dari beberapa indeks, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Ukuran pada IPM tersebut kemudian digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, yaitu rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Adapun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik, dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi.

Perkembangan *gender-related index* di Indonesia menunjukkan bahwa kesenjangan antara perempuan dan laki-laki masih tampak di berbagai bidang, yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik, dimana perempuan masih relatif tertinggal dibandingkan laki-laki Angka-angka pada indeks pengukuran kesetaraan gender, baik IPG maupun IDG, menunjukkan masih adanya tantangan dalam pencapaian kesetaraan gender di Indonesia.

Gambar 5. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

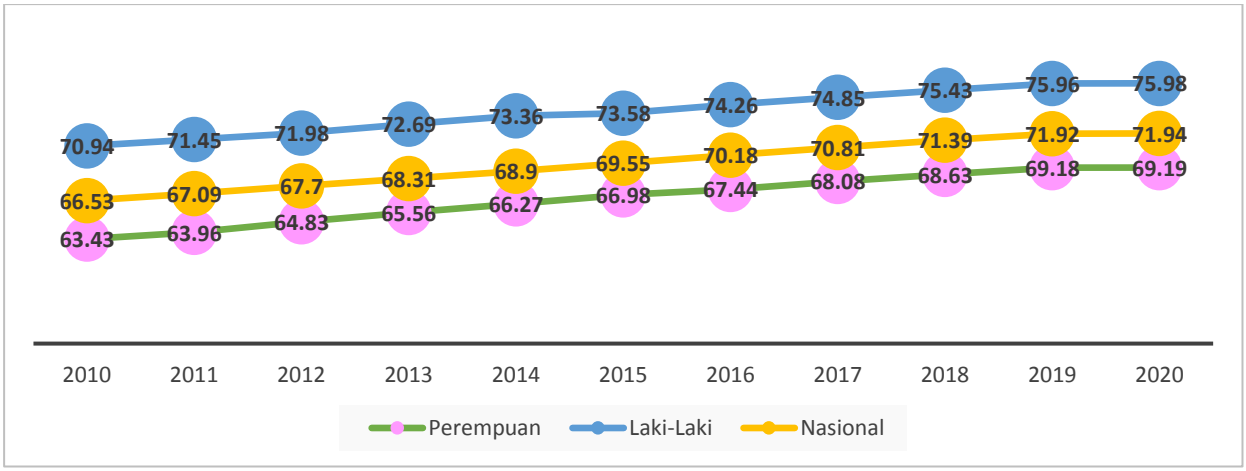

Sumber: BPS

Secara umum, pembangunan sumber daya manusia di Indonesia mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir, terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus menunjukkan peningkatan yang diukur melalui indeks kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Secara nasional, sejak tahun 2016 IPM Indonesia sudah mencapai status tinggi (70,18). Capaian ini terus meningkat dari tahun ke tahun hingga di tahun 2020, IPM Indonesia mencapai nilai 71,94. Di tingkat ASEAN, IPM Indonesia tahun 2020 berada pada peringkat ke-5 atau posisi tengah dari 10 negara ASEAN, dimana Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Namun demikian, jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, angka IPM masih menunjukkan kesenjangan, dimana IPM perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Sejak tahun 2010, IPM laki-laki telah berstatus tinggi dengan nilai di atas 70, namun IPM perempuan masih berstatus sedang dengan nilai IPM di kisaran angka 60-an. Tahun 2020, IPM perempuan masih berstatus sedang dengan nilai IPM 69,19, tertinggal jauh dengan laki-laki yang telah mencapai nilai IPM 75,98.

Gambar 6. Distribusi Spasial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB

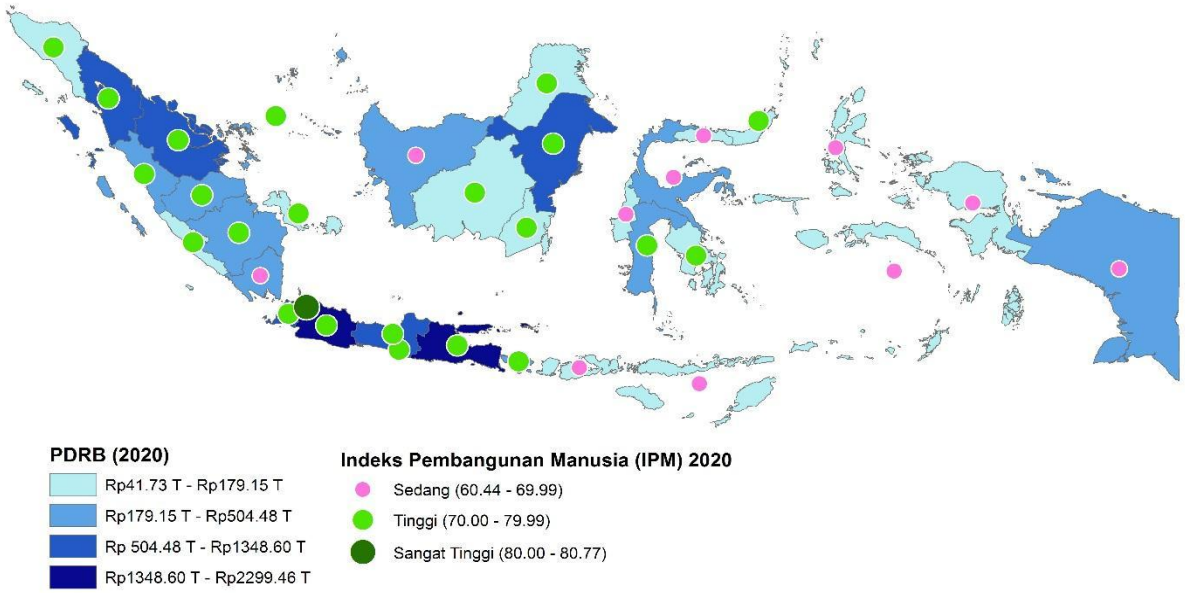

Sumber: BPS (diolah)

Di sisi lain, apabila ditinjau secara keseluruhan memang indikator IPM Indonesia menyandang status tinggi. Namun apabila dilihat lebih jauh secara spasial masih terdapat disparitas. Provinsi DKI Jakarta sebagai jantung perekonomian nasional menyandang status sangat tinggi dengan angka IPM di atas 80. Sementara itu, terdapat 22 provinsi yang menyandang status IPM tinggi, yaitu Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Kep. Babel, Kep. Riau, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Banten, Bali, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulut, Sulsel, Sultra. Sedangkan sisanya sebanyak 11 provinsi menyandang status IPM sedang karena skornya berada di rentang 60-70, yang meliputi Lampung, NTB, NTT, Kalbar, Sulteng, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut, Papbar, Papua. Provinsi yang menyandang status IPM kategori sedang cenderung terkonsentrasi di wilayah timur Indonesia. Kondisi ini pada umumnya senada dengan ukuran ekonomi daerah tersebut yang dicerminkan oleh PDRB-nya. Hal sebaliknya di wilayah Jawa, PDRB-nya yang relatif tinggi sejalan dengan IPM yang tinggi pula. IPM berperan penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, karena komponen modal manusia yang membentuknya (angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita) merupakan unsur yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang menggerakkan sektor-sektor ekonomi.

Dalam hal kesetaraan gender, kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan rasio antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Angka IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki. Namun demikian, angka IPG yang tinggi belum tentu mencerminkan capaian IPM laki-laki dan perempuan yang tinggi pula. Angka IPG yang tinggi bisa didapatkan dari dua kondisi, yaitu IPM laki-laki dan perempuan yang sama-sama tinggi, atau IPM laki-laki dan perempuan yang sama-sama rendah. Dengan demikian, kesetaraan pembangunan gender (IPG) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan level pencapaian IPM pada laki-laki maupun perempuan.

Gambar 7. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

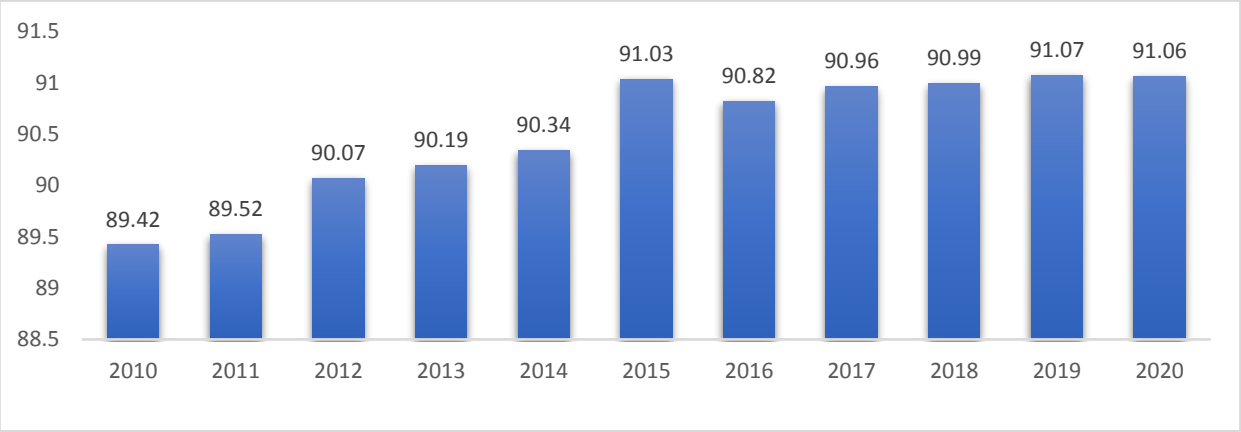

Sumber: BPS

Capaian IPG pada tahun 2019 telah mampu melampaui capaian IPG di tahun 2015, yang setelah itu sempat mengalami penurunan secara signifikan di tahun 2016. Namun sejak tahun 2017, IPG Indonesia terus meningkat, yang disebabkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang lebih besar dibanding IPM laki-laki pada periode tahun 2018-2019. Namun pada tahun 2020, IPG kembali mengalami penurunan, dari 91,07 menjadi 91,06. Penurunan ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang terutama berpengaruh pada penurunan pengeluaran per kapita dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 8. Distribusi Spasial Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan PDRB

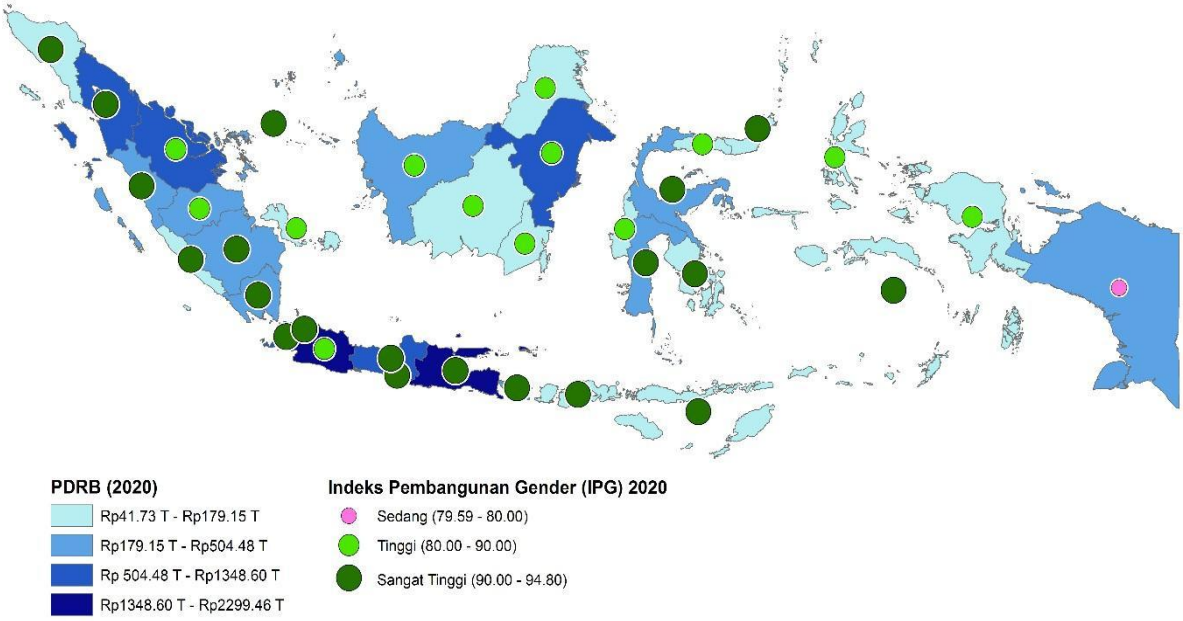

Sumber: BPS (diolah)

Secara spasial, pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi provinsi yang IPG-nya berada pada kategori rendah. Sebanyak 15 provinsi memiliki IPG di atas rata-rata nasional, dimana provinsi D.I. Yogyakarta memiliki IPG tertinggi (94,8). Sementara IPG di provinsi Papua adalah yang terendah (79,59). Ketimpangan pembangunan gender antar wilayah masih terjadi, dimana wilayah di ujung timur Indonesia memiliki capaian pembangunan gender yang berbeda jauh dengan wilayah di bagian barat Indonesia. Kondisi ini terutama disebabkan oleh ketimpangan pendapatan dan rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan. Apabila dilihat lebih jauh, provinsi Papua memiliki angka IPM perempuan yang masih berada di kategori rendah. Relatif rendahnya pembangunan perempuan tersebut tentunya berpengaruh pula pada kinerja ekonomi daerah, dimana PDRB provinsi Papua berada di level tengah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Sementara itu, dilihat dari sisi pemberdayaan gender, partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik, dan manajerial telah menunjukkan kemajuan yang terus meningkat. Dalam sepuluh tahun terakhir, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia menunjukkan peningkatan dari angka 68,15 pada tahun 2010 menjadi 75,57 pada tahun 2020. Nilai IDG yang

dicapai pada tahun 2019 melesat secara signifikan dibandingkan tahun 2018, yang disebabkan adanya peningkatan pada semua indikator pembentuk IDG, terutama pada keterlibatan perempuan di parlemen yang meningkat signifikan. Di tahun 2019, jumlah perempuan di parlemen meningkat menjadi 20,52% atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang baru mencapai 17,32%. Hal inilah yang menyebabkan angka IDG meningkat tajam dan mengindikasikan pemberdayaan gender di Indonesia semakin nyata.

Gambar 9. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

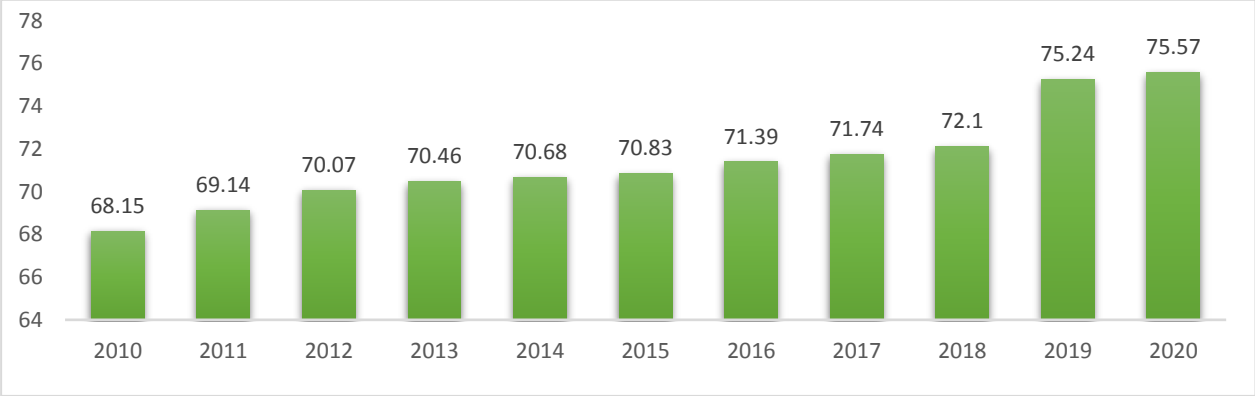

Sumber: BPS

Namun demikian, perlambatan pada pertumbuhan IDG kembali terjadi pada tahun 2020. Dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi pertumbuhan IDG di semua komponen, terutama pada komponen sumbangan pendapatan perempuan, dimana pandemi secara umum telah menyebabkan pekerja perempuan kehilangan pekerjaan/mata pencaharian maupun pemotongan upah dan jam kerja. Di sisi lain, pertumbuhan IDG yang relatif lebih lambat dibandingkan angka IPG. Hal ini menunjukkan bahwa ruang perbaikan untuk mengatasi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan masih sangat diperlukan.

Gambar 10. Distribusi Spasial Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan PDRB

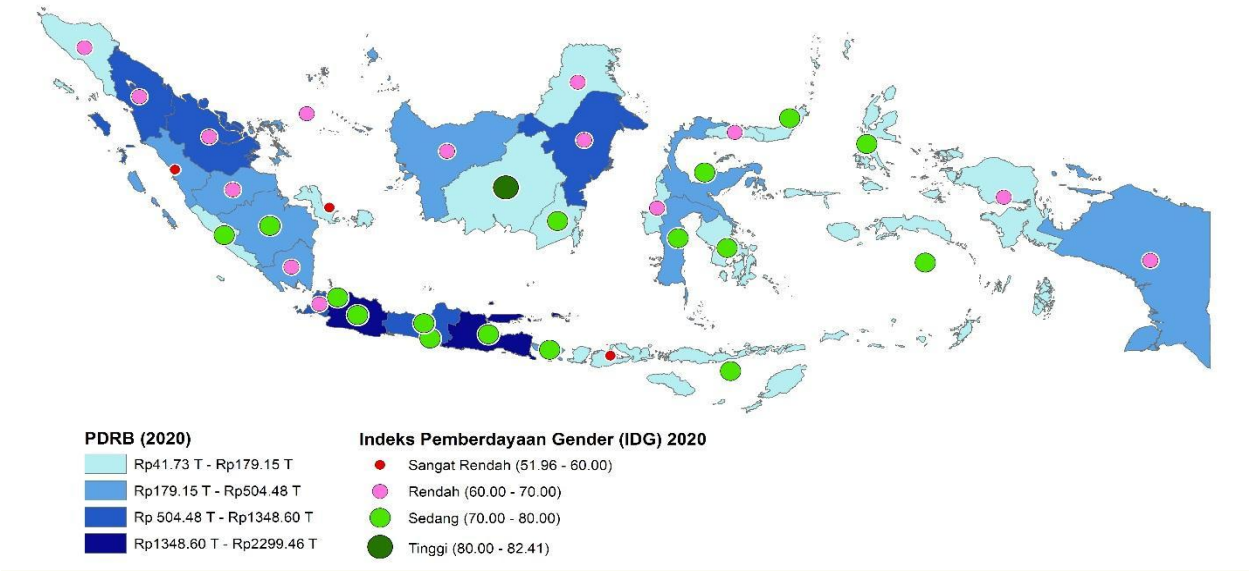

Sumber: BPS (diolah)

Secara spasial, pada tahun 2020, masih terdapat tiga provinsi dengan capaian IDG sangat rendah (kurang dari 60,00), yaitu NTB, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat. Di sisi lain, hanya ada lima provinsi yang pencapaian IDG-nya berada di atas rata-rata nasional (75,57), yaitu Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Nilai IDG tertinggi terdapat di provinsi Kalimantan Tengah dengan capaian 82,41, sementara IDG terendah ada pada provinsi NTB yang hanya sebesar 51,96. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemberdayaan gender di Indonesia sudah meningkat secara signifikan, namun masih belum merata di seluruh provinsi, atau masih terdapat kesenjangan IDG yang signifikan di antar wilayah di Indonesia. Hal ini menunjukkan masih ada kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan di banyak daerah. Apabila dilihat dari kinerja ekonominya, PDRB provinsi dengan IDG sangat rendah juga relatif kecil dibandingkan provinsi lain. Hal ini terutama disebabkan oleh relatif rendahnya pemberdayaan perempuan terutama di bidang ekonomi, yang ditunjukkan oleh komponen sumbangan pendapatan perempuan, di mana dipengaruhi oleh rendahnya proporsi perempuan pada pekerjaan di sektor non pertanian dan lapangan pekerjaan yang produktivitasnya tinggi, serta faktor kesenjangan upah.

BAB III
METODOLOGI

BAB III.
METODOLOGI

3.1. Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan desain penelitian *mixed method sequential explanatory*, yang merupakan kombinasi penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Menurut Arini (2018), pada penelitian dengan *explanatory sequential design* terdapat dua fase berurutan atau sekuensial yang interaktif. Tahap pertama dilakukan pengambilan dan analisis data kuantitatif yang mana memiliki prioritas untuk menjawab pertanyaan penelitian, lalu pada tahap berikutnya dilakukan fase pengambilan data kualitatif yang mengikuti fase sebelumnya. Interpretasi data kualitatif digunakan untuk membantu menjelaskan (*explain*) hasil yang diperoleh pada fase kuantitatif.

Sementara menurut Sugiono (2012), penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Menurut Arikunto (2013), penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi apa adanya tentang suatu variabel. Sementara pendekatan kuantitatif digunakan karena kajian ini menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya, sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Arikunto (2013). Dengan demikian, penelitian deskriptif kuantitatif dalam kajian ini dimaksudkan untuk melihat, meninjau dan menggambarkan dengan angka tentang objek yang diteliti seperti apa adanya dan menarik kesimpulan tentang hal tersebut sesuai fenomena yang tampak pada saat penelitian dilakukan.

Pada kajian ini, *gender-related index*, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), beserta komponen-komponen pembentuknya dianalisis secara kuantitatif sebagai variabel-variabel penelitian untuk mendeskripsikan situasi dan distribusi ketimpangan gender di Indonesia, dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, serta politik dan jabatan publik, menggunakan analisis statistik dan analisis spasial. Kemudian, analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk membantu menjelaskan penyebab umum ketimpangan gender berdasarkan hasil yang diperoleh pada analisis kuantitatif. Demikian pula halnya saat menganalisis pengaruh kondisi ketimpangan gender terhadap perekonomian wilayah, yang direpresentasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dilakukan pula analisis kuantitatif pada variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis secara ekonometri, untuk mengetahui indikator ketimpangan gender yang paling berpengaruh terhadap perekonomian wilayah. Selanjutnya, analisis kualitatif kembali dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik ketimpangan gender pada daerah prioritas penanganan ketimpangan gender.

3.2. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data panel *(pooled data)*, yang merupakan perpaduan antara data runtut waktu *(time series)* dan data silang *(cross section)*, dalam kurun waktu 11 tahun (tahun 2010-2020). Semua data berbentuk tahunan untuk delapan variabel di 34 provinsi, dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Kajian ini menggunakan Produk Domestik Regional Brito (PDRB) sebagai variabel terikat *(dependent variable).* Sedangkan untuk variabel bebas *(independent variable)* adalah: (i) ketimpangan gender dalam pendidikan, menggunakan data Rasio Rata-rata Lama Sekolah dan Rasio Harapan Lama Sekolah, (ii) ketimpangan gender dalam kesehatan, menggunakan data Rasio Keluhan Kesehatan dan Rasio Umur Harapan Hidup, (iii) ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan, menggunakan data Rasio Pengeluaran Per Kapita dan Rasio Sumbangan Pendapatan, (iv) ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan, menggunakan data Rasio Tingkat Partisiapsi Angkatan Kerja dan Rasio Tenaga Profesional.

Rasio diperoleh dengan menggunakan formula indeks paritas gender. Menurut Sari (2019), magnitude kesenjangan/ disparitas/ gap kinerja penduduk perempuan dan laki-laki dapat diukur dengan menggunakan Indeks Paritas (IP) gender, yang merupakan rasio capaian kinerja perempuan terhadap laki-laki.

$$IP = \frac{\textit{capaian kinerja perempuan}}{\textit{capaian kinerja laki-laki}}$$

Berdasarkan formula tersebut:

- Jika IP = 1 maka tidak terdapat perbedaan kinerja atau kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.
- Jika IP < 1 maka terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibandingkan kinerja laki-laki.
- Jika IP > 1 maka terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dibandingkan kinerja laki-laki.

3.3. Metode Analisis Situasi dan Distribusi Ketimpangan Gender Spasial

Tahapan ini dilakukan menggunakan analisis statistik deskriptif kuantitatif pada variabel-variabel penelitian, yaitu komponen-komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), untuk mendeskripsikan situasi ketimpangan gender di Indonesia, dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, serta politik dan jabatan publik. Kemudian, analisis deskriptif kualitatif melalui literatur review dilakukan untuk membantu menjelaskan penyebab umum ketimpangan gender berdasarkan situasi ketimpangan gender yang telah diindentifikasi.

Tahapan selanjutnya adalah analisis spasial dan pengolahan data menggunakan *Geographic Information System* (GIS) untuk menganalisis pola distribusi ketimpangan gender antar wilayah di Indonesia, dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan. *Geographic Information System* (GIS) atau Sistem Informasi Geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisis, serta menampilkan informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi atau informasi spasial (Prahasta, 2009).

Dalam kajian ini, metode GIS menghasilkan visualisasi spasial berupa peta yang menampilkan *overlay* antara data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan variabel-variabel penelitian, yaitu Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Keluhan Kesehatan, Umur Harapan Hidup, Pengeluaran Per Kapita, Sumbangan Pendapatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Tenaga Profesional. Operasi *overlay* data grafis dan data atribut pada GIS digunakan untuk menganalisis pola distribusi spasial variabel-variabel ketimpangan gender di wilayah Indonesia dan keterkaitannya dengan perekonomian wilayah yang dalam hal ini direpresentasikan dengan nilai dan pertumbuhan PDRB. Pengolahan data menggunakan GIS lebih lanjut digunakan untuk menentukan daerah prioritas penanganan ketimpangan gender, yang dilengkapi dengan analisis deskriptif kualitatif melalui literatur review untuk mendeskripsikan karakteristik ketimpangan gender pada daerah prioritas penanganan ketimpangan gender.

3.4. Metode Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Metode ini dilakukan secara kuantitatif dengan membangun model ekonometrika, untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel terkait ketimpangan gender terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hipotesis yang ingin dibuktikan pada kajian ini adalah bahwa variabel-variabel ketimpangan gender yang berasal dari komponen pembentuk *gender-related index* signifikan mempengaruhi PDRB, baik secara parsial ataupun simultan.

Model yang digunakan adalah model *random effect* dan *fixed effect* yang memang biasa digunakan untuk menganalisa data yang berbentuk panel. Setelah dilakukan regresi dengan masing-masing model tersebut, maka dilakukan tes Hausman untuk mengetahui apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang akan memberikan estimasi yang lebih efisien (Wooldridge 2010). Hasil dari tes Hausman yang telah dilakukan ternyata menunjukkan bahwa model *fixed effect* yang akan lebih efisien untuk penelitian ini, sehingga kajian ini kemudian menggunakan model *fixed effect*. Model ini memiliki kelebihan yaitu memperbolehkan adanya korelasi antara variable independen dengan α_{it} di sepanjang periode penelitian dimana kasus bias variabel yang dihilangkan dapat dihindari (Wooldridge 2010).

Adapun persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\log PDRB_{it} = \alpha_{it} + + \beta_1 RRLS_{it} + \beta_2 RHLS_{it} + \beta_3 RUHH_{it} + \beta_4 RKK_{it} + \beta_5 RPPK_{it} + \beta_6 RSP_{it} + \beta_7 RTPAK_{it} + \beta_8 RTP_{it} + e_{it}$$

dimana:

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto nominal dari 34 provinsi.

RRLS = Rasio Rata-rata Lama Sekolah

RHLS = Rasio Harapan Lama Sekolah

RUHH = Rasio Umur Harapan Hidup

RKK = Rasio Keluhan Kesehatan

RPPK = Rasio Pengeluaran Per Kapita

RSP = Rasio Sumbangan Pendapatan

RTPAK = Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

RTP = Rasio Tenaga Professional

Seluruh variabel independen yang berbentuk rasio tersebut yang dihitung menggunakan formula Indeks Paritas (IP), yaitu capaian kinerja perempuan dibagi dengan capaian kinerja laki-laki.

Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji persamaan regresi secara keseluruhan, apakah semua variabel bebas *(independent)* mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat *(dependent).* Hipotesis yang terbentuk dalam uji F adalah sebagai berikut:

H0 : $\beta 1 = \beta 2 = \ldots = 0$

(variabel-variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat)

H1 : $\beta 1 \neq \beta 2 \neq \ldots \neq 0$

(variabel-variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat)

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F adalah sebagai berikut:

- Jika probabilitas F-statistik > taraf signifikansi (α), atau jika Fhitung < Ftabel, maka terima H0, artinya variabel-variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
- Jika probabilitas F-statistik < taraf signifikansi (α), atau jika Fhitung > Ftabel, maka tolak H0, artinya variabel-variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.

Uji T

Setelah dilakukan uji F yang merupakan uji koefisien regresi secara simultan, maka selanjutnya dilakukan uji T, yaitu pengujian koefisien regresi secara parsial. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut:

H0 : $\beta i = 0$ (variabel bebas ke-i tidak memengaruhi variabel terikat)

H1 : $\beta i \neq 0$ (variabel bebas ke-i memengaruhi variabel terikat)

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji T hampir sama dengan uji F, yaitu membandingkan probabilitas t-statistik dengan taraf siginifikansi (α) yang digunakan.

- Jika probabilitas t-statistik > taraf signifikansi (α), atau jika Thitung < Ttabel, maka terima H0, artinya variabel bebas ke-i tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Jika probabilitas t-statistik < taraf signifikansi (α), atau jika Thitung > Ttabel, maka tolak H0, artinya variabel bebas ke-i berpengaruh terhadap variabel terikat.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV.
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Situasi dan Distribusi Ketimpangan Gender di Bidang Pendidikan

Pendidikan bagi perempuan merupakan suatu siklus yang membawa kebaikan, baik bagi diri perempuan itu sendiri, keluarganya, komunitasnya, serta bangsa dan negaranya. Hal ini dikarenakan mendidik perempuan bukan hanya mendidik dirinya sendiri, tetapi turut mendidik satu keluarganya dan anak-anak yang akan mereka lahirkan. Perempuan memiliki peran penting sebagai ibu dan juga membangun keluarga, yang diharapkan mampu menghasilkan generasi penerus bangsa unggulan apabila sang ibu juga memiliki pendidikan yang baik. Indonesia telah mencapai perkembangan positif dalam mencapai kesetaraan gender di bidang pendidikan selama satu dekade terakhir, meski tentu masih banyak ruang untuk perbaikan. Perbaikan upaya penyetaraan gender di bidang Pendidikan dapat dilihat antara lain dari meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah

4.1.1. Rata-rata Lama Sekolah

Keberhasilan pembangunan manusia berbasis gender di bidang pendidikan salah satunya diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan dalam jangka panjang. Angka RLS didapat dengan dengan menghitung jumlah tahun yang sudah ditempuh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam mengukur RLS dimulai pada penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi di usia ini proses pendidikan formal sudah selesai dilalui. Pendidikan dasar (SD) diperhitungkan selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun dan SMA selama 3 tahun, atau 12 tahun untuk seluruh jenjang sekolah dasar dan menengah tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas atau tidak (BPS, 2020). Penghitungan juga dilakukan pada penduduk yang pernah menempuh jenjang pendidikan tinggi sesuai tingkatan diploma, sarjana, magister dan doktoral.

Gambar 11. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Nasional Berdasarkan Jenis Kelamin

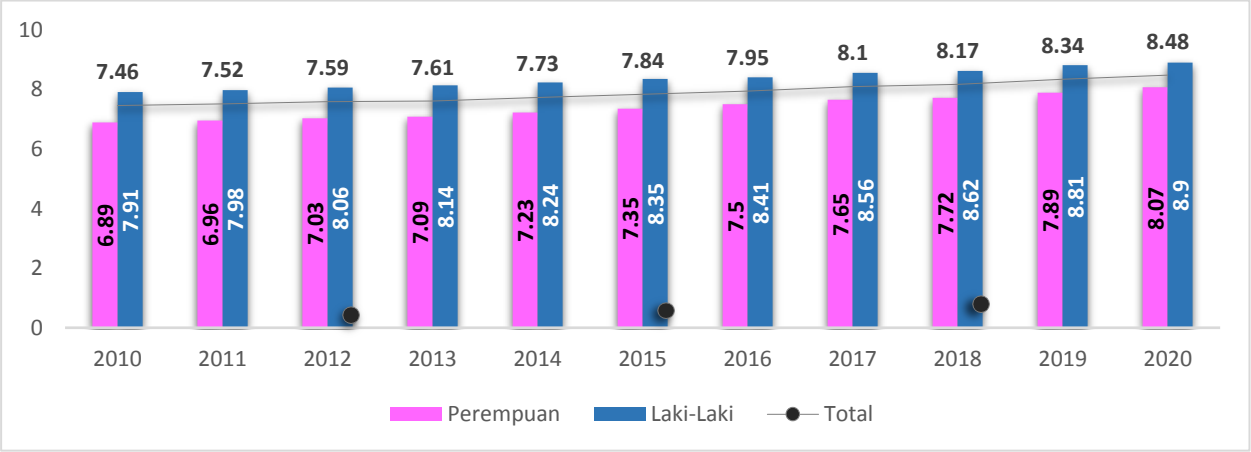

Sumber: BPS (diolah)

Selama satu dekade terakhir, RLS perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2019, terdapat kesenjangan RLS dalam durasi hampir satu tahun antara laki-laki dan perempuan, atau perempuan lama bersekolahnya lebih cepat hampir satu tahun dibandingkan laki-laki. Sementara pada pada tahun 2020, kesenjangan ini sedikit berkurang menjadi 9,96 bulan. Secara rata-rata laki-laki sudah menikmati pendidikan selama 8,9 tahun atau hingga kelas IX atau setingkat kelas 3 pada Sekolah Menengah Pertama, sedangkan perempuan menikmati pendidikan lebih cepat yaitu selama 8,07 tahun atau kelas VIII atau setingkat kelas 2 pada Sekolah Menengah Pertama.

Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami tren peningkatan RLS dari tahun ke tahun. Pada laki-laki, peningkatan RLS yang terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,99 tahun dari posisi tahun 2010, sedangkan pada perempuan peningkatan yang terjadi sebanyak 1,18 tahun. Peningkatan pada RLS perempuan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki ini berdampak pada semakin kecilnya kesenjangan yang ada antara RLS laki-laki dan perempuan. Jika capaian lama sekolah pada perempuan terus mengalami peningkatan sehingga mendekati lama bersekolah laki-laki, maka kesenjangan RLS perempuan akan dapat ditekan menjadi lebih setara di kemudian hari.

Gambar 12. Rata-rata Lama Sekolah Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020

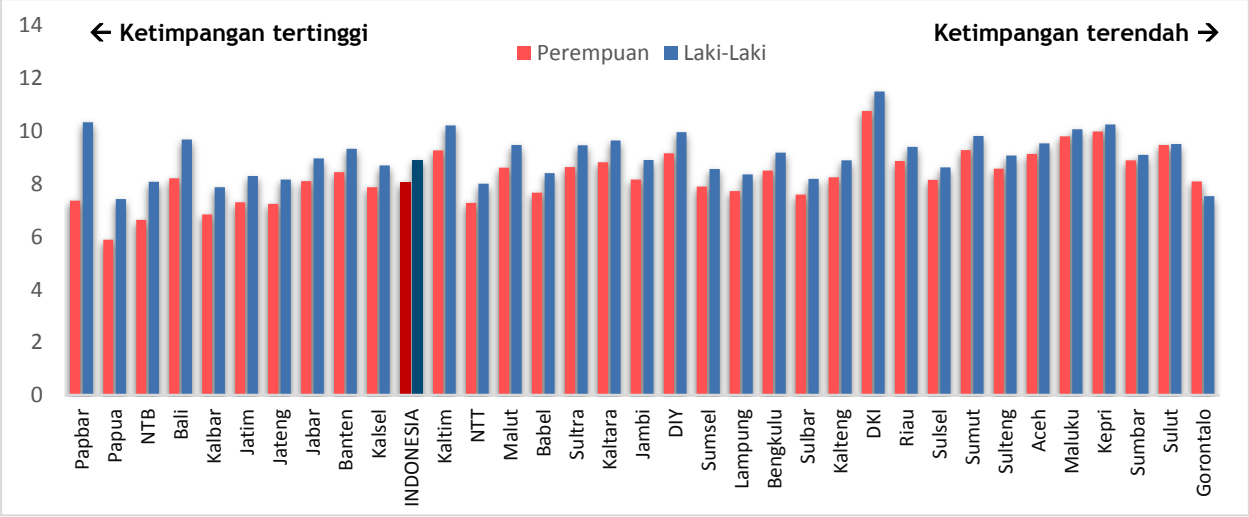

Sumber: BPS (diolah)

Ketimpangan RLS di tahun 2020 masih terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Satu-satunya provinsi dengan RLS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki terjadi di Gorontalo. Kesenjangan RLS perempuan yang sangat lebar terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Di dua provinsi ini, kesenjangan rata-rata lama sekolah mencapai 1,55 tahun untuk Papua dan selama 2,97 tahun di Papua Barat, padahal kesenjangan RLS rata-rata di tingkat nasional sebesar 0,83 tahun. Di Papua, rata-rata penduduk perempuan hanya menempuh pendidikan sampai kelas V Sekolah Dasar, sedangkan laki-laki sudah mencapai kelas VII SMP/sederajat, sementara di Papua Barat rata-rata penduduk perempuan hanya sampai kelas VII pada

SMP/sederajat sedangkan rata-rata laki-laki sudah mencapai jenjang kelas X pada SMA/sederajat. Kesenjangan ini harus menjadi perhatian pemerintah di tingkat pusat dan daerah agar semua penduduk dapat menerima akses dan mendapatkan layanan pembangunan di bidang pendidikan. Selain memiliki kesenjangan RLS tertinggi kedua di Indonesia, Papua juga merupakan provinsi dengan RLS terendah baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, yaitu 7,43 tahun untuk laki-laki dan 5,88 tahun untuk perempuan. Sementara itu, DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi dengan RLS laki-laki mencapai 11,5 tahun atau hampir menyelesaikan jenjang SMA/sederajat, sedangkan penduduk perempuan DKI Jakarta rata-rata bersekolah selama 10,76 tahun.

Gambar 13. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Rata-rata Lama Sekolah

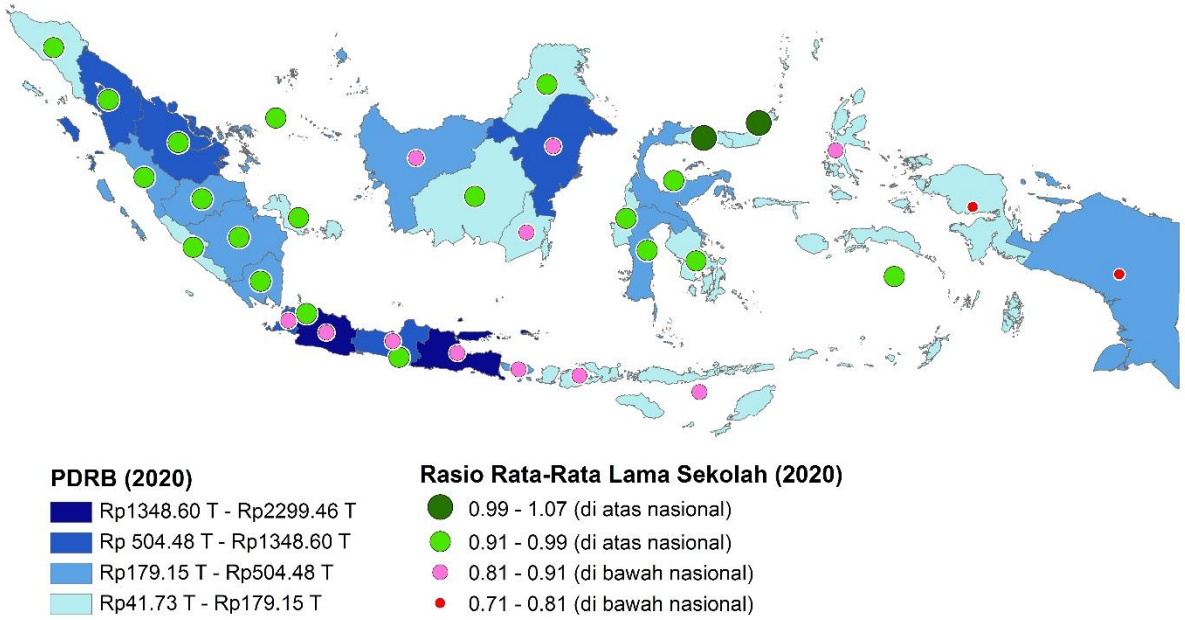

Sumber: BPS (diolah)

Secara nasional, rasio Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,91. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan gender, dimana capaian rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu RLS perempuan sebesar 8,07 tahun dan RLS laki-laki sebesar 8,9 tahun. Sementara secara spasial, kawasan timur Indonesia dan sebagian besar provinsi di Jawa memiliki ketimpangan rata-rata lama sekolah di atas ketimpangan nasional. Sebanyak 13 provinsi masih memiliki rasio Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di bawah angka nasional, dimana lima provinsi diantaranya berada di wilayah timur Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan PDRB daerah-daerah tersebut yang berkontribusi kurang dari 1% terhadap PDB nasional. Di sisi lain, wilayah Jawa sebagai kontributor terbesar PDB justru memiliki rasio RLS di bawah level nasional pada beberapa provinsi, yaitu di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Kondisi ini perlu mendapat perhatian, dimana perekonomian wilayah yang relatif tinggi belum diimbangi dengan kesetaraan rata-rata lama sekolah antara perempuan dan laki-laki. Sementara itu, provinsi Sulawesi Utara telah mencapai kesetaraan RLS antara perempuan

dan laki-laki, yang ditunjukkan oleh rasio RLS yang mencapai 1,00. Adapun provinsi Gorontalo merupakan satu-satunya provinsi dimana RLS perempuan sedikit lebih tinggi dibanding RLS laki-laki.

Gambar 14. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Ketimpangan Rata-rata Lama Sekolah

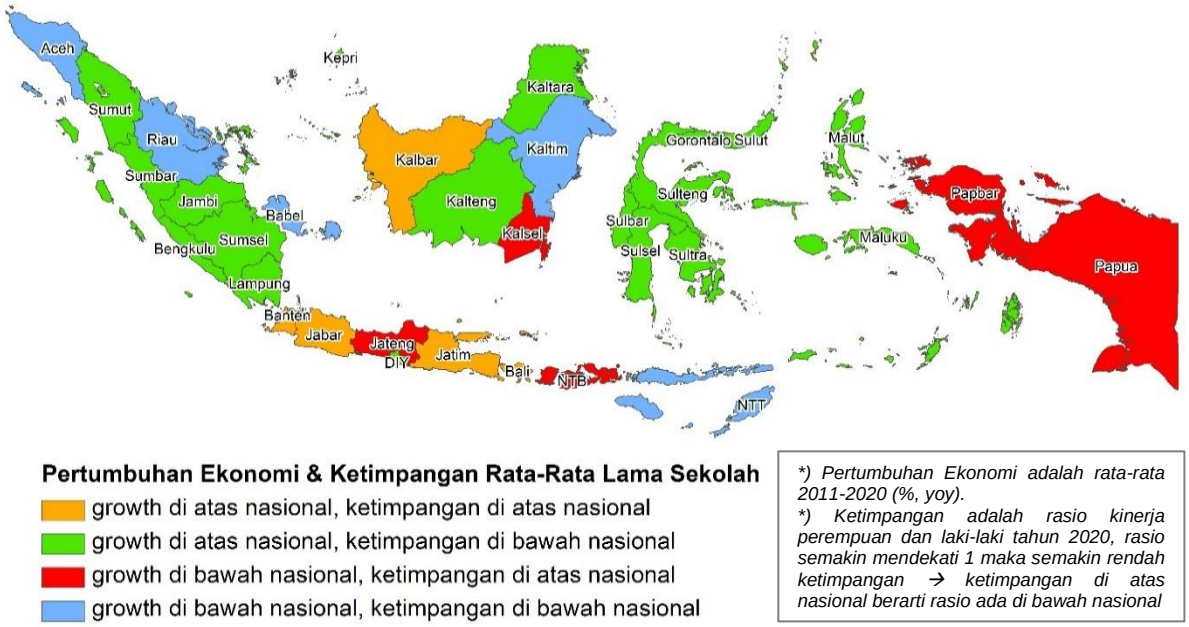

Pertumbuhan Ekonomi & Ketimpangan Rata-Rata Lama Sekolah

- growth di atas nasional, ketimpangan di atas nasional
- growth di atas nasional, ketimpangan di bawah nasional
- growth di bawah nasional, ketimpangan di atas nasional
- growth di bawah nasional, ketimpangan di bawah nasional

**) Pertumbuhan Ekonomi adalah rata-rata 2011-2020 (%, yoy).*
**) Ketimpangan adalah rasio kinerja perempuan dan laki-laki tahun 2020, rasio semakin mendekati 1 maka semakin rendah ketimpangan → ketimpangan di atas nasional berarti rasio ada di bawah nasional*

Sumber: BPS (diolah)

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah, sebanyak 5 (lima) provinsi memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah level nasional, yang sejalan dengan rasio RLS yang juga rendah di bawah angka nasional, atau dengan kata lain, ketimpangan dalam hal rata-rata lama sekolah masih tinggi melebihi ketimpangan level nasional. Kelima provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, NTB, Kalimantan Selatan, Papua Barat, dan Papua. Kondisi tersebut relatif tidak berubah selama 10 tahun terakhir, dimana ketimpangan gender dalam aspek pendidikan masih menjadi tantangan di provinsi-provinsi tersebut, yang sejalan dengan relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi dibanding level nasional. Sementara itu, sebanyak 19 provinsi memiliki kondisi ideal, dimana ketimpangan RLS relatif rendah di bawah ketimpangan RLS nasional, dan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir yang mampu tumbuh di atas rata-rata nasional. Kondisi ini membaik dibandingkan tahun 2011, dimana saat itu hanya 12 provinsi yang memiliki kondisi ideal (ketimpangan RLS rendah diikuti pertumbuhan ekonomi tinggi).

Gambar 15. Kuadran Growth Provinsi dan Ketimpangan Rata-rata Lama Sekolah

		Ketimpangan Rata-Rata Lama Sekolah (2011)				Ketimpangan Rata-Rata Lama Sekolah (2020)	
		Di bawah nasional	Di atas nasional			Di bawah nasional	Di atas nasional
Growth (2011)	Di atas nasional	KUADRAN II Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Kepri, DKI, Kalteng, Kaltim, Sulteng, Sulsel, Gorontalo, Maluku (12)	KUADRAN I Jambi, Sumsel, Babel, Jabar, Jatim, Banten, Bali, Kalsel, Kaltara, Sultra, Sulbar, Malut (12)	Growth (Rata-Rata 2011-2020)	Di atas nasional	KUADRAN II Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kepri, DKI, DIY, Kalteng, Kaltara, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut (19)	KUADRAN I Jabar, Jatim, Banten, Bali, Kalbar (5)
	Di bawah nasional	KUADRAN III Aceh, Riau, NTT, Sulut (4)	KUADRAN IV Jateng, DIY, NTB, Kalbar, Papbar, Papua (6)		Di bawah nasional	KUADRAN III Aceh, Riau, Babel, NTT, Kaltim (5)	KUADRAN IV Jateng, NTB, Kalsel, Papbar, Papua (5)

Sumber: BPS (diolah)

4.1.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) mengukur peluang penduduk di suatu daerah dapat menikmati pendidikan berdasarkan rasio penduduk yang bersekolah di usia yang sama saat itu. Indikator ini dihitung dari penduduk umur 7 tahun ke atas yang menempuh pendidikan formal. Mengetahui HLS penduduk menginformasikan gambaran capaian pembangunan di bidang pendidikan yang dapat dinikmati atau dicapai setiap anak di daerah tertentu. Semakin tinggi peluang sekolah pada anak, maka pembangunan di bidang pendidikan semakin menunjukkan keberhasilannya.

Gambar 16. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Nasional Berdasarkan Jenis Kelamin

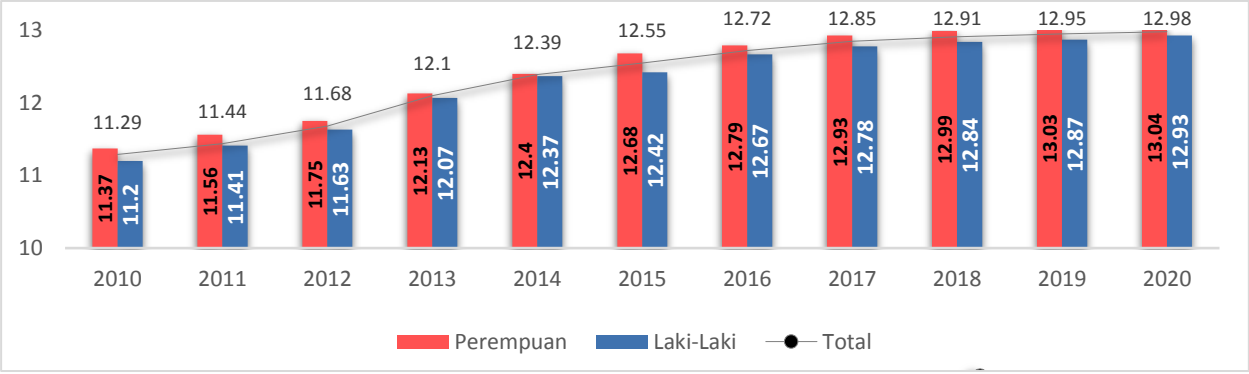

Sumber: BPS (diolah)

Pada periode 2010-2020, angka HLS laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Dalam periode waktu tersebut, HLS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang menunjukkan perempuan justru berpeluang lebih lama bersekolah dibandingkan laki-laki. Perbedaan harapan bersekolah pada laki-laki yang mayoritas sedikit lebih rendah dibanding perempuan dapat dikaitkan dengan berbagai faktor. Di sejumlah daerah, anak laki-laki dituntut membantu orang tua bekerja untuk menutupi kebutuhan keluarga karena konstruksi budaya

memosisikan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Situasi ini dapat berkontribusi pada tingkat partisipasi sekolah laki-laki yang lebih rendah dibanding perempuan.

Pada tahun 2020, secara nasional perempuan berpeluang mengenyam pendidikan selama 13,04 tahun, sedangkan laki-laki selama 12,93 tahun, atau lebih lama 0,11 tahun dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa peluang bersekolah di Indonesia sudah dapat menuntaskan wajib belajar 12 tahun atau sudah menyelesaikan jenjang SMA atau sederajat, baik pada perempuan maupun laki-laki.

Gambar 17. Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020

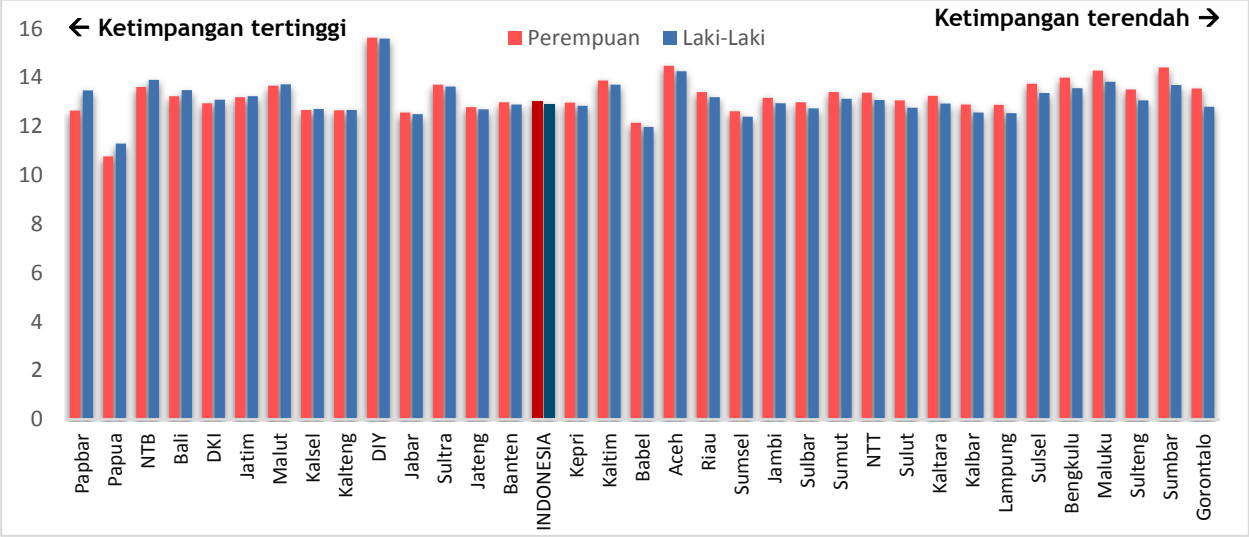

Sumber: BPS (diolah)

Secara kewilayahan, HLS pada laki-laki yang lebih rendah dibandingkan perempuan tidak terjadi di seluruh provinsi. Terdapat sembilan (9) provinsi dengan peluang sekolah yang lebih lama pada laki-laki daripada perempuan, yaitu Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat, Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Sementara pada provinsi-provinsi yang lain, peluang sekolah lebih lama pada perempuan terjadi dengan tingkat perbedaan yang bervariasi.

Provinsi D.I Yogyakarta merupakan provinsi dengan HLS tertinggi di tingkat nasional, baik pada perempuan maupun laki-laki. Penduduk laki-laki dan perempuan di DI Yogyakarta memiliki peluang sekolah hingga mencapai bangku kuliah sekitar semester VII atau mendekati sarjana strata 1. Penduduk laki-laki DI Yogyakarta memiliki peluang sekolah selama 15,59 tahun dan perempuan berpeluang sekolah hingga 15,63 tahun. Provinsi dengan HLS terendah dialami penduduk di Papua dengan peluang sekolah selama 11,3 tahun untuk laki-laki dan HLS 10,77 tahun untuk perempuan. Dengan harapan lama sekolah tersebut, perempuan dan laki-laki di Papua belum berpeluang menyelesaikan pendidikan di jenjang SMA atau sederajat. Provinsi lain yang juga memiliki peluang sekolah tidak lebih dari 12 tahun adalah pada penduduk laki-laki di Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 18. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Harapan Lama Sekolah

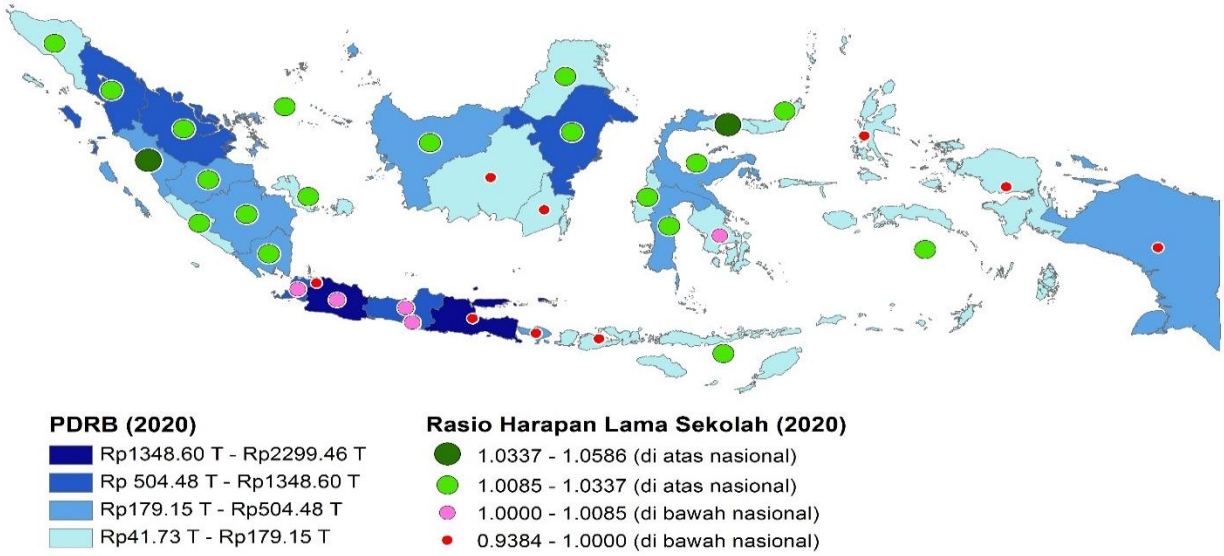

Sumber: BPS, diolah

Secara nasional, rasio Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 1,01. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang sekolah perempuan lebih lama dibandingkan laki-laki, yaitu 13,04 tahun, sementara laki-laki 12,93 tahun. Sementara secara spasial, sebagian besar provinsi di Indonesia telah mencapai kesetaraan peluang sekolah antara perempuan dan laki-laki. Namun demikian, kesenjangan peluang sekolah antara perempuan dan laki-laki masih terdapat di 9 (Sembilan) provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Kondisi ketimpangan tersebut di provinsi-provinsi luar Jawa sejalan dengan kontribusi perekonomiannya yang kurang dari 1,5% PDB. Di sisi lain, kondisi yang perlu mendapat perhatian adalah provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai penyumbang terbesar PDB masih menghadapi kesenjangan peluang sekolah antara perempuan dan laki-laki.

Gambar 19. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Ketimpangan Harapan Lama Sekolah

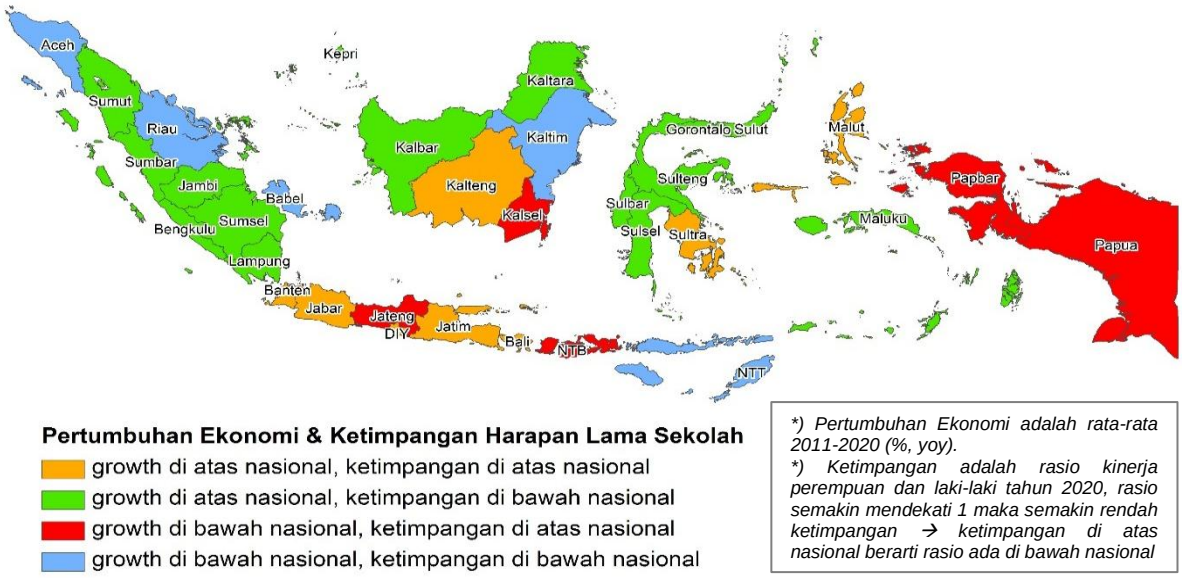

Sumber: BPS (diolah)

Sama halnya dengan ketimpangan dalam hal rata-rata lama sekolah (RLS), provinsi Jawa Tengah, NTB, Kalimantan Selatan, Papua Barat, dan Papua, juga memiliki kondisi ketimpangan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang lebih tinggi daripada ketimpangannya pada level nasional, sejalan dengan relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi tersebut dibanding level nasional. Sementara itu, sebanyak 15 provinsi memiliki kondisi ideal, dimana ketimpangan HLS relatif rendah di bawah ketimpangan HLS nasional, dan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh di atas rata-rata nasional. Kondisi ini membaik dibandingkan tahun 2011, dimana saat itu hanya 13 provinsi yang memiliki kondisi ideal (ketimpangan HLS rendah diikuti pertumbuhan ekonomi tinggi).

Gambar 20. Kuadran Growth Provinsi dan Ketimpangan Harapan Lama Sekolah

		Ketimpangan Harapan Lama Sekolah (2011)	
		Di bawah nasional	Di atas nasional
Growth (2011)	Di atas nasional	KUADRAN II Sumut, Sumbar, Lampung, Babel, Kepri, Banten, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Sulsel, Gorontalo, Maluku, Malut (13)	KUADRAN I Jambi, Sumsel, Bengkulu, DKI, Jabar, Jatim, Bali, Kalteng, Kaltara, Sultra, Sulbar (11)
	Di bawah nasional	KUADRAN III Aceh, Riau, Sulut (3)	KUADRAN IV Jateng, DIY, NTB, NTT, Kalbar, Papbar, Papua 7)

		Ketimpangan Harapan Lama Sekolah (2020)	
		Di bawah nasional	Di atas nasional
Growth (Rata-Rata 2011-2020)	Di atas nasional	KUADRAN II Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kepri, Kalbar, Kaltara, Sulut, Sulteng, Sulsel, Gorontalo, Sulbar, Maluku (15)	KUADRAN I DKI, Jabar, DIY, Jatim, Banten, Bali, Kalteng, Sultra, Malut (9)
	Di bawah nasional	KUADRAN III Aceh, Riau, Babel, NTT, Kaltim (5)	KUADRAN IV Jateng, NTB, Kalsel, Papbar, Papua (5)

Sumber: BPS (diolah)

Upaya menekan kesenjangan peluang sekolah penting dilakukan upaya melalui kebijakan dan program yang terintegrasi dan terfokus. Dengan kebijakan dan program yang terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat, upaya meningkatkan HLS dapat dilakukan dengan menyinergikan pada program dan pemberdayaan yang terdapat di pemerintahan pusat, daerah dan masyarakat. Kebijakan dan program dirancang dengan menfokuskan mengurangi kesenjangan yang terjadi pada jenis kelamin tertentu dan provinsi yang tertinggal, dan akhirnya peluang sekolah dapat dirasakan oleh seluruh warga Indonesia secara adil dan merata.

4.1.3. Angka Partisipasi Murni

Kesetaraan gender di bidang pendidikan level nasional juga dapat dilihat dari rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada tiga jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA atau sederajat. APM menggambarkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. Berdasarkan data BPS, rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SD hingga SMA mencapai

angka di atas 100, artinya kesempatan perempuan untuk mengenyam pendidikan pada jenjang-jenjang tersebut lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini sekaligus juga memberi sinyal positif bahwa perempuan Indonesia mulai berhasil mengejar ketertinggalan pendidikannya, terutama di jenjang pendidikan lebih tinggi dari sekolah dasar.

Gambar 21. Angka Partisipasi Murni Berdasarkan Jenis Kelamin

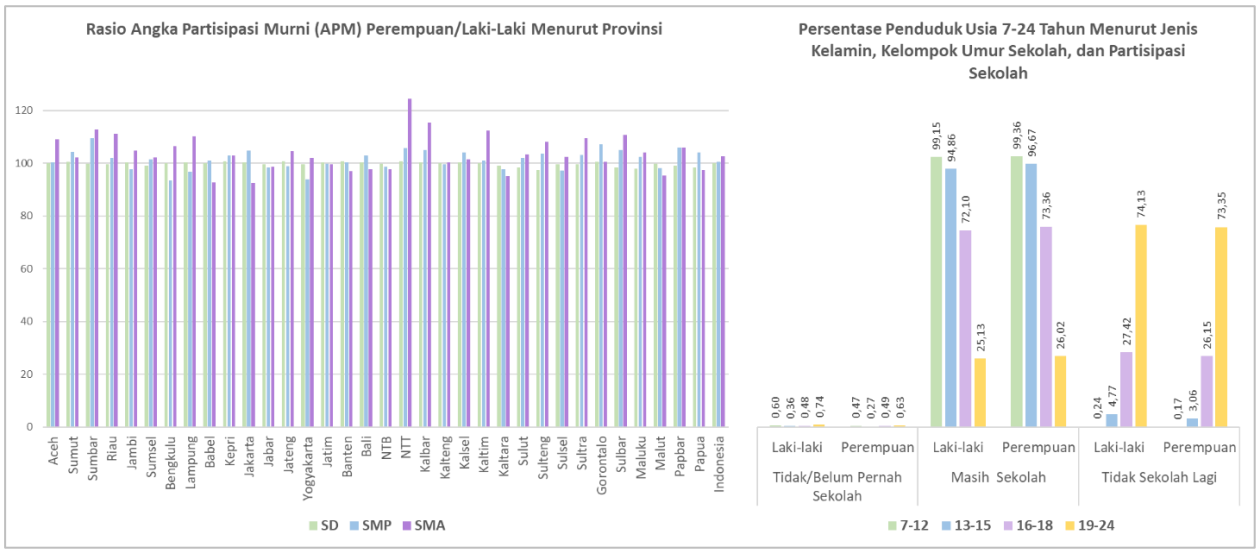

Sumber: BPS (diolah)

Dalam perspektif kelompok umur sekolah, partisipasi sekolah perempuan dan laki-laki juga menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda. Pada rentang usia 7-24 tahun, persentase laki-laki dan perempuan yang tidak/belum pernah sekolah kurang dari 1%. Sementara itu, persentase tertinggi laki-laki dan perempuan yang masih sekolah merupakan kelompok usia 7-12 dan 13-15, dengan kata lain jenjang SD dan SMP. Pada kelompok usia 16-18 dan 19-24 tahun, atau setara dengan SMA dan Perguruan Tinggi, banyak laki-laki maupun perempuan dengan persentase hampir sama yang tidak sekolah lagi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa prioritas untuk menamatkan pendidikan semakin menurun seiring semakin tingginya jenjang pendidikan. Keputusan ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor biaya pendidikan, latar belakang ekonomi keluarga, dan pilihan untuk bekerja/berkeluarga.

4.1.4. Penyebab Umum Ketimpangan Gender Dalam Aspek Pendidikan

Meskipun kesetaraan gender di bidang pendidikan telah mengalami peningkatan di level nasional dalam satu dekade terakhir, namun ketimpangan gender di bidang pendidikan masih persisten terutama jika dilihat secara subnasional. Berbagai tantangan dan perbedaan signifikan terjadi di tingkat daerah, baik yang memihak pada anak laki-laki maupun perempuan. Anak perempuan di Indonesia saat ini masih mengalami berbagai tantangan dalam hal keberlanjutan pendidikan, khususnya di daerah pinggiran. Bagi anak perempuan marjinal, kesempatan mereka untuk dapat berkembang dihambat oleh lebih banyak lagi faktor. Mulai dari penyebab eksternal seperti akses ke pendidikan, ketimpangan stigma sosial, rendahnya tingkat ekonomi keluarga, hingga faktor

internal dari dirinya sendiri seperti rendahnya kepercayaan diri dan ketahanan mental dalam menghadapi tantangan. Berbagai penelitian terdahulu mencoba untuk mengurai permasalahan ketimpangan gender di bidang pendidikan di Indonesia dan faktor-faktor penyebabnya, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Suleeman (1995), ketimpangan gender di bidang pendidikan, khususnya dalam hal partisipasi perempuan di tingkat pendidikan lebih tinggi disebabkan oleh beberapa alasan pokok, yaitu: 1) semakin tinggi tingkat pendidikan formal, semakin terbatas jumlah sekolah yang tersedia, 2) semakin tinggi tingkat pendidikan semakin mahal biaya sekolah, 3) investasi dalam pendidikan juga seringkali tidak dapat dirasakan perempuan karena perempuan menjadi anggota keluarga suami setelah mereka menikah.

b. Van Bemmelen (2003) dalam tulisannya berjudul Konsep Gender dan Isu Gender di Bidang Pendidikan menyatakan bahwa faktor-faktor penentu ketimpangan gender di bidang pendidikan adalah 1) akses perempuan dalam pendidikan, 2) nilai gender yang dianut oleh masyarakat, 3) nilai dan peran gender yang terdapat dalam buku ajar, 4) nilai gender yang ditanamkan oleh guru, dan 5) kebijakan yang bias gender.

c. Astina (2016) melalui tulisannya yang berjudul “Ketimpangan Gender dalam Pendidikan” menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap Pendidikan perempuan bisa terjadi karena beberapa sebab, yaitu: 1) faktor ekonomi, keterbatasan ekonomi keluarga membuat para orangtua lebih memberikan kesempatan kepada anak laki-lakinya untuk pendidikan yang lebih tinggi, 2) faktor fasilitas pendidikan yang kurang memadai, baik dari sisi jumlah lembaganya maupun fasilitasnya, 3) faktor sosial, termasuk bagaimana orangtua mengasuh dan membesarkan anak, dan anggapan bahwa anak perempuan telah cukup menguasai hal-hal pokok dalam pendidikan (tidak perlu pendidikan tinggi), 4) faktor pembagian peran menurut jenis kelamin, seperti yang telah ditentukan oleh orang tua melalui perlakuan yang berbeda sejak kecil di keluarga.

d. Fachrunnisa (2020) dalam conference paper berjudul “*Education of Indonesian Girls: The Outlook of Discrimination, Rights, and the Impact on Society”* menyatakan bahwa kombinasi faktor budaya dan kepercayaan sangat berpengaruh terhadap prinsip orangtua terkait pendidikan anak-anaknya. Istilah “kodrat wanita” dan budaya patriarki yang masih berlaku di seluruh provinsi Indonesia menjadi penghambat bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Dalam penelitiannya, Fachrunnisa juga menyimpulkan bahwa tantangan perempuan menempuh pendidikan lebih tinggi (SMA & universitas) adalah adanya praktik pernikahan usia dini dan norma sosial laki-laki sebagai tulang punggung.

e. Bappenas (2021) menjelaskan bahwa sistem pendidikan yang dikatakan bersifat universal kerap kali lupa untuk memberikan fokus perhatian pada aspek gender. Hal ini menimbulkan *unconscious* bias gender yang bisa terjadi di setiap jenjang pendidikan (PAUD-dasar-menengah-tinggi) dan karir perempuan, antara lain dalam hal:

- kurikulum, materi, dan bahan ajar yang seringkali mengandung konten dengan ilustrasi, gambar, dan bahasa bias gender serta mencerminkan stereotipe gender (laki-laki berperan di publik dan perempuan berperan di domestik);
- interaksi dalam kelas dan proses belajar mengajar, seperti nilai-nilai bias gender yang secara tidak sengaja ditanamkan oleh guru kepada murid melalui penggunaan bahasa dan contoh-contoh dalam proses belajar mengajar;
- pengetahuan dan kapasitas guru/tenaga pendidik, yang belum memiliki kepekaan gender bahwa konstruksi sosial terhadap perempuan dan laki-laki telah menimbulkan ketidaksetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari proses dan hasil belajar;
- sarana prasarana dan lingkungan sekolah yang belum responsif gender, misalnya toilet yang tidak dipisahkan antara anak laki-laki dan perempuan atau praktik organisasi/ kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kerap melanggengkan gender stereotipe (misalnya laki-laki sebagai ketua kelas dan perempuan sebagai sekretaris atau bendahara).

Berdasarkan berbagai penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan gender di bidang pendidikan di Indonesia masih banyak dirasakan oleh perempuan, terutama karena faktor sosial budaya, kemampuan ekonomi, faktor fasilitas pendidikan, hingga sistem pendidikan bias gender. Bias gender yang terjadi sejak awal pendidikan anak menimbulkan permasalahan dan tantangan baru di ekonomi dan ketenagakerjaan. Bappenas (2021) menyatakan bahwa stereotipe gender pada jenis/bidang pekerjaan tertentu membatasi partisipasi perempuan di bidang STEM (*science, technology, engineering, mathematics*). Selain itu, meskipun tingkat penyelesaian pendidikan perempuan di tingkat SD, SMP, SMA, serta akses ke Pendidikan Tinggi sudah baik, namun jika dibandingkan dengan laki-laki, TPAK perempuan dan posisi perempuan di pekerjaan (posisi manajerial) jauh lebih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dari sisi upah, perempuan cenderung dibayar 20-30% lebih rendah meski memiliki kapasitas yang sama.

Perkawinan anak merupakan isu yang mengemuka sebagai salah satu penyebab ketimpangan gender di bidang pendidikan. Tidak hanya berdampak pada aspek pendidikan, perkawinan anak merupakan permasalahan multidimensi yang memberikan dampak pula terhadap aspek kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi. Aspek-aspek tersebut merupakan komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), sehingga tingginya perkawinan anak akan berpengaruh terhadap rendahnya IPM dan IPG. Dari aspek pendidikan, sebagian besar perkawinan anak menyebabkan anak putus sekolah. Dari sisi kesehatan, perkawinan anak meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Dari aspek ketenagakerjaan dan ekonomi, anak yang menikah pada usia dini sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan upah yang rendah, lalu pada akhirnya memunculkan masalah kemiskinan dan pekerja anak. Selain itu, perkawinan anak juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% PDB, dibandingkan jika anak perempuan menunda pernikahannya sampai berusia 20 tahun selama periode 2014-2050 (UNICEF, 2020).

Berdasarkan UNICEF Indonesia (2020), Indonesia termasuk ke dalam 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah pada usia <18 tahun, dan 0,5% anak perempuan menikah sebelum berusia 15 tahun. Perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan 3,5 persen dalam kurun sepuluh tahun terakhir, namun penurunan ini masih tergolong lambat dan diperlukan upaya yang sistemik dan terpadu untuk mencapai target sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan menjadi 6,94 persen pada tahun 2030 (UNICEF Indonesia, 2020).

4.2. Situasi dan Distribusi Ketimpangan Gender di Bidang Kesehatan

Aspek kesehatan menjadi faktor dominan yang berkontribusi terhadap rendahnya indeks kesetaraan gender di Indonesia. Kesenjangan gender dalam aspek kesehatan dapat dilihat dari bagaimana akses, partisipasi, kontrol, maupun manfaat pembangunan kesehatan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan masih belum merata. Secara lebih teknis, ketimpangan gender di bidang kesehatan dapat ditunjukkan oleh berbagai indikator antara lain umur harapan hidup, keluhan kesehatan, serta angka kematian ibu dan stunting.

4.2.1. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) menunjukkan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, yang dapat mencerminkan bagaimana kondisi kesehatan masyarakat secara umum di sebuah negara. Peningkatan UHH dapat diterjemahkan sebagai membaiknya faktor-faktor yang berperan dalam kesehatan masyarakat, antara lain standar hidup, gaya hidup, pendidikan, serta membaiknya akses kepada pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Gambar 22. Perkembangan Umur Harapan Hidup Nasional Berdasarkan Jenis Kelamin

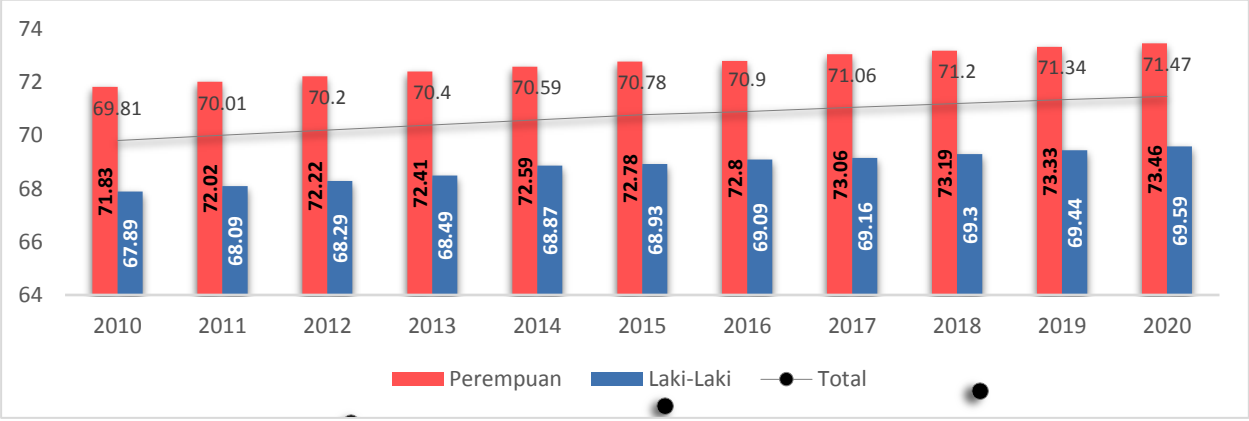

Sumber: BPS (diolah)

Di Indonesia, UHH baik pada perempuan maupun laki-laki, tercatat berada dalam tren peningkatan dalam satu dekade terakhir. Artinya, derajat kesehatan masyarakat secara umum juga terus meningkat yang didukung oleh kemajuan dalam pelayanan kesehatan dan perbaikan standar kehidupan. Salah satu aspek penting yang menyumbang peningkatan terhadap akses

pelayanan kesehatan adalah adanya Jaminan Kesehatan Nasional yang telah mencakup sekitar 75% penduduk. Jaminan Kesehatan Nasional ini merupakan investasi yang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum.

Sebagaimana pola yang terjadi di global, UHH di Indonesia juga lebih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Perbedaan UHH pada perempuan dan laki-laki dapat dijelaskan secara biologis maupun non-biologis seperti dari sisi perilaku sosial. Dari sisi biologis, perempuan dinilai memiliki *biological advantage* yang mampu membuat perempuan dapat hidup lebih lama. Sementara dipandang dari faktor perilaku sosial, perempuan dinilai lebih sedikit terlibat dalam perilaku yang berisiko bagi kesehatan dibanding laki-laki (seperti yang berhubungan dengan merokok, alkohol, dan narkotika).

Gambar 23. Statistik Risiko Kesehatan Berdasarkan Gender

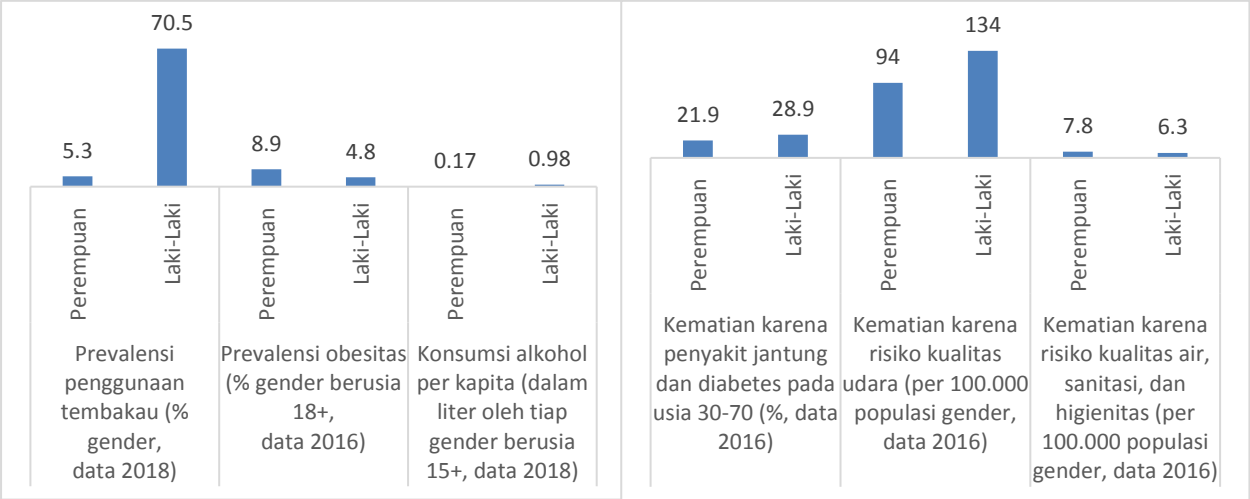

Sumber: Bank Dunia (2016 dan 2018)

Pada grafik di atas, dapat ditunjukkan bahwa laki-laki cenderung terlibat lebih tinggi dalam perilaku yang berisiko kesehatan seperti penggunaan tembakau, konsumsi alkohol, serta memiliki persentase yang lebih tinggi atas kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup (jantung dan diabetes). Laki-laki juga memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi karena kualitas udara, yang disebabkan oleh karakteristik pekerjaannya yang lebih banyak di luar. Sementara itu, perempuan memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi jika dilihat dari prevalensi obesitas serta kualitas air, sanitasi, dan higienitas.

Gambar 24. Umur Harapan Hidup Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020

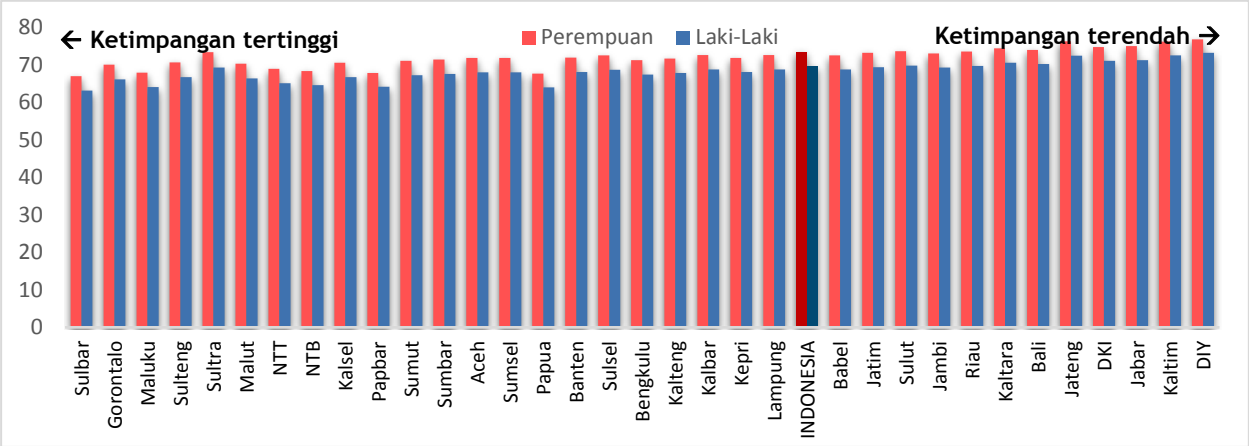

Sumber: BPS (diolah)

Umur Harapan Hidup (UHH) merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Secara nasional, rasio Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 1,06. Angka rasio >1 ini menunjukkan bahwa Umur Harapan Hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, dimana UHH perempuan 73,46 tahun, dan laki-laki 69,59 tahun. Apabila dilihat secara spasial, semua provinsi memiliki rasio UHH >1, dimana ketimpangan tertinggi antara perempuan dan laki-laki dalam hal Umur Harapan Hidup terdapat di provinsi Sulawesi Barat, yaitu terpaut 3,82 tahun. Sementara ketimpangan terkecil terdapat di provinsi D.I Yogyakarta, yaitu terpaut 3,61 tahun. Wilayah Jawa memiliki rasio UHH yang semakin mendekati 1, dimana peluang harapan hidup perempuan dan laki-laki hampir setara. Sementara di Luar Jawa, ketimpangan dari sisi kesehatan antara perempuan dan laki-laki semakin lebar. Di provinsi Sulawesi Barat misalnya, bayi perempuan yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk hidup hingga 67,02 tahun, sementara untuk bayi laki-laki hanya 63,2 tahun. Kondisi yang jauh lebih baik dijumpai di provinsi D.I Yogyakarta, dimana bayi perempuan yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk hidup hingga 76,83 tahun, sementara untuk bayi laki-laki hingga 73,22 tahun.

Gambar 25. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Umur Harapan Hidup

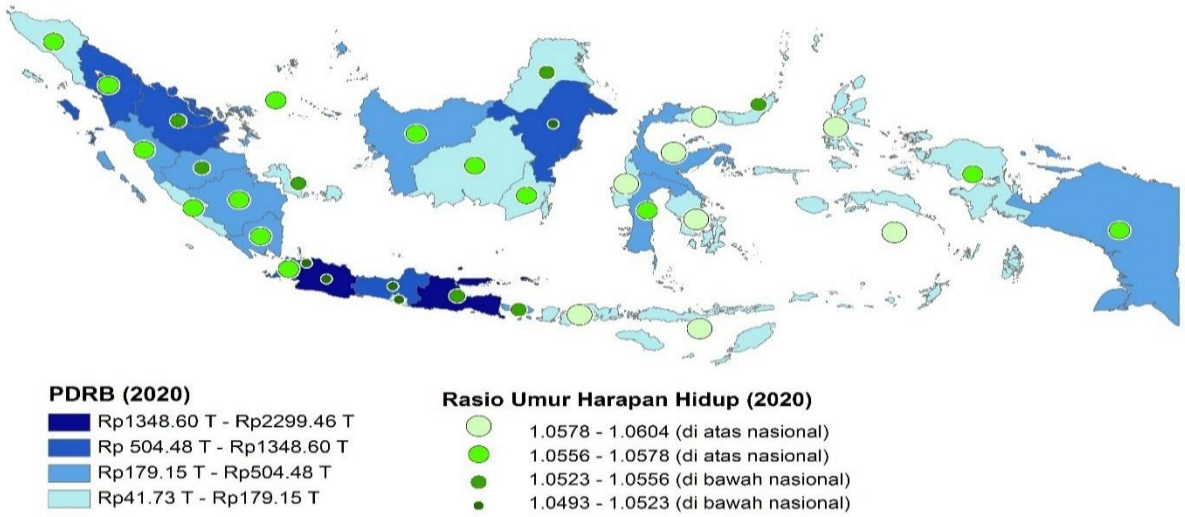

Sumber: BPS (diolah)

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah, sebanyak 6 (enam) provinsi memiliki rasio umur harapan hidup di atas nasional, atau dengan kata lain, ketimpangan dalam hal umur harapan hidup melebihi level nasional. Keenam provinsi tersebut adalah Aceh, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Papua Barat, dan Papua. Besarnya selisih (*gap*) umur harapan hidup antara perempuan dan laki-laki pada keenam provinsi tersebut diikuti dengan kinerja perekonomiannya yang berada di bawah level nasional. Umur harapan hidup perempuan yang jauh lebih tinggi daripada laki-laki pada provinsi-provinsi tersebut relatif tidak berubah selama 10 tahun terakhir. Sementara itu, sebanyak 8 provinsi memiliki kondisi ideal, dimana ketimpangan umur harapan hidup berada di bawah ketimpangan nasional, dan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi selama rata-rata 10 tahun terakhir mampu tumbuh di atas level nasional.

Gambar 26. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Ketimpangan Umur Harapan Hidup

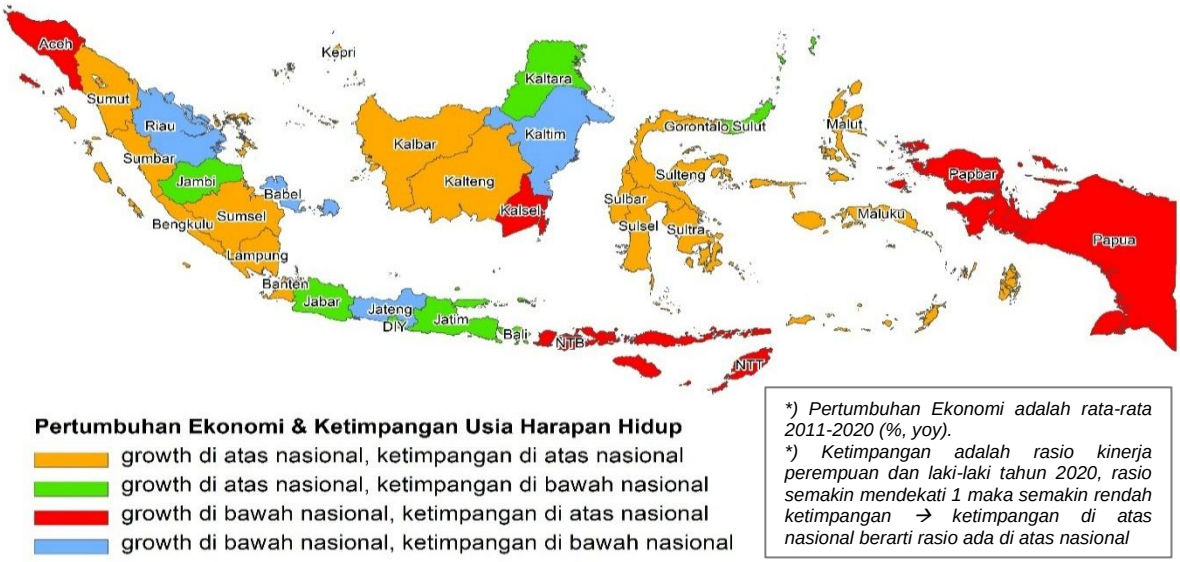

Sumber: BPS (diolah)

Gambar 27. Kuadran Growth Provinsi dan Ketimpangan Umur Harapan Hidup

		Ketimpangan Umur Harapan Hidup (2011)				Ketimpangan Umur Harapan Hidup (2020)	
		Di bawah nasional	Di atas nasional			Di bawah nasional	Di atas nasional
Growth (2011)	Di atas nasional	KUADRAN II Jambi, Lampung, Babel, Kepri, DKI, Jabar, Jatim, Bali, Kalteng, Kaltim, Kaltara (11)	KUADRAN I Sumut, Sumbar, Sumsel, Bengkulu, Banten, Kalsel, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut. (13)	Growth (Rata-Rata 2011-2020)	Di atas nasional	KUADRAN II Jambi, DKI, Jabar, DIY, Jatim, Bali, Kaltara, Sulut (8)	KUADRAN I Sumut, Sumbar, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kepri, Banten, Kalbar, Kalteng, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut. (16)
	Di bawah nasional	KUADRAN III Riau, Jateng, DIY, Sulut (4)	KUADRAN IV Aceh, NTB, NTT, Kalbar, Papbar, Papua (6)		Di bawah nasional	KUADRAN III Riau, Babel, Jateng, Kaltim (4)	KUADRAN IV Aceh, NTB, NTT, Kalsel, Papbar, Papua (6)

Sumber: BPS (diolah)

Upaya untuk mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesehatan baik pada laki-laki maupun perempuan harus dilanjutkan ke depan. Apalagi, meski dengan umur harapan hidup yang relatif lebih tinggi, perempuan justru memiliki keluhan kesehatan yang justru juga lebih tinggi sebagaimana yang akan dijelaskan pada bahasan selanjutnya.

4.2.2. Keluhan Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat berpengaruh terhadap kualitas kehidupannya. Salah satu indikator dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah dengan mengevaluasi tingkat keluhan kesehatan yang dilaporkan, baik pada perempuan maupun laki-laki. Badan Pusat Statistik mendefinisikan keluhan kesehatan sebagai gangguan terhadap kondisi fisik (sesak nafas, panas, diare, sakit kepala, penyakit kronis dan akut, gangguan kesehatan karena kecelakaan) maupun jiwa (depresi, gelisah, ketakutan, trauma, skizofrenia), termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.

Gambar 28. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin

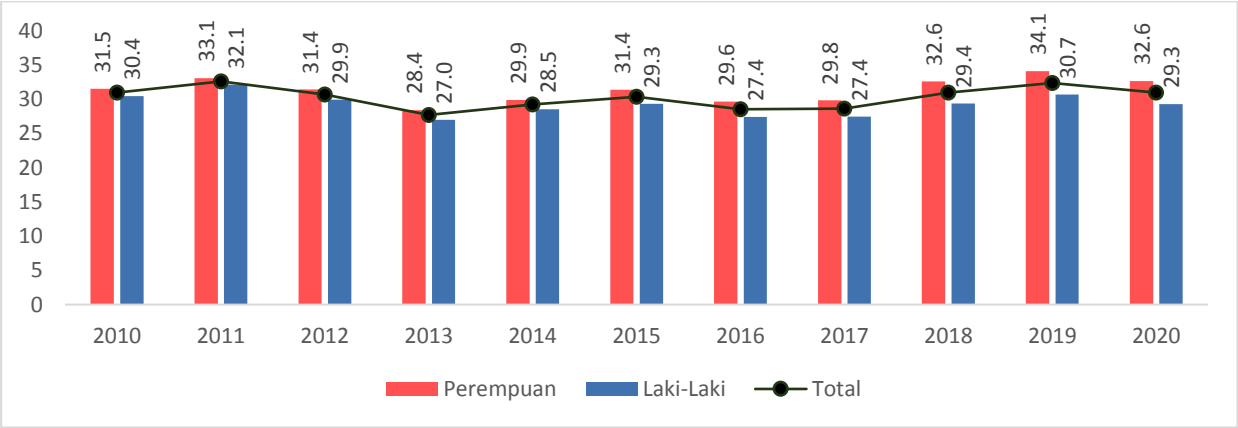

Sumber: BPS (diolah)

Data keluhan kesehatan bermanfaat dalam mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum, sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembangkan upaya pembangunan di bidang kesehatan yang dapat diakses semua lapisan masyarakat, serta untuk lebih memastikan kesehatan masyarakat terpenuhi secara ideal demi tercapainya derajat kesehatan laki-laki dan perempuan yang lebih baik. Dalam beberapa studi sebelumnya, data keluhan kesehatan juga dipakai sebagai indikator untuk melihat kesenjangan gender di bidang kesehatan (Fajriyyah dan Budiantara, 2015; Lukiswati, Djuraidah, dan Syafitri, 2019; serta KPPPA, 2020).

Gambar 29. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan yang Mengganggu Aktivitas dan yang Melakukan Rawat Jalan Selama Sebulan Terakhir

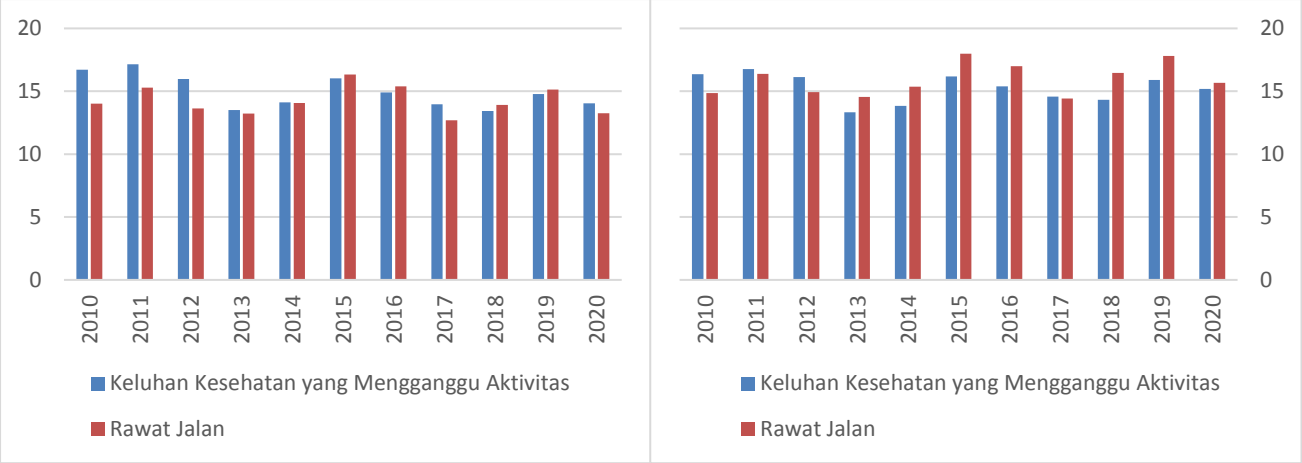

(a) Laki-laki (b) Perempuan

Sumber: BPS (diolah)

Secara nasional dapat dilihat bahwa belum terjadi penurunan signifikan pada persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Sejak tahun 2010, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan berada di kisaran 30% dan tidak pernah kurang dari 25%. Bila dihubungkan dengan indikator umur harapan hidup yang dibahas sebelumnya, dapat dilihat juga bahwa meski perempuan memiliki umur harapan hidup yang lebih tinggi, keluhan kesehatannya juga tercatat lebih tinggi. Hal ini disikapi perempuan dengan melakukan rawat jalan jika keluhan kesehatan yang dialami sudah mulai mengganggu aktivitas. Sebagaimana ditampilkan pada grafik di atas, bahwa meskipun keluhan kesehatan cenderung lebih tinggi pada perempuan, tetapi persentase yang melakukan rawat jalan selama sebulan terakhir juga relatif lebih tinggi pada perempuan. Hal ini mengindikasikan kesadaran dan kepedulian pada kesehatan yang lebih baik pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Gambar 30. Persentase Keluhan Kesehatan Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020

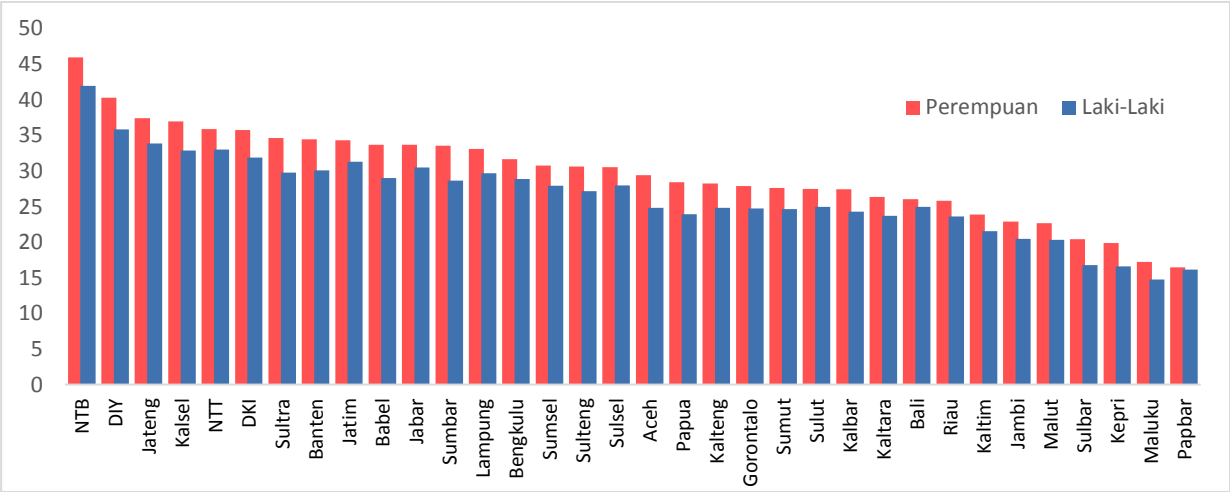

Sumber: BPS (diolah)

Gambar 31. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Keluhan Kesehatan

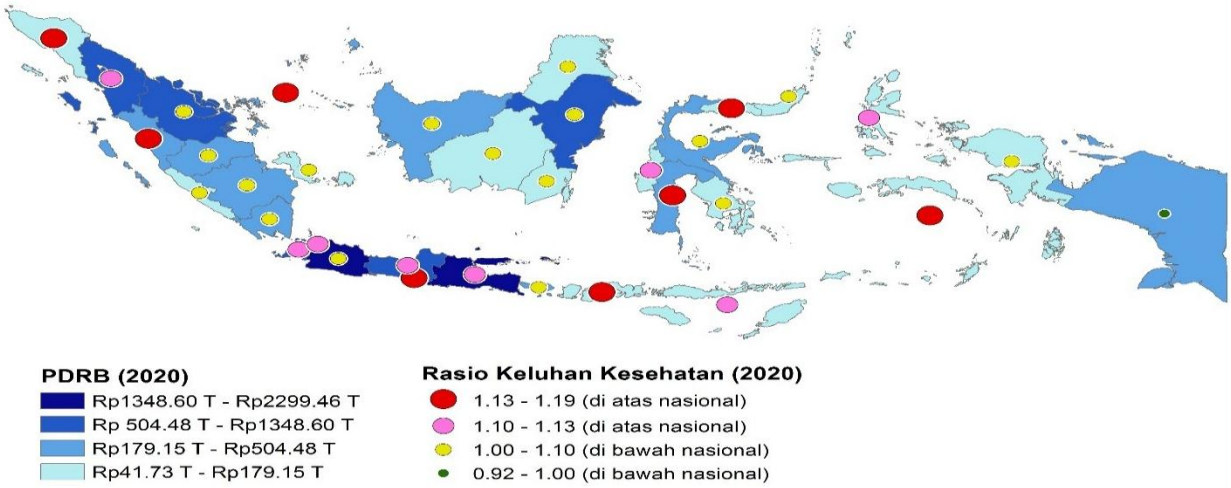

Sumber: BPS (diolah)

Rasio Keluhan Kesehatan (RKK) secara nasional pada tahun 2020 sebesar 1,10, dimana rasio >1 ini menunjukkan bahwa keluhan kesehatan perempuan lebih lebih tinggi daripada laki-laki, yaitu sebanyak 43 juta perempuan, dibanding 39 juta laki-laki. Apabila dilihat secara spasial, semua provinsi di Indonesia memiliki rasio keluhan kesehatan >1, kecuali provinsi Papua dimana yang lebih banyak mengalami keluhan kesehatan adalah laki-laki. Ketimpangan tertinggi keluhan kesehatan antara perempuan dan laki-laki terdapat di provinsi Maluku (rasio 1,19), sementara ketimpangan terkecil terdapat di Papua (rasio 0,92). Wilayah Jawa yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan kontributor terbesar PDB, memiliki rasio keluhan kesehatan di atas angka nasional pada semua provinsinya. Keluhan kesehatan ringan hingga penyakit kronis paling banyak dirasakan oleh perempuan di wilayah Jawa, dimana perempuan di Jawa Barat adalah yang terbanyak merasakan keluhan kesehatan. Secara umum, keluhan kesehatan dengan posisi perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki terjadi di perkotaan. Lebih tingginya laporan keluhan kesehatan di wilayah perkotaan dapat mengindikasikan adanya kesenjangan pada pengetahuan dan layanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat perkotaan dan perdesaan.

Gambar 32. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Ketimpangan Keluhan Kesehatan

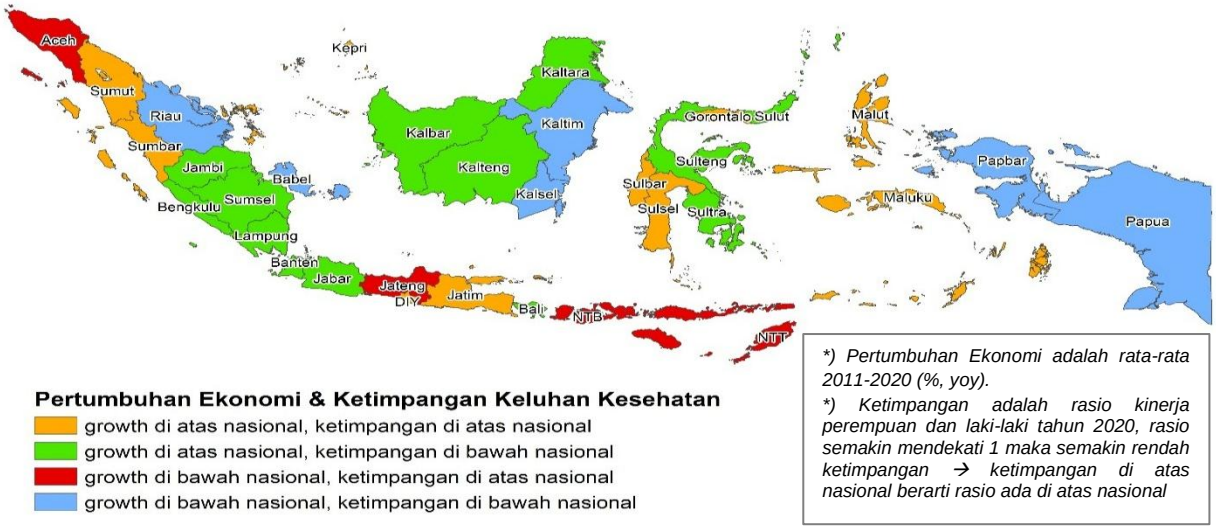

Sumber: BPS (diolah)

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah, sebanyak 4 (empat) provinsi memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah nasional dan rasio keluhan kesehatan di atas nasional (ketimpangan rasio keluhan kesehatan antara perempuan dan laki-laki melebihi angka nasional). Keluhan kesehatan pada perempuan paling banyak dirasakan di provinsi Aceh, Jawa Tengah, NTB, NTT, dan di saat yang sama provinsi-provinsi tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah nasional. Kondisi ini relatif tidak berubah selama 10 tahun terakhir. Sebanyak 13 provinsi memiliki ketimpangan keluhan kesehatan di bawah nasional, dan diikuti pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir yang mampu tumbuh di atas rata-rata nasional.

Gambar 33. Kuadran Growth Provinsi dan Ketimpangan Keluhan Kesehatan

		Ketimpangan Keluhan Kesehatan (2011)				Ketimpangan Keluhan Kesehatan (2020)	
		Di bawah nasional	Di atas nasional			Di bawah nasional	Di atas nasional
Growth (2011)	Di atas nasional	KUADRAN II Sumut, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel, DKI, Banten, Bali, Kalteng, Kaltim, Sulteng, Gorontalo (12)	KUADRAN I Sumbar, Lampung, Kepri, Jabar, Jatim, Kalsel, Kaltara, Sulsel, Sultra, Sulbar, Maluku, Malut. (12)	Growth (Rata-Rata 2011-2020)	Di atas nasional	KUADRAN II Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jabar, Banten, Bali, Kalbar, Kalteng, Kaltara, Sulut, Sulteng, Sultra (13)	KUADRAN I Sumut, Sumbar, Kepri, DKI, DIY, Jatim, Sulsel, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut. (11)
	Di bawah nasional	KUADRAN III Riau, DIY, Sulut, Papua (4)	KUADRAN IV Aceh, Jateng, NTB, NTT, Kalbar, Papbar (6)		Di bawah nasional	KUADRAN III Riau, Babel, Kalsel, Kaltim, Papbar, Papua (6)	KUADRAN IV Aceh, Jateng, NTB, NTT (4)

Sumber: BPS (diolah)

Setelah membedah lebih dalam keluhan kesehatan, penting juga membahas mengenai dimensi hamil dan melahirkan pada perempuan, karena kedua peranan tersebut sangat krusial tak hanya bagi perempuan, tetapi bagi anak yang dilahirkan. Hal ini akan dielaborasi pada bahasan selanjutnya.

4.2.3. Angka Kematian Ibu dan Stunting

Tantangan di bidang kesehatan yang dihadapi perempuan lebih kompleks berkaitan dengan perannya yang sangat signifkan terutama pada periode kehamilan dan kelahiran. Oleh karena itu, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan kesehatan yang dimiliki perempuan tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga akan berpengaruh kepada anak yang dikandung dan dilahirkannya. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017, faktor pendidikan perempuan bahkan akan berperan terhadap tingkat kematian anak. Angka kematian balita pada ibu yang tidak bersekolah lebih tinggi dibandingkan pada ibu yang lulus perguruan tinggi.

Gambar 34. Kematian Balita Menurut Pendidikan Ibu

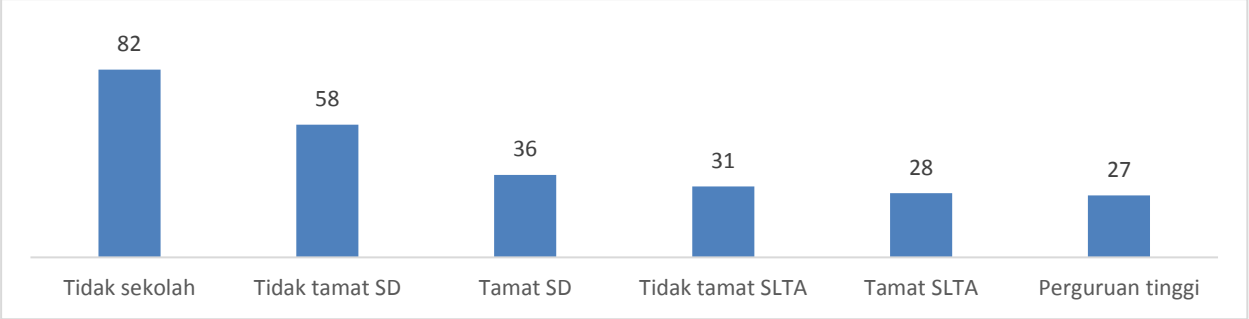

Sumber: SDKI, 2017

Indikator kesehatan lainnya yang juga mengisyaratkan perlunya peningkatan keadilan berbasis gender atas akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat atas pembangunan kesehatan, terutama bagi perempuan adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu (AKI) didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh pengelolaan kesehatan dalam masa tersebut dengan mengecualikan sebab insidental seperti kecelakaan. Indikator AKI tidak hanya dapat digunakan untuk menilai program kesehatan ibu, tetapi juga mampu menilai kesehatan masyarakat secara umum karena indikator tersebut memiliki sensitifitas yang baik terhadap perbaikan sistem kesehatan seperti aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan.

Gambar 35. Angka Kematian Ibu di Indonesia per 100.000 Kelahiran Hidup

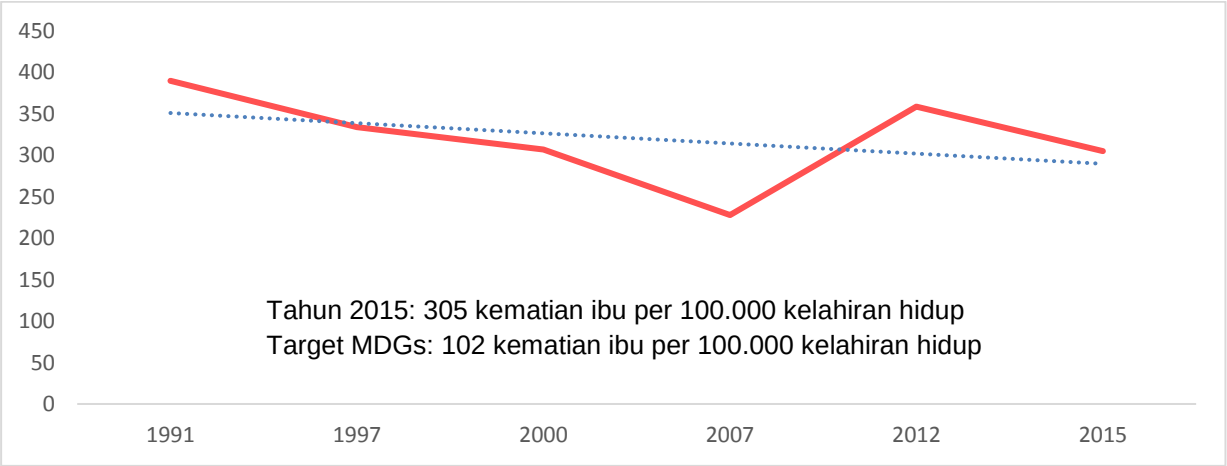

Sumber: Kementerian Kesehatan

Secara historis, AKI di Indonesia memang sudah berada dalam tren menurun. Namun demikian, angka terakhir AKI di 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2015 masih jauh dari target MDGs sebesar 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Untuk tahun 2020, jumlah kematian ibu yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan angka kematian ibu sebanyak 4.627 kematian, meningkat dibandingkan tahun 2019 sebanyak 4.221 kematian. Sementara itu, sisi pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan melahirkan angkanya memang terus membaik. Dapat dilihat pada grafik berikut bahwa persentase ibu hamil yang menerima layanan kehamilan serta kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terus meningkat.

Gambar 36. Pelayanan Kesehatan terhadap Ibu pada Periode Hamil dan Melahirkan

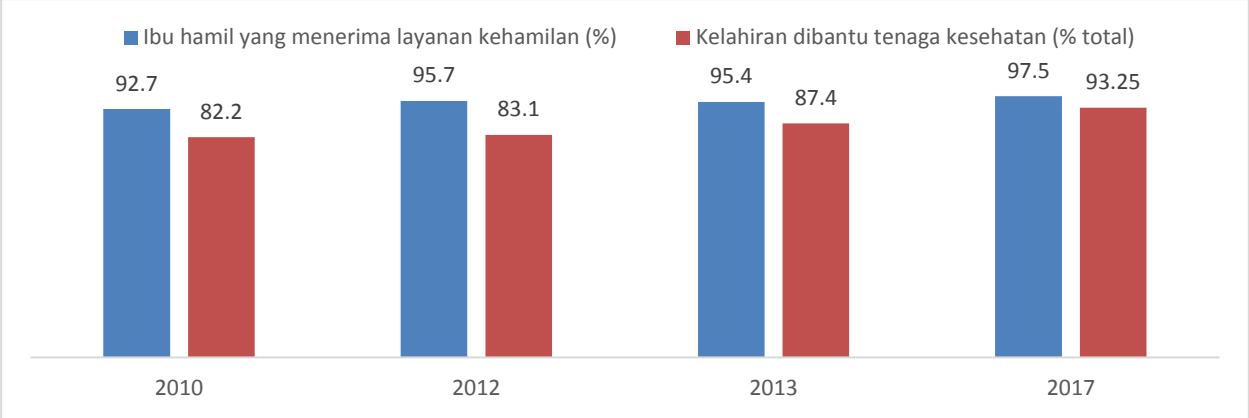

Sumber: Kementerian Kesehatan

Menjaga kesehatan dan nutrisi ibu pada periode kehamilan dan kelahiran ini penting karena termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Kondisi ibu dapat menjadi salah satu faktor apakah anak yang dilahirkan *stunting* atau tidak. *Stunting* adalah kondisi di mana tinggi badan balita berada di bawah rata-rata dibandingkan anak seusianya. Hal tersebut mengindikasikan masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung cukup lama. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah gizi kronis tersebut dapat berasal dari rumah tangga dan keluarga seperti faktor maternal (nutrisi buruk selama konsepsi, usia kehamilan pendek, kehamilan remaja) atau lingkungan rumah (sanitasi, orang tua merokok, atau kurangnya stimulasi untuk anak); berasal dari makanan yang masuk ke anak tersebut; kebutuhan ASI yang tidak tercukupi; dan infeksi (diare, malaria, infeksi pernafasan, demam, tidak vaksin) (Beal et al., 2018). Indikator *stunting* menjadi sangat krusial karena dapat diasosiasikan dengan kurangnya kemampuan kognitif yang nantinya akan menghambat daya tangkap di sekolah maupun performa di dunia kerja (UNICEF, 2019).

Gambar 37. Persentase Stunting pada Balita di Indonesia

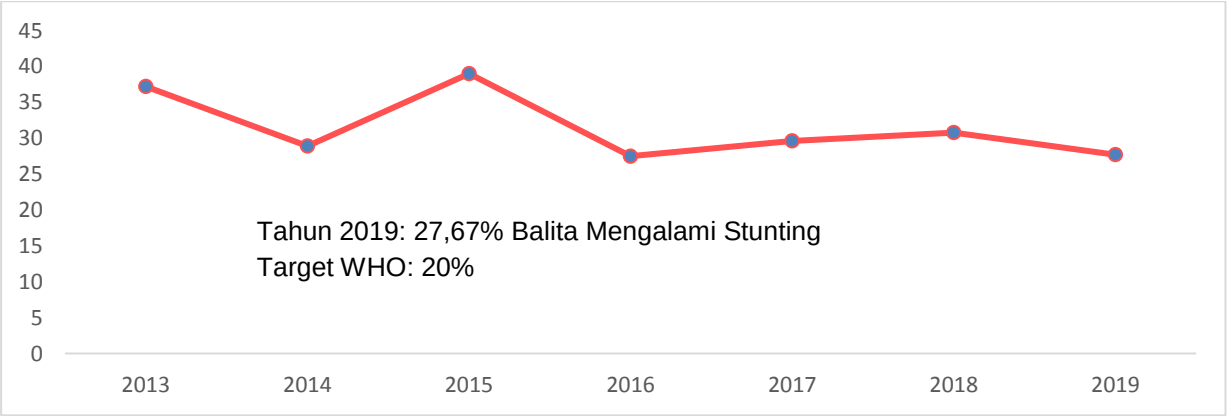

Sumber: Kementerian Kesehatan

Di Indonesia, angka *stunting* masih tercatat tinggi di angka 27,7 pada tahun 2019, atau berada di atas prevalensi *stunting* global yang berada pada angka 21,9%. Butuh strategi yang kuat untuk menurunkan angka *stunting* sesuai ambang batas WHO di angka 20%, atau target pemerintah

yakni 14% pada tahun 2024. Jika dipetakan berdasarkan provinsinya, terdapat 16 provinsi yang memiliki angka stunting di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, terdapat 4 provinsi yang telah memenuhi standar WHO di bawah 20%, yakni provinsi DKI Jakarta, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bali, dimana Bali menjadi satu-satunya provinsi yang mendekati target Pemerintah 2024 di angka 14,42%.

Gambar 38. Angka Stunting pada Balita Menurut Provinsi Tahun 2019

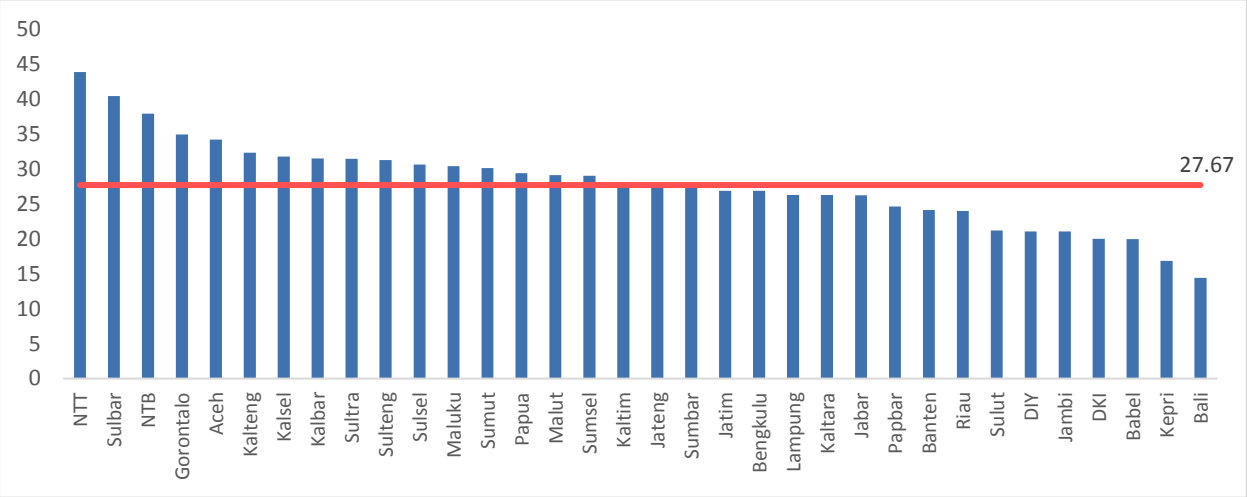

Sumber: Kementerian Kesehatan

Masih tingginya angka kematian ibu dan angka stunting memberikan gambaran bahwa meski memiliki umur harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, akses kesehatan yang berkeadilan harus terus digalakkan. Hal tersebut karena tingginya angka kematian ibu dan *stunting* bukan hanya indikator yang selesai di tahun tersebut, tetapi terus dibawa ke seumur kehidupan anak dan secara makro dapat berpotensi mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depannya.

4.2.4. Penyebab Umum Ketimpangan Gender Dalam Aspek Kesehatan

Meski akses kesehatan yang berkeadilan terus mengalami perbaikan, tetapi masih ada beberapa catatan terkait ketimpangan gender di bidang kesehatan, salah satunya adalah tidak tercapainya target MDGs 2015 terkait angka kematian ibu dan masih tingginya prevalensi stunting nasional dibandingkan standar WHO maupun target nasional 2024. Beberapa studi menyampaikan bahwa berbagai tantangan masih terjadi, salah satunya berkaitan dengan norma gender di daerah yang secara umum masih menghambat pelayanan kesehatan yang berkeadilan bagi perempuan. Ada pun secara lebih rinci, beberapa faktor penyebab ketimpangan gender di bidang kesehatan di Indonesia sebagaimana yang dibahas di beberapa penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut ADB (2006), ketimpangan gender di bidang kesehatan banyak disumbang oleh pelayanan kesehatan yang memang belum inklusif seperti pelayanan kesehatan yang belum

menggapai perempuan di daerah dan *framework* kelembagaan tentang pengarusutamaan gender yang masih perlu diperkuat. Selain itu, dari sisi norma gender, perlu diperhatikan partisipasi perempuan dalam *decision making* apalagi terkait keputusan yang berisiko kesehatan seperti perkawinan anak, karena kehamilan remaja memiliki kontribusi pada tingginya kematian ibu. Selain itu, persoalan kekerasan terhadap perempuan memiliki banyak bentuk dan pelayanan untuk korban juga masih minim. Pada laporan World Bank (2020), World Bank juga masih menyebutkan faktor-faktor tersebut dengan menambahkan beberapa faktor lain yang menjadi penyebab ketimpangan gender di bidang kesehatan seperti ketiadaan dokumen legal yang sangat mempengaruhi perempuan. Terdapat studi yang menemukan bahwa ketiadaan akta kelahiran berhubungan erat dengan adanya perkawinan anak. Ketiadaan akta kelahiran akan menghambat anak untuk mengakses pelayanan kesehatan. Selain itu, adanya pernikahan dan perceraian informal yang tidak memiliki dokumen pembuktian juga dapat menghambat perempuan. Misalnya, ketiadaan akta perceraian akan berakibat pada tidak dapat teridentifikasinya seorang perempuan secara legal sebagai kepala keluarga, yang nantinya akan berakibat akses kepada program-program bantuan sosial pemerintah.

b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2011) pada Kertas Kebijakan Kesetaraan Gender menyebutkan beberapa faktor penyebab ketimpangan gender dalam aspek kesehatan antara lain: tingginya kematian ibu yang disebabkan oleh ketimpangan *skilled birth attendance* antarkelompok ekonomi, kualitas rujukan kasus obstetri, serta komplikasi yang disebabkan karena aborsi. Selain itu, masih tingginya angka *stunting* juga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kasus anemia pada perempuan terutama selama kehamilan dan pemberian nutrisi kepada balita yang tidak cukup. Selain itu, KPPPA juga mengidentifikasi faktor lainnya yang menyebabkan adanya ketimpangan gender yakni adanya risiko HIV dan kondisi sanitasi yang berdampak relatif lebih serius pada perempuan.

c. Marzuki (2015) dalam presentasinya yang berjudul Perspektif Gender dalam Pelayanan Kesehatan menggarisbawahi faktor lain yang menyebabkan masih terjadinya ketimpangan gender di bidang kesehatan. Salah satunya adalah terkait budaya atau norma gender di dalam keluarga, antara lain adanya budaya yang masih membedakan pemberian makanan di keluarga yang membuat perempuan/istri kurang mendapatkan asupan gizi, kurangnya pengetahuan tentang perencanaan kehamilan dan menganggap kehamilan dianggap peristiwa biasa, kurangnya informasi dan pelayanan kesehatan yang memadai karena alasan ekonomi maupun waktu, serta posisi tawar perempuan yang lemah dalam pengambilan keputusan.

d. Putra (2019) dalam jurnal berjudul *"Addressing Gender Inequality to Improve Maternal Health in Indonesia"* juga mendukung pernyataan bahwa sistem patriarki dan norma gender di Indonesia berpengaruh pada kekuatan dan kemampuan perempuan dalam proses

pengambilan keputusan terkait pemanfaatan layanan kesehatan ibu. Selain itu, program kesehatan ibu yang dilaksanakan juga belum sepenuhnya mengatasi ketimpangan gender di Indonesia.

e. Menurut Bappenas (2021), kesenjangan gender di keluarga kerap mempengaruhi kualitas kesehatan perempuan, termasuk ibu hamil. Di beberapa daerah, kesehatan ibu hamil, bayi, dan pemenuhan gizi balita masih dianggap sebagai tanggung jawab perempuan saja. Padahal stunting juga semestinya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, di beberapa daerah masih terdapat budaya/praktik dalam keluarga yang mengutamakan laki-laki makan terlebih dahulu, atau budaya yang membiasakan perempuan atau ibu harus makan setelah anggota keluarga lain selesai. Perempuan dalam keluarga sering tidak mendapatkan makanan bergizi. Perempuan hamil cenderung sering makan seadanya karena makanan yang terbaik di rumah tangga adalah untuk laki-laki.

Dari berbagai penelitian di atas, dapat dilihat bahwa ketimpangan gender di bidang kesehatan di Indonesia terjadi terutama karena faktor sosial budaya, kemampuan ekonomi, dan faktor *governance* yang bias gender. Namun demikian, laporan World Bank (2020) menyatakan bahwa pada kaum muda di daerah perkotaan, norma-norma sosial perlahan berubah, termasuk bagaimana perempuan terlihat menduduki peran non-tradisional sehingga menjadi norma baru. Selain itu, di berbagai lembaga mulai terlihat adanya program-program yang mulai mendobrak norma gender, seperti dengan melibatkan laki-laki ke dalam program nutrisi, mengintegrasikan kebijakan yang ramah keluarga, serta mengakui hak-hak reproduksi remaja perempuan.

4.3. Situasi dan Distribusi Ketimpangan Gender di Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

4.3.1. Pengeluaran Per Kapita

Selain melihat aspek pendidikan dan kesehatan, indikator ekonomi berbasis standar hidup layak merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur hasil pembangunan manusia berbasis gender. Pengeluaran per kapita digunakan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Indonesia, serta digunakan juga oleh UNDP dalam mengukur aspek ekonomi dalam Human Development Index (HDI). Indikator pengeluaran per kapita ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli, yang angkanya diperoleh dari survey Susenas. Dengan demikian, pengeluaran per kapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah yang dapat dilihat juga melalui indikator konsumsi.

Gambar 39. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Nasional Berdasarkan Jenis Kelamin

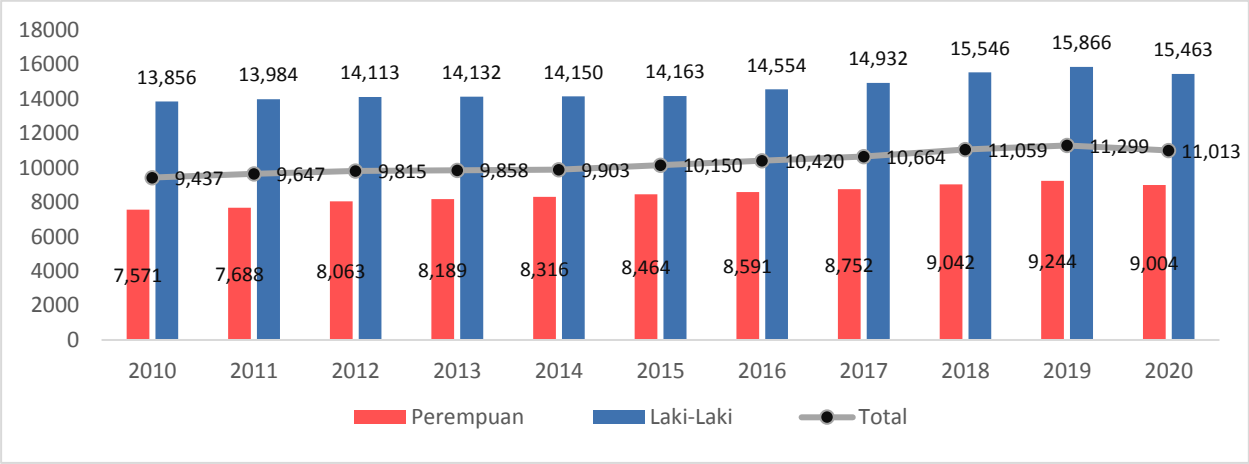

Sumber: BPS (diolah)

Dari gambar di atas tampak bahwa meskipun pengeluaran per kapita pada perempuan dan laki-laki terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, namun perekonomian di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Pengeluaran per kapita laki-laki meningkat dari Rp13,86 juta/tahun di tahun 2010 menjadi Rp15,87 juta/tahun di tahun 2019 atau tumbuh sebesar 14,51%. Di tahun 2020, pengeluaran per kapita laki-laki mengalami penurunan sebagai dampak pandemi Covid-19, menjadi Rp15,46 juta/tahun. Demikian pula halnya dengan pengeluaran per kapita perempuan yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar Rp7,57 juta/tahun menjadi Rp9,24 juta/tahun atau tumbuh sebesar 22,10%, namun dampak pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pengeluaran per kapita perempuan pada tahun 2020 menjadi Rp9,04 juta/tahun. Pertumbuhan pengeluaran per kapita yang diperoleh perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki sepanjang satu dekade terakhir.

Gambar 40. Pengeluaran Per Kapita Nasional Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020

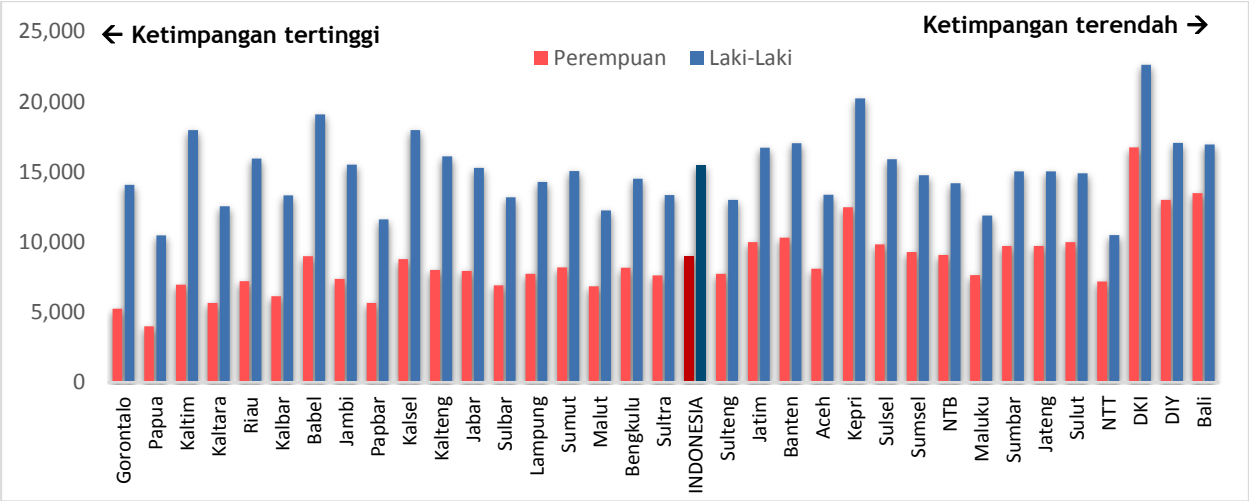

Sumber: BPS (diolah)

Secara kewilayahan, lebih dari separuh provinsi di Indonesia memiliki ketimpangan pengeluaran per kapita antara laki-laki dan perempuan yang lebih tinggi dari ketimpangan di level nasional, dimana terdistribusi merata dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Provinsi Gorontalo memiliki ketimpangan tertinggi, dimana pengeluaran per kapita perempuan hanya sebesar Rp5,25 juta/tahun, sementara pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp14,08 juta/tahun, atau dengan kata lain, pengeluaran per kapita perempuan di Gorontalo hanya 37% dari pengeluaran per kapita laki-laki. Sementara itu, ketimpangan paling rendah pada pengeluaran per kapita antara laki-laki dan perempuan terdapat provinsi Bali, dimana pengeluaran per kapita perempuan di Bali hampir mencapai 80% dari pengeluaran per kapita laki-laki. Pengeluaran Per Kapita perempuan dibanding laki-laki di provinsi Bali adalah Rp 13,5 juta/tahun dibanding Rp 16,9 juta/tahun. Hal ini sejalan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Bali yang paling tinggi di Indonesia dibandingkan TPAK perempuan di provinsi lainnya. Tingginya aktivitas ekonomi perempuan di Bali ini turut mendorong pengeluaran per kapita perempuan Bali.

Gambar 41. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Pengeluaran Per Kapita

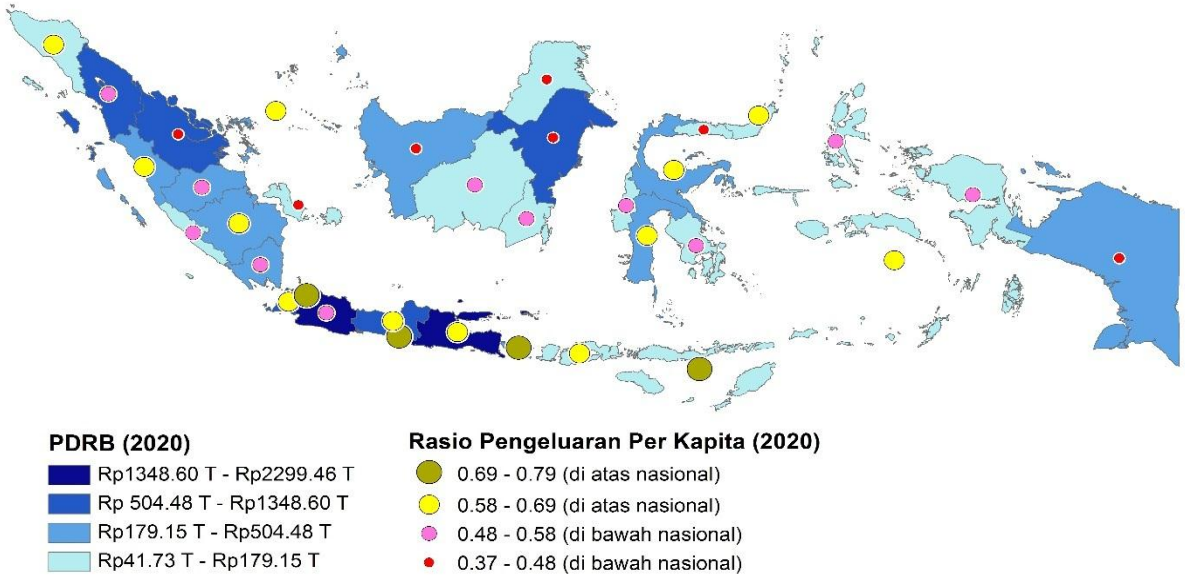

Sumber: BPS (diolah)

Secara nasional, rasio Pengeluaran Per Kapita sebesar 0,58. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih didominasi oleh laki-laki, dimana pengeluaran per kapita perempuan tidak lebih dari 58% dari pengeluaran per kapita laki-laki. Sementara secara spasial, sebanyak 18 provinsi masih memiliki rasio Pengeluaran Per Kapita (PPK) di bawah angka nasional, dimana 14 diantaranya memiliki kontribusi PDRB yang hanya di bawah 2% PDB. Provinsi yang memiliki rasio pengeluaran perkapita tertinggi adalah tiga provinsi di wilayah Jawa dan Bali, yaitu provinsi Bali (0,79), D.I. Yogyakarta (0,76), dan DKI Jakarta (0,74), atau dengan kata lain memiliki ketimpangan paling rendah dibandingkan daerah lain dalam hal pengeluaran per kapita antara perempuan dan laki-laki. Ketiga provinsi yang memiliki pengeluaran per kapita

perempuan tertinggi di Indonesia tersebut memiliki kesamaan antara lain dari segi sektor ekonomi kontributor utamanya. Ketiga provinsi tersebut memiliki perekonomian yang didominasi oleh sektor sekunder dan tersier.

Sekitar 17% perekonomian Bali disumbang oleh sektor penyediaan makan minum atau sering diasosiasikan dengan kegiatan pariwisata. Menurut UN WTO (2019), sektor pariwisata merupakan salah satu sektor dengan tenaga kerja wanita yang cukup tinggi, meskipun sering kali ditemukan dengan upah yang rendah atau lingkungan kerja yang kurang layak. Sementara itu, ekonomi D.I. Yogyakarta didominasi oleh sektor industri pengolahan, sedangkan DKI Jakarta didominasi oleh sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan. Industri pengolahan merupakan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Menurut KPPPA (2016), perempuan lebih banyak bekerja di sektor industri, perdagangan dan sektor jasa karena secara umum perempuan cenderung terampil dalam pekerjaan terkait pelayanan dan komunikasi. Hal tersebut mengkonfirmasi temuan dalam kajian ini bahwa daerah dengan perekonomian yang didominasi oleh sektor sekunder dan tersier memiliki ketimpangan gender yang relatif rendah dalam aspek ekonomi dibandingkan provinsi dengan struktur perekonomian yang bertumpu pada sektor primer.

Adapun provinsi dengan rasio pengeluaran per kapita terendah adalah provinsi di Wilayah Timur Indonesia, yaitu Gorontalo (0,37) dan Papua (0,38). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan yang besar dalam aspek pengeluaran perkapita antara perempuan dan laki-laki di kedua provinsi tersebut dibandingkan dengan provinsi lainnya. Kedua provinsi yang memiliki pengeluaran per kapita perempuan terendah di Indonesia tersebut juga memiliki kesamaan dari segi sektor ekonomi kontributor utamanya, yaitu memiliki struktur perekonomian yang didukung oleh sektor primer. Pada provinsi Gorontalo, hampir 40% perekonomiannya ditopang oleh sektor pertanian. Sementara sektor pertambangan dan sektor pertanian berkontribusi lebih dari 45% pada perekonomian provinsi Papua. Di Indonesia, sektor pertanian kebanyakan digarap oleh unit-unit keluarga. Perempuan sering kali terlibat dalam aktivitas pertanian, namun keterlibatannya sering kali dianggap sebagai kontribusi keluarga yang tidak dibayar (FAO, 2019). Sektor pertanian menyediakan peluang kerja yang tinggi bagi perempuan, namun dengan rata-rata upah yang rendah dibanding sektor lain (KPPPA, 2016).

Gambar 42. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Ketimpangan Pengeluaran Per Kapita

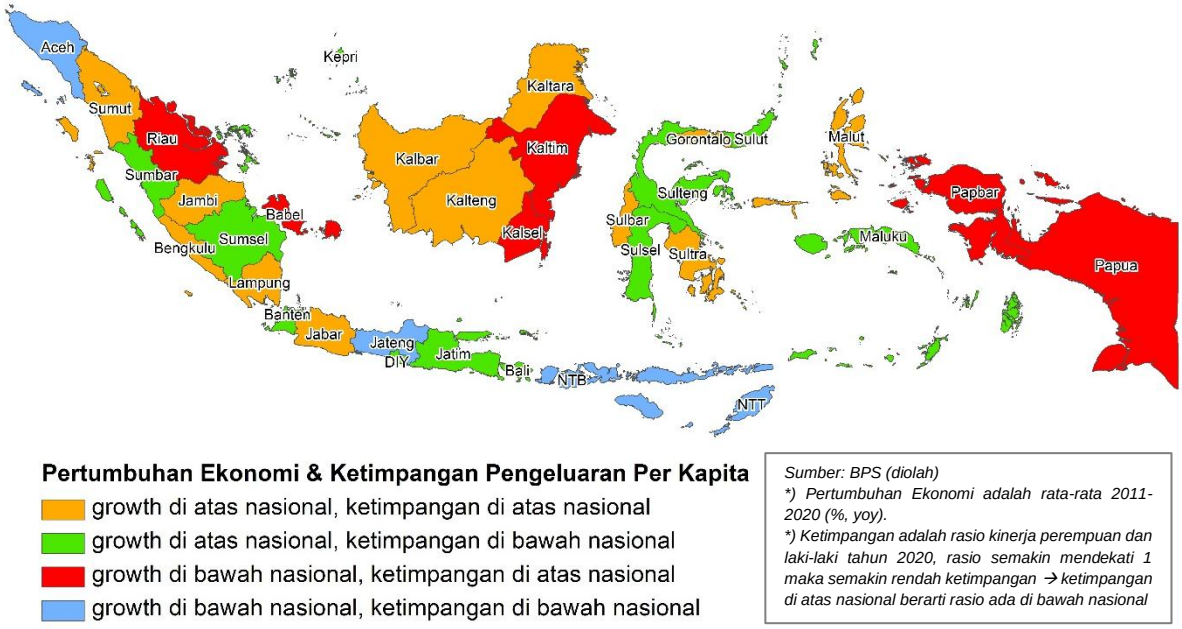

Pertumbuhan Ekonomi & Ketimpangan Pengeluaran Per Kapita

- growth di atas nasional, ketimpangan di atas nasional
- growth di atas nasional, ketimpangan di bawah nasional
- growth di bawah nasional, ketimpangan di atas nasional
- growth di bawah nasional, ketimpangan di bawah nasional

Sumber: BPS (diolah)
**) Pertumbuhan Ekonomi adalah rata-rata 2011-2020 (%, yoy).*
**) Ketimpangan adalah rasio kinerja perempuan dan laki-laki tahun 2020, rasio semakin mendekati 1 maka semakin rendah ketimpangan → ketimpangan di atas nasional berarti rasio ada di bawah nasional*

Sumber: BPS (diolah)

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah, terdapat 6 (enam) provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan rasio Pengeluaran Per Kapita di bawah rata-rata nasional, atau dengan kata lain, ketimpangan dalam hal Pengeluaran Per Kapita masih tinggi melebihi level nasional. Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Papua. Provinsi Riau, Papua Barat, dan Papua tidak mengalami perbaikan kondisi selama 10 tahun terakhir, sementara provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur mengalami penurunan kinerja perekonomian sejalan dengan masih rendahnya rasio Pengeluaran Per Kapita antara perempuan dan laki-laki. Sementara itu, sebanyak 12 provinsi memiliki kondisi ideal, dimana ketimpangan Pengeluaran Per Kapita relatif rendah di bawah ketimpangan level nasional, dan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi selama rata-rata 10 tahun terakhir mampu tumbuh di atas rata-rata nasional. Kondisi ini relatif terjaga dimana selama 10 tahun terakhir sebagian besar provinsi mampu mempertahankan kondisi idealnya. Provinsi D.I. Yogyakarta dan Sulawesi Utara merupakan provinsi yang selama rata-rata 10 tahun terakhir mampu mencapai kinerja ekonomi di atas rata-rata nasional setelah pada tahun 2011 masih tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, seiring rasio Pengeluaran Per Kapita antara perempuan dan laki-laki yang mampu dijaga di atas level nasional.

Gambar 43. Kuadran Growth Provinsi dan Ketimpangan Pengeluaran Per Kapita

		Ketimpangan Pengeluaran Per Kapita (2011)				Ketimpangan Pengeluaran Per Kapita (2020)	
		Di bawah nasional	Di atas nasional			Di bawah nasional	Di atas nasional
Growth (2011)	Di atas nasional	KUADRAN II Sumut, Sumbar, Sumsel, Bengkulu, Kepri, DKI, Jatim, Banten, Bali, Sulteng, Sulsel, Maluku (12)	KUADRAN I Jambi, Lampung, Babel, Jabar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Malut (12)	Growth (Rata-Rata 2011-2020)	Di atas nasional	KUADRAN II Sumbar, Sumsel, Kepri, DKI, DIY, Jatim, Banten, Bali, Sulut, Sulteng, Sulsel, Maluku (12)	KUADRAN I Sumut, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kaltara, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Malut (12)
	Di bawah nasional	KUADRAN III Jateng, DIY, NTB, NTT, Sulut (5)	KUADRAN IV Aceh, Riau, Kalbar, Papbar, Papua (5)		Di bawah nasional	KUADRAN III Aceh, Jateng, NTB, NTT (4)	KUADRAN IV Riau, Babel, Kalsel, Kaltim, Papbar, Papua (6)

Sumber: BPS (diolah)

4.3.2. Sumbangan Pendapatan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menetapkan faktor ekonomi sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur pembangunan pemberdayaan gender di suatu negara. Aspek ekonomi dalam IDG diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan yang dapat menunjukkan bagaimana perempuan berperan dan berkontribusi secara finansial. Sumbangan pendapatan perempuan juga merefleksikan kedudukan perempuan di pasar dunia kerja dan bagaimana perempuan telah atau belum diperhitungkan dalam dunia kerja. Sumbangan pendapatan perempuan juga mengindikasikan adanya kemandirian perempuan secara ekonomi yang dapat berdampak pada relasi yang lebih setara dan kemampuan kontrol yang otonom. Sumbangan pendapatan menunjukkan kontribusi atau porsi perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan di sektor non pertanian secara nasional. Sumbangan pendapatan dipengaruhi oleh faktor proporsi angkatan kerja dan upah yang diterima (KPPPA, 2016). Rendahnya proporsi tenaga kerja perempuan berpengaruh terhadap sumbangan pendapatan, sementara pendapatan yang diterima perempuan juga cenderung lebih rendah dari laki-laki.

Gambar 44. Perkembangan Sumbangan Pendapatan Nasional Berdasarkan Jenis Kelamin

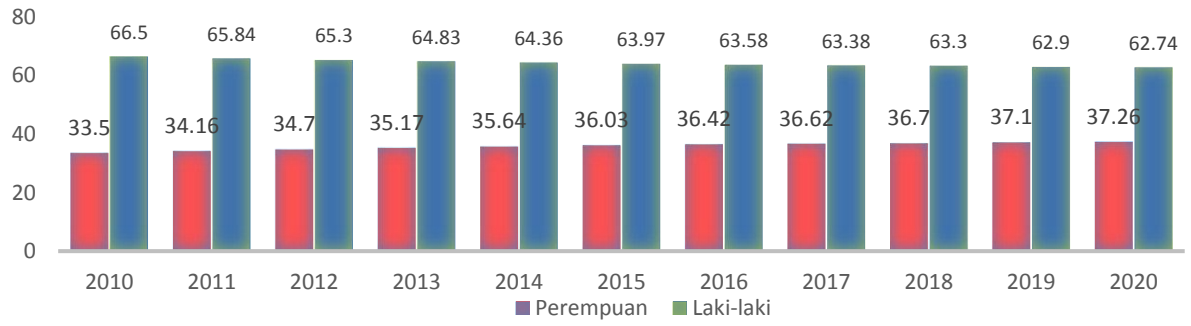

Sumber: BPS (diolah)

Meskipun sejumlah capaian yang diperoleh perempuan di bidang ekonomi dan tenaga kerja masih rendah, namun partisipasi perempuan dalam penciptaan pendapatan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sumbangan pendapatan perempuan terus mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2020, sumbangan pendapatan perempuan mencapai 37,26%, atau dengan kata lain, perempuan hanya menyumbang kurang dari 40% pendapatan dalam pekerjaan di sektor non pertanian selama 10 tahun terakhir. Walaupun masih terpaut cukup jauh dari laki-laki, namun peningkatan yang terus terjadi pada indikator ini memberi sinyal positif akan terjadinya peningkatan partisipasi dan otonomi perempuan di bidang ekonomi, serta merupakan indikasi kualitas pekerja perempuan yang semakin diperhitungkan dalam pasar tenaga kerja.

Gambar 45. Sumbangan Pendapatan Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020

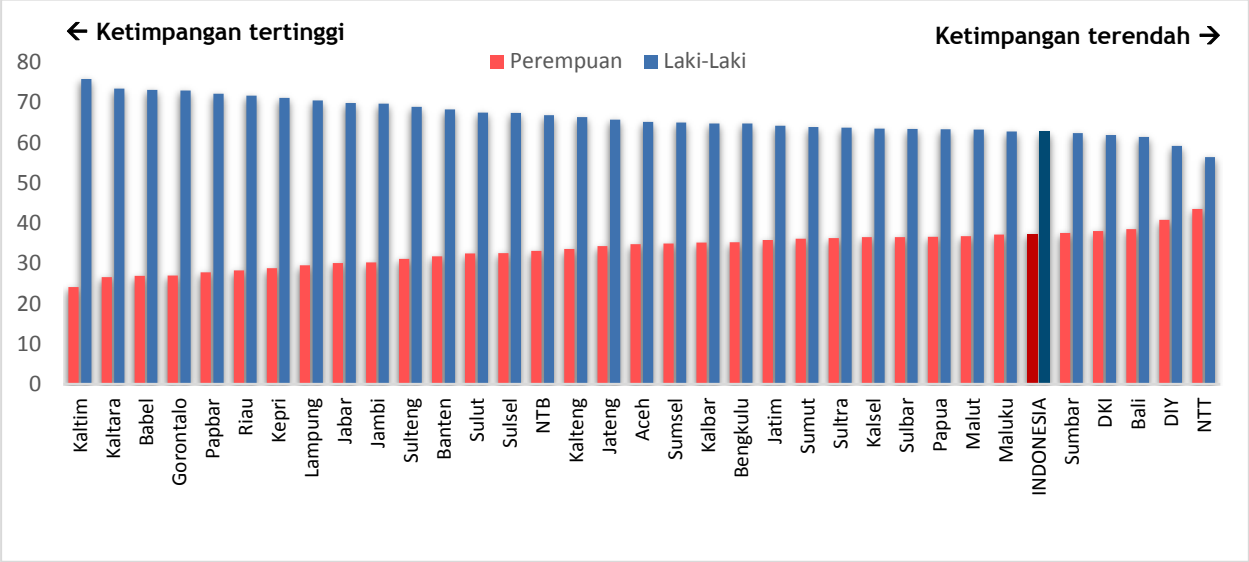

Sumber: BPS (diolah)

Secara kewilayahan, sebagian besar provinsi memiliki ketimpangan tinggi dalam hal sumbangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Hanya 5 (lima) provinsi yang ketimpangan sumbangan pendapatannya lebih baik dari ketimpangan nasional, yaitu Sumatera Barat, DKI Jakarta, Bali, D.I. Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur. Sumbangan Pendapatan perempuan yang masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki ini menunjukkan bahwa perempuan belum banyak berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga. Sumbangan pendapatan perempuan terendah terdapat di provinsi Kalimantan Timur, dimana perempuan hanya menyumbang pendapatan sebesar 24,17%, dibandingkan laki-laki yang sebesar 75,83%. Kondisi ini menunjukkan kontribusi atau porsi perempuan dalam pekerjaan di sektor non pertanian masih sangat rendah.

Gambar 46. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Sumbangan Pendapatan

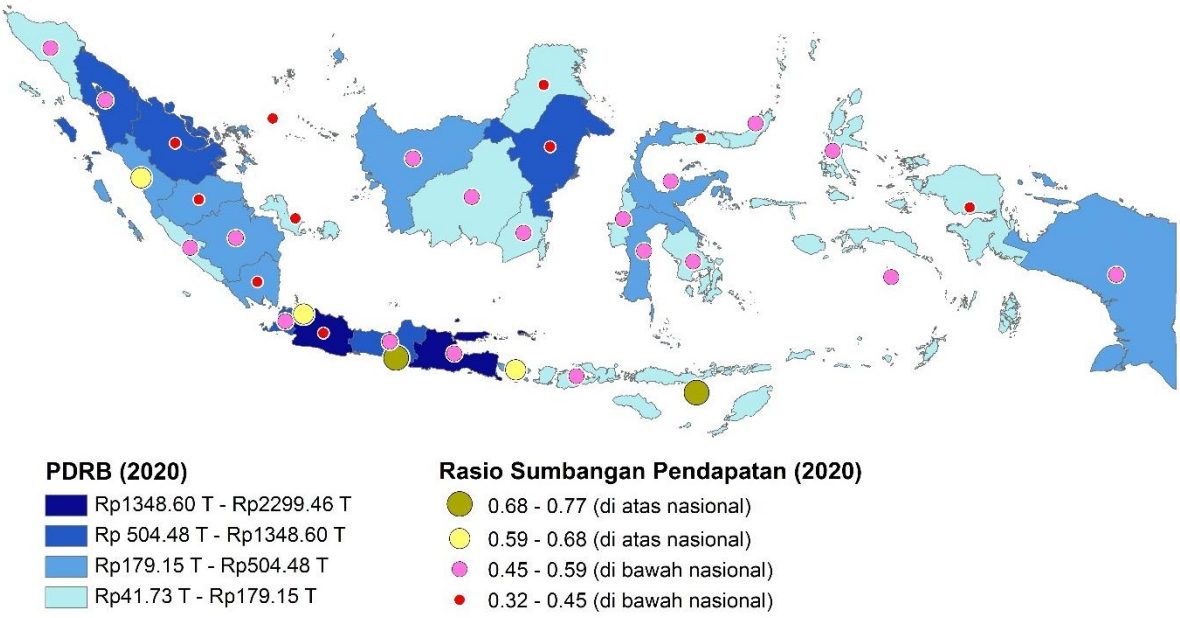

Sumber: BPS (diolah)

Secara nasional, rasio Sumbangan Pendapatan sebesar 0,59, dimana Sumbangan Pendapatan perempuan hanya sebesar 37,26%, dibandingkan Sumbangan Pendapatan laki-laki yang sebesar 62,74%. Sementara secara spasial, sebagian besar provinsi masih memiliki rasio Sumbangan Pendapatan di bawah angka nasional. Provinsi Nusa Tenggara Timur dan D.I. Yogyakarta memiliki rasio sumbangan pendapatan tertinggi sebesar 0,77 dan 0,69. Hal ini menggambarkan bahwa sumbangan pendapatan perempuan di kedua provinsi tersebut paling tinggi dibandingkan sumbangan pendapatan perempuan di daerah lainnya. Sementara itu, provinsi Kalimantan Timur memiliki rasio sumbangan pendapatan terendah sebesar 0,32.

Dilihat dari struktur perekonomiannya, dengan mengesampingkan sektor pertanian, provinsi Nusa Tenggara Timur dan D.I. Yogyakarta memiliki struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor sekunder dan tersier, sementara perekonomian provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh sektor pertambangan sebesar hampir 45%. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, daerah dengan struktur perekonomian yang lebih ditopang oleh sektor sekunder dan tersier, memililki ketimpangan gender yang relatif lebih rendah dalam aspek ekonomi dibandingkan daerah yang didominasi oleh sektor primer, yang disebabkan oleh karakteristik dan kecenderungan bias gender dari sektor utama tersebut.

Gambar 47. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Sumbangan Pendapatan

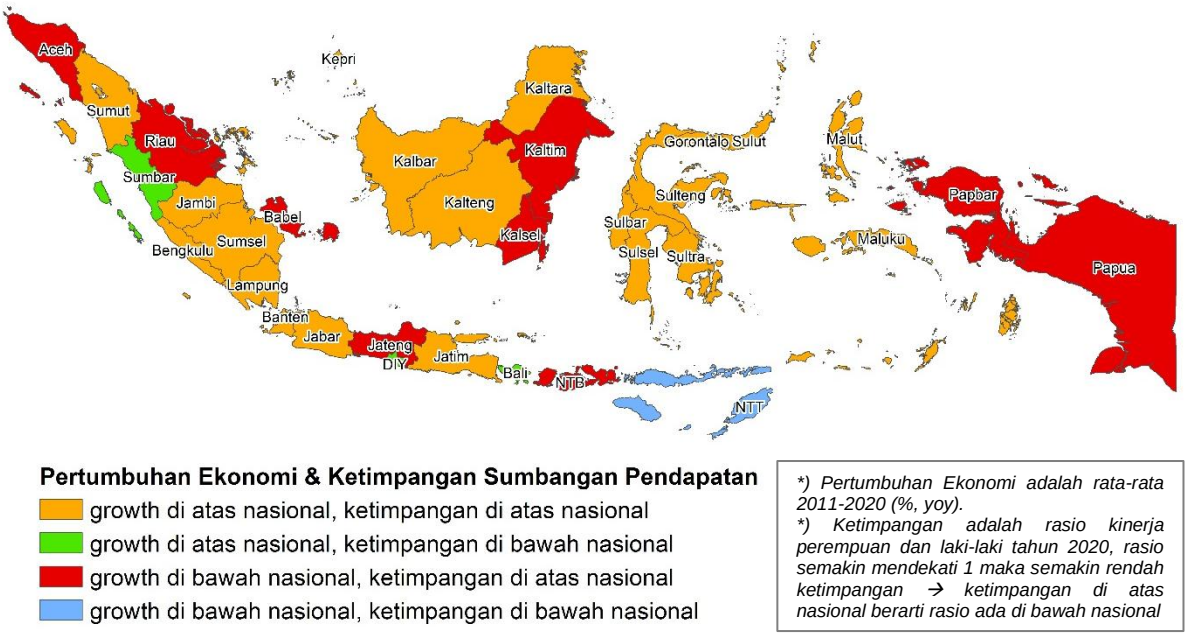

Sumber: BPS (diolah)

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah, terdapat 9 provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan rasio Sumbangan Pendapatan di bawah rata-rata nasional, atau dengan kata lain, ketimpangan dalam hal Sumbangan Pendapatan masih tinggi melebihi level nasional. Provinsi-provinsi tersebut adalah Aceh, Riau, Bangka Belitung, Jawa Tengah, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Papua. Kondisi di provinsi Aceh, Riau, Jawa Tengah, NTB, dan Papua Barat relatif sama dengan kondisi 10 tahun yang lalu. Sedangkan provinsi Kalimantan Selatan dan Papua mengalami kenaikan ketimpangan Sumbangan Pendapatan, dari yang semula ketimpangannya berada di bawah level nasional pada 2011, menjadi melebihi ketimpangan nasional pada 2020. Adapun provinsi Bangka Belitung dan Kalimantan Timur mengalami penurunan kinerja perekonomian sejalan dengan masih rendahnya rasio Sumbangan Pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Sementara itu, hanya ada empat provinsi yang memiliki kondisi ideal, dimana ketimpangan Sumbangan Pendapatan rendah di bawah ketimpangan level nasional, dan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi selama rata-rata 10 tahun terakhir mampu tumbuh di atas rata-rata nasional. Keempat provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, dan Bali. Kondisi ini mengalami penurunan, dimana pada 2011 terdapat tujuh provinsi yang memiliki kondisi ideal. Pembagian provinsi ke dalam kuadran pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan Tenaga Profesional pada tahun 2011 dan 2020 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran.

Gambar 48. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Sumbangan Pendapatan

		Ketimpangan Sumbangan Pendapatan (2011)				Ketimpangan Sumbangan Pendapatan (2020)	
		Di bawah nasional	Di atas nasional			Di bawah nasional	Di atas nasional
Growth (2011)	Di atas nasional	KUADRAN II Sumut, DKI, Bali, Kalsel, Sulbar, Maluku, Malut (7)	KUADRAN I Sumbar, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Babel, Kepri, Jabar, Jatim, Banten, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo (17)	Growth (Rata-Rata 2011-2020)	Di atas nasional	KUADRAN II Sumbar, DKI, DIY, Bali (4)	KUADRAN I Sumut, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kepri, Jabar, Jatim, Banten, Kalbar, Kalteng, Kaltara, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut (20)
	Di bawah nasional	KUADRAN III DIY, NTT, Papua (3)	KUADRAN IV Aceh, Riau, Jateng, NTB, Kalbar, Sulut, Papbar (7)		Di bawah nasional	KUADRAN III NTT (1)	KUADRAN IV Aceh, Riau, Babel, Jateng, NTB, Kalsel, Kaltim, Papbar, Papua (9)

Sumber: BPS (diolah)

4.3.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pada tahun 2020, penduduk usia kerja Indonesia mencapai 204 juta orang dari total populasi yang sebanyak 270 juta jiwa, yang menandakan jumlah penduduk usia produktif dalam jumlah besar di Indonesia atau bonus demografi. Namun, bonus demografi tersebut baru merupakan perhitungan nominal dan memerlukan tindak lanjut untuk memperoleh manfaat atas bonus demografi tersebut, diantaranya dengan perluasan kesempatan kerja serta peningkatan produktivitas penduduk usia produktif dan lansia khususnya isu gender yang masih dihadapi perempuan. Sebagai salah satu contoh kondisi riil yang terjadi adalah banyaknya penduduk perempuan usia kerja yang tidak masuk dalam pasar tenaga kerja dan diantaranya didominasi oleh kegiatan mengurus rumah tangga sebesar 76,50%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur sosial masih cukup melekat pada perempuan terkait dengan pekerjaan domestik sehingga keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja masih relatif terbatas. Meskipun dari sisi akses pendidikan telah seimbang antara laki-laki dan perempuan, ketika perempuan telah memasuki pasar tenaga kerja mereka dapat segera keluar lagi dari pasar tenaga kerja yang diantaranya disebabkan oleh berstatus menikah atau karena mengurus keluarga. Setelah hal itu terjadi, sangat jarang perempuan-perempuan tersebut yang kembali masuk ke pasar tenaga kerja.

Gambar 49. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Nasional Berdasarkan Jenis Kelamin

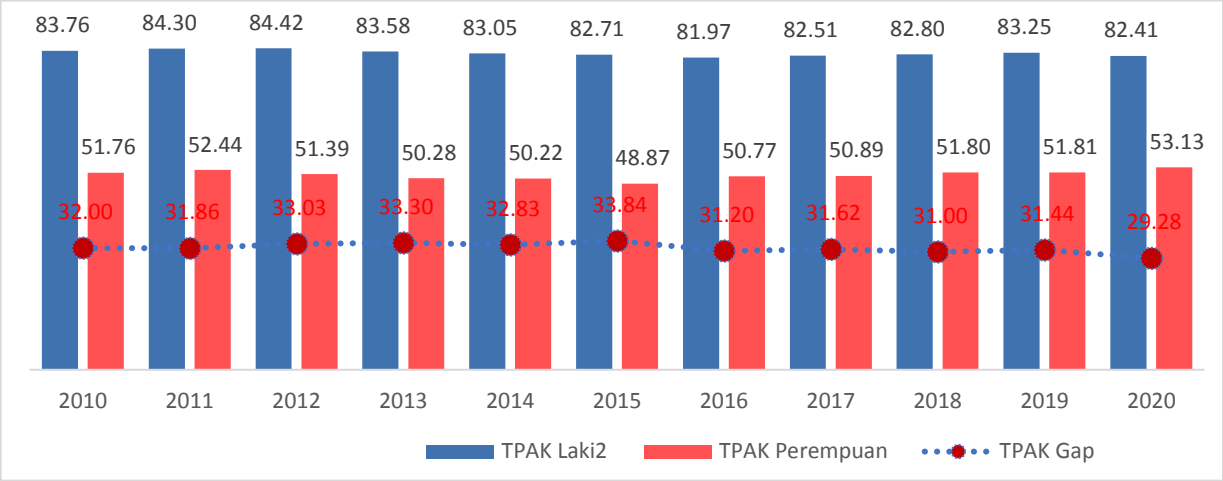

Sumber: BPS (diolah)

Secara nasional, rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,64, dimana TPAK perempuan sebesar 53,13%, jauh lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki yang sebesar 82,41%. Padahal, proporsi penduduk usia kerja perempuan sebanding dengan laki-laki, yaitu sebesar 50,01% dari total penduduk usia kerja. Namun, penduduk usia kerja yang terserap ke dalam pasar tenaga kerja hanya sebesar 138 juta orang secara total. Penduduk usia kerja yang tidak terserap sebagian besar adalah perempuan yang proporsinya mencapai 46,87%. Sedangkan, proporsi laki-laki yang tidak masuk ke pasar tenaga kerja hanya mencapai 17,59%. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa secara nasional baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan terus mengalami perbaikan sejak tahun 2015. Hal tersebut menandakan perekonomian telah mampu menyerap Sumber Daya Manusia (SDM) secara lebih optimal. Dengan demikian, sasaran pembangunan nasional berupa TPAK perempuan sebesar 55% pada tahun 2024 diharapkan dapat tercapai.

Perubahan struktur ekonomi dan kemajuan teknologi merupakan salah satu hal yang perlu diantisipasi karena berpengaruh terhadap struktur tenaga kerja khususnya saat ini di masa revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, pemerintah harus memformulasikan strategi yang lebih efektif dan terstruktur dalam pasar tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan kemajuan teknologi sehingga pembangunan ekonomi dapat dipercepat. Namun, bagi tenaga kerja perempuan terdapat tantangan khusus lainnya yang masih menjadi isu di pasar kerja. Ditambah lagi dengan merebaknya pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap semakin meningkatnya kerentanan perempuan dan kerentanan gender. Komnas Perempuan (2021) mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, masih terdapat pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan untuk perempuan diantaranya berupa pelanggaran hak maternitas (haid, kehamilan, fasilitas kesehatan), keselamatan dan kesehatan kerja, PHK terhadap buruh perempuan hamil, kondisi buruh migran yang dipulangkan dan tidak mendapat layanan optimal

dari negara, serta pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja. Kondisi ini lebih buruk lagi dialami oleh buruh migran di luar negeri karena situasi dan kondisi yang tidak memadai sehingga kekerasan berbasis gender dan perlakuan diskriminatif berlapis dialami oleh perempuan pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, adanya perjanjian kerja dan regulasi perlindungan pekerja khususnya pekerja perempuan harus lebih mendapat perhatian lagi.

Gambar 50. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Nasional Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020

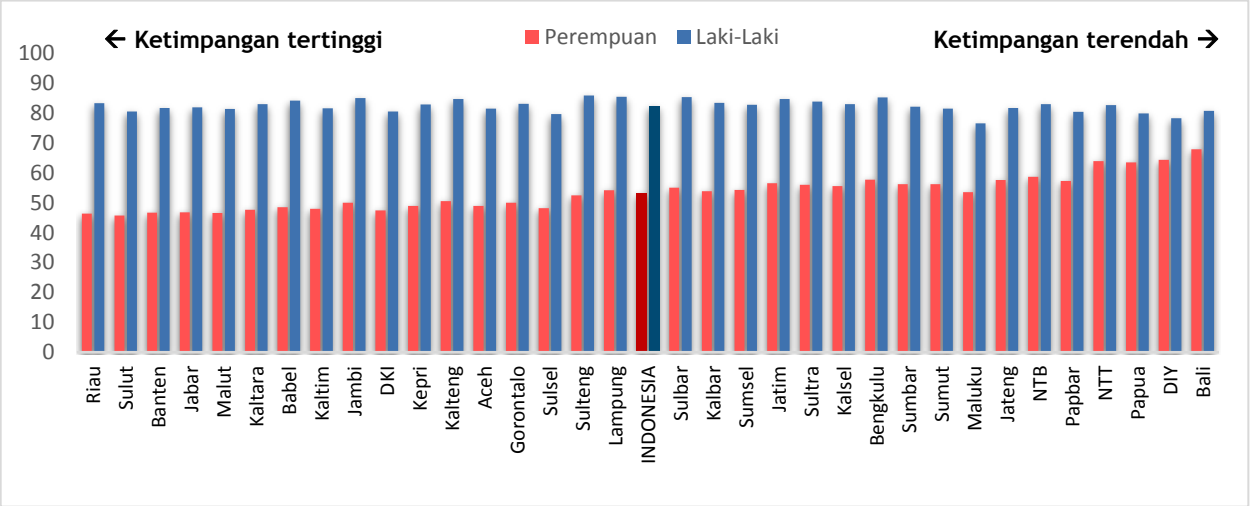

Sumber: BPS (diolah)

Sementara secara spasial, sebanyak 17 provinsi memiliki rasio TPAK di bawah angka nasional, dimana 70%-nya justru berada di wilayah barat Indonesia. Rasio TPAK terendah antara perempuan dan laki-laki terdapat di provinsi Riau sebesar 0,56 (TPAK perempuan hanya 46,4%, dan TPAK laki-laki 83,25%). Pada 12 provinsi, rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja sejalan dengan kontribusi PDRB-nya yang relatif rendah, yaitu kurang dari 3% PDB. Di sisi lain, ketimpangan TPAK terendah antara perempuan dan laki-laki dicapai oleh provinsi Bali (rasio TPAK 0,84), dimana TPAK perempuan 67,85% dan TPAK laki-laki 80,75%. TPAK perempuan di Bali jauh lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan secara nasional. Kondisi ini memberi indikasi bahwa aktivitas ekonomi perempuan di Bali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan secara nasional, dan telah terjadi kemajuan dalam hal pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dibandingkan provinsi lain. Tingginya aktivitas ekonomi perempuan di Bali tidak terlepas dari norma budaya (agama) di Bali yang memandang bekerja adalah sebuah Dharma atau kewajiban yang harus dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, basis ekonomi provinsi Bali yang berupa kegiatan pariwisata mampu mendorong partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di atas rata-rata nasional, terutama yang terkait aktivitas di sektor perdagangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

Gambar 51. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

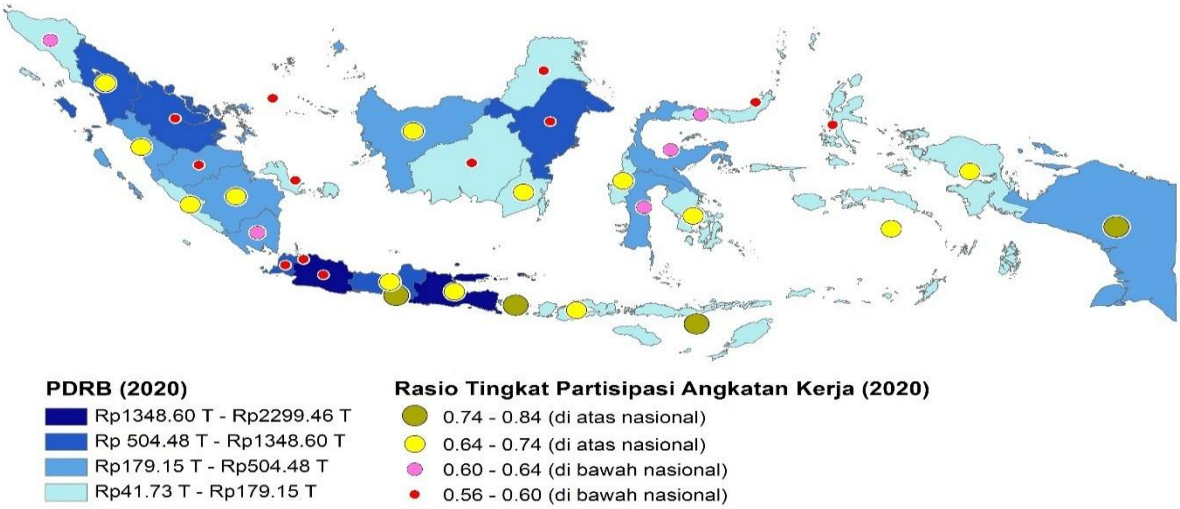

Sumber: BPS (diolah)

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah, sebanyak 4 (empat) provinsi memiliki pertumbuhan ekonomi dan rasio TPAK di bawah rata-rata nasional, atau dengan kata lain, ketimpangan dalam hal partisipasi angkatan kerja masih tinggi melebihi level nasional. Keempat provinsi tersebut adalah Aceh, Riau, Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur. Provinsi Aceh dan Riau tidak mengalami perbaikan kondisi selama 10 tahun terakhir, sementara provinsi Bangka Belitung dan Kalimantan Timur mengalami penurunan kinerja perekonomian sejalan dengan masih rendahnya rasio TPAK antara perempuan dan laki-laki. Sementara itu, sebanyak 11 provinsi memiliki kondisi ideal, dimana ketimpangan TPAK relatif rendah di bawah ketimpangan TPAK nasional, dan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi selama rata-rata 10 tahun terakhir mampu tumbuh di atas level nasional. Namun demikian, dibandingkan tahun 2011, jumlah provinsi yang memiliki kondisi ideal ini mengalami penurunan, dimana terdapat provinsi yang mengalami penurunan rasio TPAK meskipun ekonominya tetap tumbuh di atas rata-rata nasional, seperti provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah.

Gambar 52. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Ketimpangan TPAK

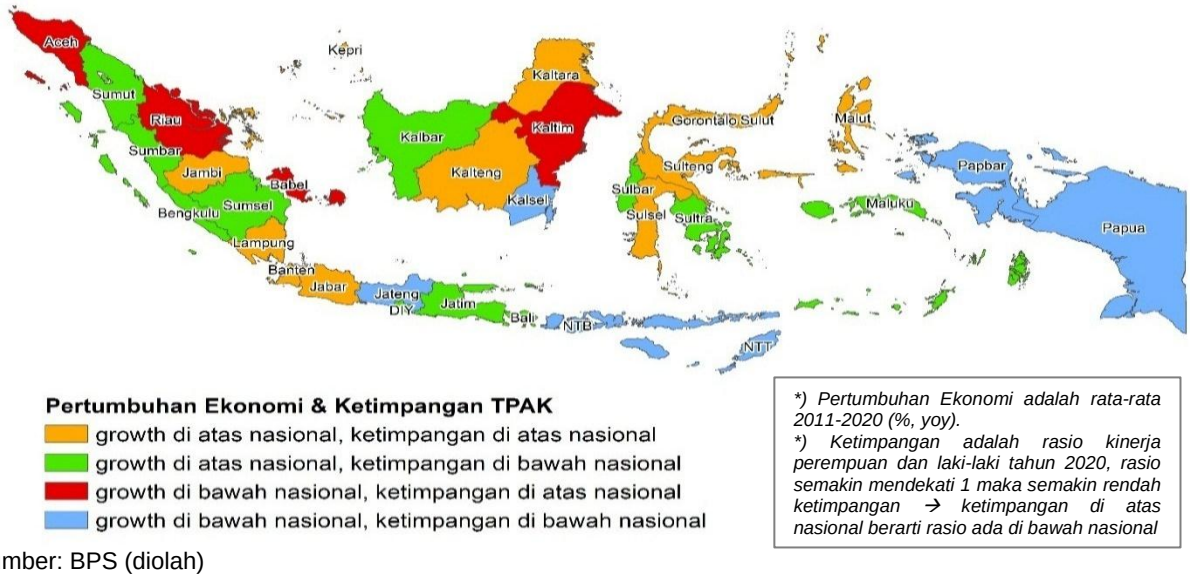

Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan hasil olah data antara pertumbuhan ekonomi provinsi dan ketimpangan TPAK yang terjadi pada tahun 2011 dan 2020, 34 provinsi di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam empat kuadran. Provinsi yang berada di Kuadran II merupakan provinsi yang relatif cukup baik dalam hal pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan TPAK. Namun, provinsi yang berada pada Kuadran IV merupakan provinsi yang perlu mendapatkan perhatian ekstra karena memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah nasional dan ketimpangan TPAK yang di atas nasional. Berdasarkan kuadran tersebut dapat dilihat bahwa beberapa provinsi dalam satu dekade terakhir masih tetap berada pada Kuadran IV, yaitu Provinsi Aceh, dan Riau. Sedangkan Provinsi Sulawesi Utara berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya sehingga berpindah ke Kuadran I meskipun ketimpangan TPAK-nya masih persisten. Provinsi NTB pun berhasil berpindah ke Kuadran III yang menandakan ketimpangan TPAK-nya mulai membaik meskipun pertumbuhan ekonominya masih berada di bawah nasional.

Gambar 53. Kuadran Growth Provinsi dan Ketimpangan TPAK

		Ketimpangan TPAK (2011)				Ketimpangan TPAK (2020)	
		Di bawah nasional	Di atas nasional			Di bawah nasional	Di atas nasional
Growth (2011)	Di atas nasional	KUADRAN II Sumut, Sumsel, Bengkulu, DKI, Jatim, Bali, Kalteng, Kalsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, Maluku (12)	KUADRAN I Sumbar, Jambi, Lampung, Babel, Kepri, Jabar, Banten, Kaltim, Kaltara, Sulsel, Gorontalo, Malut (12)	Growth (Rata-Rata 2011-2020)	Di atas nasional	KUADRAN II Sumut, Sumbar, Sumsel, Bengkulu, DIY, Jatim, Bali, Kalbar, Sultra, Sulbar, Maluku (11)	KUADRAN I Jambi, Lampung, Kepri, DKI, Jabar, Banten, Kalteng, Kaltara, Sulut, Sulteng, Sulsel, Gorontalo, Malut (13)
	Di bawah nasional	KUADRAN III Jateng, DIY, NTT, Kalbar, Papbar, Papua (6)	KUADRAN IV Aceh, Riau, NTB, Sulut (4)		Di bawah nasional	KUADRAN III Jateng, NTB, NTT, Kalsel, Papbar, Papua (6)	KUADRAN IV Aceh, Riau, Babel, Kaltim (4)

Sumber: BPS (diolah)

4.3.4. Tenaga Profesional

Indikator Tenaga Profesional digunakan untuk melihat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui partisipasi perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, teknisi, dan asisten profesional. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, pekerja yang memiliki keahlian dan menduduki pekerjaan tersebut dikategorikan sebagai *skilled labor* dan mayoritas berada pada lapangan usaha Jasa Pendidikan serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Tenaga kerja perempuan Indonesia belum banyak yang bekerja pada jenis pekerjaan tersebut, tetapi selama satu dekade terakhir proporsinya mengalami peningkatan meskipun fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan telah diperhitungkan kapasitas dan kualitasnya dalam dunia profesional. Pendidikan dalam hal ini merupakan salah satu faktor determinan yang berperan

penting untuk mengungkit daya saing perempuan dalam pasar tenaga kerja dan dunia profesional sehingga perempuan dapat lebih berkualitas dan produktif secara ekonomi.

Gambar 54. Persentase Tenaga Profesional di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin

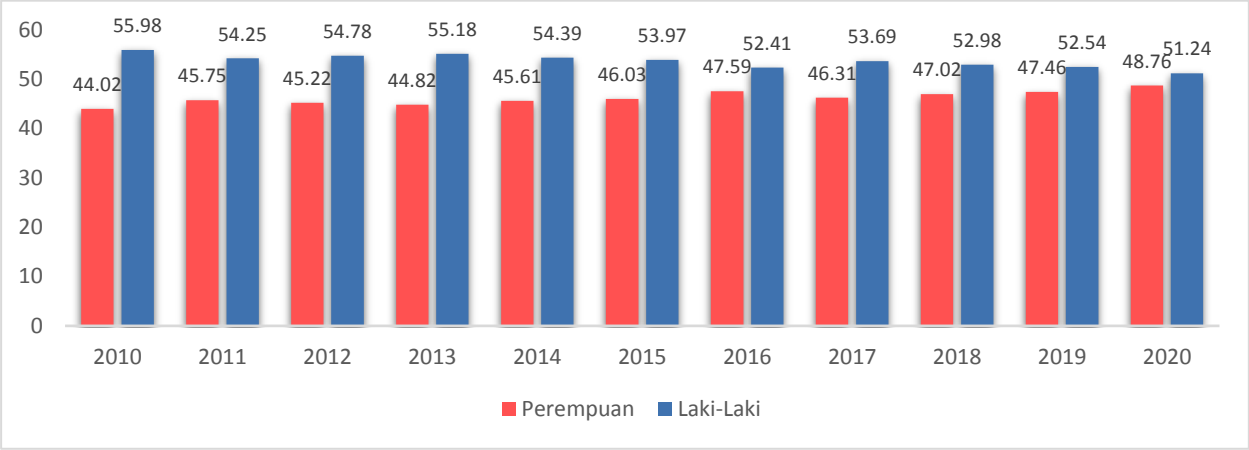

Sumber: BPS (diolah)

Secara nasional, capaian Tenaga Profesional antara perempuan dan laki-laki hampir mendekati setara, yaitu rasionya mencapai 0,95. Sebanyak 48,76% Tenaga Profesional diisi oleh perempuan dan sebanyak 51,24% diisi oleh laki-laki. Jumlah tenaga profesional Indonesia masih relatif terbatas dan mayoritas berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (2021), mayoritas tenaga kerja Indonesia masih berada pada jenjang *semi-skilled* sehingga jumlah tenaga profesional hanya memiliki proporsi sekitar 12,05% dari total penduduk yang bekerja. Hal ini disebabkan tenaga profesional memiliki kualifikasi adanya pengetahuan, keahlian, dan tingkat akademik tertentu yang berkaitan dengan pendidikan ataupun pengalaman bekerja/belajar yang pernah ditekuni. Oleh karena itu, untuk mencapai visi Indonesia 2045 menjadi negara berpendapatan tinggi dan ekonomi terbesar dunia, prasyarat SDM yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut harus dipenuhi, antara lain SDM yang berkualitas, menguasai teknologi, produktif, adaptif, dan kompetitif.

Gambar 55. Tenaga Profesional Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020

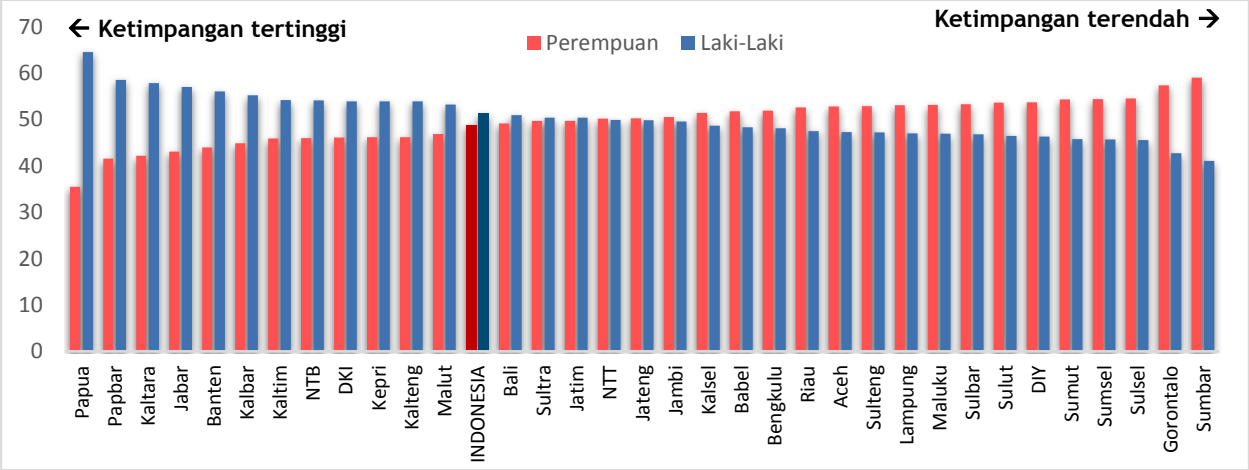

Sumber: BPS (diolah)

Secara spasial, sekitar 65% provinsi di Indonesia memiliki proporsi perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional di atas nasional. Sebanyak 12 provinsi memiliki rasio Tenaga Profesional (TP) di bawah angka nasional. Rasio terendah terdapat di provinsi Papua sebesar 0,55, dimana Tenaga Profesional perempuan hanya sebesar 35,48% meskipun di sisi lain Provinsi Papua memiliki ketimpangan TPAK di bawah nasional. DKI Jakarta sebagai ibukota negara justru termasuk ke dalam provinsi yang memiliki ketimpangan relatif cukup tinggi dan rasionya berada di bawah nasional sebesar 0,85 serta Tenaga Profesional perempuan sebesar 46,1%. Padahal, idealnya DKI Jakarta menjadi tolak ukur dalam upaya pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan gender. Di sisi lain, sebanyak 19 provinsi yang mayoritas berada di bagian barat Indonesia memiliki rasio Tenaga Profesional di atas 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa di 19 provinsi tersebut perempuan lebih banyak menempati posisi sebagai Tenaga Profesional dibandingkan laki-laki. Provinsi Sumatera Barat memiliki rasio tertinggi tenaga profesional, yaitu sebesar 1,44 dengan proporsi tenaga profesional perempuan sebesar 58,97%. Meskipun apabila dilihat secara proporsi jumlah tenaga profesional (*skilled-labor*) dalam pasar tenaga kerja di Sumatera Barat menurut Sakernas jumlahnya hanya sekitar 11,67%, lebih rendah dibandingkan jumlah tenaga profesional di Jawa Barat.

Gambar 56. Distribusi Spasial PDRB dan Rasio Tenaga Profesional

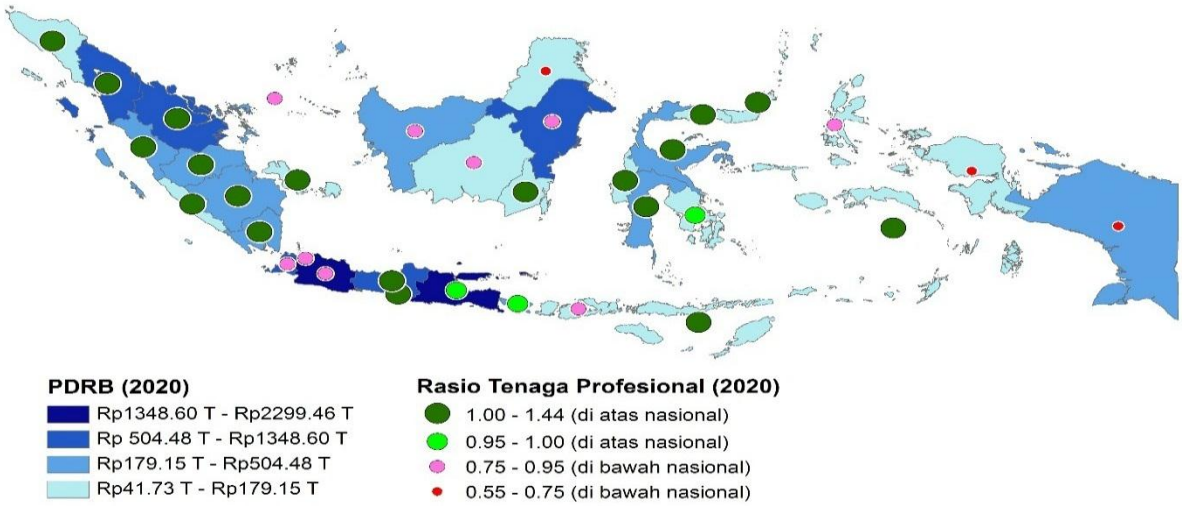

Sumber: BPS (diolah)

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah, terdapat 4 (empat) provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan rasio Tenaga Profesional di bawah rata-rata nasional, atau dengan kata lain, ketimpangan dalam hal Tenaga Profesional masih tinggi melebihi level nasional. Keempat provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Papua. Provinsi Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, dan Papua tidak mengalami perbaikan kondisi selama 10 tahun terakhir, sementara provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan kinerja perekonomian sejalan dengan masih rendahnya rasio Tenaga Profesional antara perempuan dan laki-laki. Sementara itu, sebanyak 16 provinsi memiliki kondisi ideal, dimana ketimpangan Tenaga Profesional relatif rendah di bawah ketimpangan level nasional, dan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi selama rata-rata 10 tahun terakhir mampu tumbuh di atas rata-rata

nasional. Kondisi ini relatif membaik dibandingkan tahun 2011, dimana saat itu hanya 15 provinsi yang memiliki kondisi ideal (ketimpangan Tenaga Profesional rendah diikuti pertumbuhan ekonomi tinggi). D.I. Yogyakarta merupakan provinsi yang mampu memperbaiki rasio tenaga profesional antara perempuan dan laki-laki secara signifikan, dimana pada tahun 2011 hanya 44,54% Tenaga Profesional yang diisi oleh perempuan, sementara pada tahun 2020 sudah meningkat menjadi 53,59%. Perbaikan ini diikuti pula oleh perbaikan kinerja ekonomi provinsi DIY yang selama rata-rata 10 tahun terakhir ini mampu tumbuh di atas rata-rata nasional.

Gambar 57. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Ketimpangan Tenaga Profesional

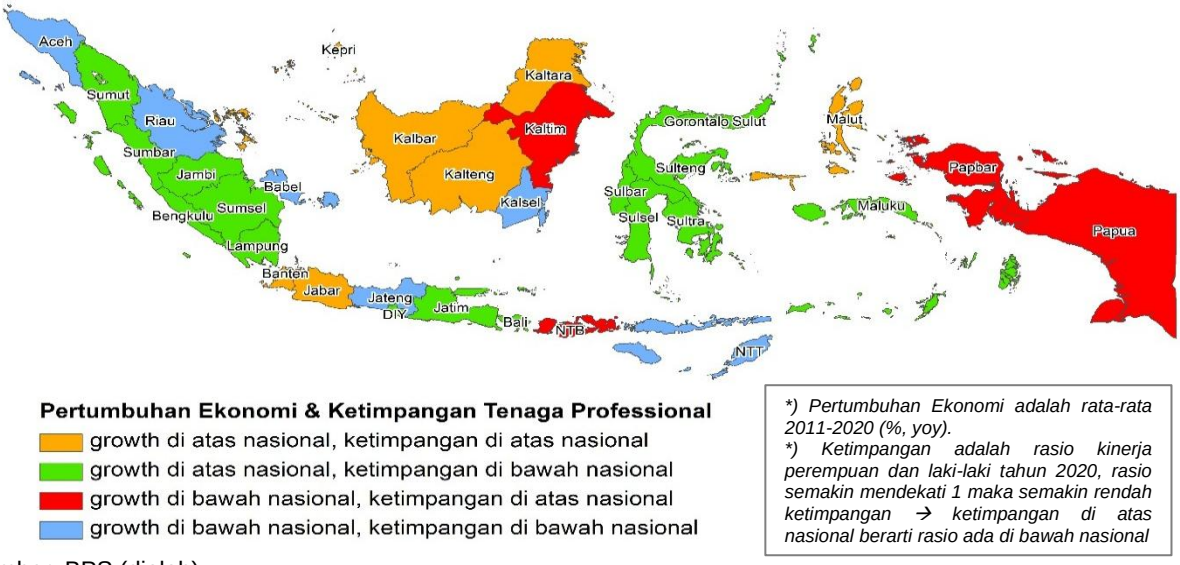

Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan pengelompokan daerah menurut pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan tenaga profesional yang terjadi pada tahun 2011 dan 2020, 34 provinsi di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam empat kuadran. Provinsi yang berada di Kuadran II merupakan provinsi yang relatif cukup baik dalam hal pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan tenaga profesional. Namun, provinsi yang berada pada Kuadran IV merupakan provinsi yang perlu mendapatkan perhatian ekstra karena memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah nasional dan ketimpangan tenaga profesional yang di atas nasional. Berdasarkan kuadran tersebut dapat dilihat bahwa beberapa provinsi dalam satu dekade terakhir masih tetap berada pada Kuadran IV, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kemajuan yang signifikan karena berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan menurunkan ketimpangan tenaga profesionalnya sehingga berpindah ke Kuadran II selama satu dekade terakhir. Provinsi Kalimantan Barat pun berhasil berpindah ke Kuadran I yang menunjukkan perbaikan dalam pertumbuhan ekonominya meskipun kondisi ketimpangan tenaga profesionalnya masih sama. Provinsi Kalimantan Timur justru mengalami penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama satu dekade terakhir sehingga berpindah ke Kuadran IV dengan tingkat ketimpangan tenaga profesional yang masih tetap berada di atas nasional.

Gambar 58. Kuadran Growth Provinsi dan Ketimpangan Tenaga Profesional

		Ketimpangan Tenaga Profesional (2011)				Ketimpangan Tenaga Profesional (2020)	
		Di bawah nasional	Di atas nasional			Di bawah nasional	Di atas nasional
Growth (2011)	Di atas nasional	KUADRAN II Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Babel, Jatim, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut (15)	KUADRAN I Kepri, DKI, Jabar, Banten, Bali, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara (9)	Growth (Rata-Rata 2011-2020)	Di atas nasional	KUADRAN II Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, DIY, Jatim, Bali, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku (16)	KUADRAN I Kepri, DKI, Jabar, Banten, Kalbar, Kalteng, Kaltara, Malut (8)
	Di bawah nasional	KUADRAN III Aceh, Riau, Jateng, NTT, Sulut (5)	KUADRAN IV DIY, NTB, Kalbar, Papbar, Papua (5)		Di bawah nasional	KUADRAN III Aceh, Riau, Babel, Jateng, NTT, Kalsel (6)	KUADRAN IV NTB, Kaltim, Papbar, Papua (4)

Sumber: BPS (diolah)

4.3.5. Penyebab Umum Ketimpangan Gender dalam Aspek Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Ketimpangan gender dalam aspek ekonomi dan ketenagakerjaan secara umum mengalami perbaikan dari ke tahun meskipun belum begitu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa akses perempuan dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan sedikit demi sedikit mulai terbuka dan bahkan kapabilitas perempuan pun mulai diakui. Akan tetapi, dengan merebaknya pandemi Covid-19, beberapa indikator ketimpangan gender ada yang justru mengalami penurunan dan membutuhkan upaya ekstra untuk mengembalikannya ke jalur semula. Di sisi lain, dengan adanya pandemi Covid-19, juga justru menjadi pembuka jalan bagi peningkatan eksistensi dan partisipasi perempuan dalam aspek ekonomi dan ketenagakerjaan melalui berkembangnya ekonomi digital. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kondisi ketimpangan gender dalam aspek ekonomi dan ketenagakerjaan masih terjadi. Penyebab umum dari ketimpangan tersebut diantaranya disebabkan karena struktur sosial dan ekonomi, serta kesenjangan upah.

Stigma yang melekat pada perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik berimplikasi pada mundurnya perempuan dari pasar tenaga kerja saat mereka memiliki anak. Studi Prospera (2021) mengungkapkan bahwa perempuan yang memiliki anak cenderung berpartisipasi lebih sedikit pada pasar tenaga kerja dibandingkan perempuan lainnya dalam kelompok usia yang sama. Dengan struktur sosial yang berkembang, perempuan memiliki porsi besar dalam mengerjakan pekerjaan domestik dan pekerjaan tidak berbayar lainnya (*unpaid care work*). Pekerjaan tidak berbayar inilah yang merupakan hambatan terbesar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan pasar tenaga kerja sehingga berkorelasi dengan rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan sebagaimana diungkapkan oleh ILO. Bahkan, lebih lanjut diungkapkan pula bahwa perempuan menghabiskan waktu tiga kali lebih banyak dibanding laki-laki dalam *unpaid work* tersebut.

Menurut Bappenas (2021), selain isu gender yang terkait norma gender tradisional mengenai tugas dan tanggung jawab perempuan ketika menikah, memiliki anak, ataupun tinggal bersama lansia, terdapat faktor lain yang juga berpengaruh terhadap partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan, khususnya di sektor pekerjaan formal. Faktor tersebut adalah kebijakan atau regulasi dan kondisi di tempat kerja, misalnya pelanggaran terhadap hak pekerja perempuan, kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung perempuan bekerja, seperti fasilitas *daycare* dan ruang laktasi yang memadai, *flexible working hours*, cuti bersalin yang berbayar, dan cuti untuk ayah.

Di sisi lain, perempuan cenderung bekerja pada sektor-sektor yang berproduktivitas tidak terlalu tinggi antara lain seperti sektor jasa serta sektor penyediaan akomodasi dan perdagangan (KPPPA, 2018). Lebih lanjut, diungkapkan pula bahwa proporsi perempuan pada sektor yang produktivitasnya lebih tinggi tidak mencapai 10%. Selain itu, perempuan juga lebih banyak bekerja pada sektor informal yang output-nya tidak tercatat dalam statistik ekonomi. Hal ini pada akhirnya berdampak pada rumah tangga dengan perempuan sebagai pencari nafkah utama lebih banyak mengalami kehilangan pendapatan (75,1%) dibandingkan laki-laki (74,2%) (Bappenas, 2021). Adanya *stereotype* gender pada bidang pekerjaan tertentu juga turut membatasi partisipasi perempuan khususnya dalam bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, Mathematics*) dan bidang strategis lainnya terkait pengambilan keputusan dan keahlian.

Kesenjangan upah berbasis gender yang masih terjadi di Indonesia juga turut menjadi salah satu penyebab masih munculnya ketimpangan gender. Menurut ILO dan UN Women (2020), perempuan memiliki pendapatan 23% lebih rendah dibandingkan laki-laki. Bahkan, meskipun memiliki kapasitas yang sama, perempuan cenderung dibayar 20-30% lebih rendah (Bappenas, 2021). Sementara itu, ILO dan UN Women (2020) juga lebih jauh mengungkapkan bahwa pekerjaan manajerial dan penyelia yang bergaji tinggi pun didominasi oleh laki-laki. Upah yang diberikan kepada perempuan pun selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki meskipun berada dalam jenjang pendidikan yang sama. Dengan demikian, jenjang pendidikan juga menjadi salah satu isu ketenagakerjaan yang berdampak pada keahlian profesional tenaga kerja dan pada akhirnya berimplikasi pada besaran upah.

Lebih lanjut, perkembangan ekonomi digital yang semakin meningkat akan memberikan tantangan baru untuk menutup ketimpangan gender dalam aspek ekonomi dan ketenagakerjaan. Penggunaan internet dalam pekerjaan pada pekerja perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu sebesar 38,41% dibandingkan 61,59%. Penggunaan internet pun masih didominasi oleh lulusan universitas serta terkonsentrasi di Pulau Jawa dan wilayah barat Indonesia. Oleh karena itu, rantai bisnis perempuan masih belum cukup intens bersentuhan dengan teknologi informasi dan komunikasi serta literasi digital. Hal ini berisiko memperlebar ketimpangan gender dalam aspek ekonomi dan ketenagakerjaan apabila tidak dikelola dan diantisipasi dengan baik.

4.4. Situasi dan Distribusi Ketimpangan Gender di Bidang Politik dan Jabatan Publik

4.4.1. Keterlibatan Dalam Parlemen

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Indonesia pada beberapa tahun terakhir mulai memperlihatkan adanya peningkatan, meskipun ketimpangan dengan dominasi laki-laki masih cukup besar. Upaya untuk mendorong partisipasi perempuan di bidang politik terus didorong oleh pemerintah untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Peningkatan keterwakilan perempuan dilakukan dengan membuat peraturan bagi para partai politik peserta Pemilu untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu, DPR, DPD, dan DPRD yang sudah disempurnakan ke dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Partisipasi aktif perempuan pada legislatif juga terus didorong, dengan memberlakukan *zipper system*, yakni sistem yang mengatur bahwa setiap 3 (tiga) bakal calon parlemen terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan yang dicalonkan oleh tiap partai politik. Lebih lanjut lagi, untuk terus mendorong peran perempuan di bidang politik, pemerintah turut menyertakan prasyarat dalam suatu partai politik mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit sebesar 30% pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat.

Gambar 59. Proporsi Anggota Parlemen di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin

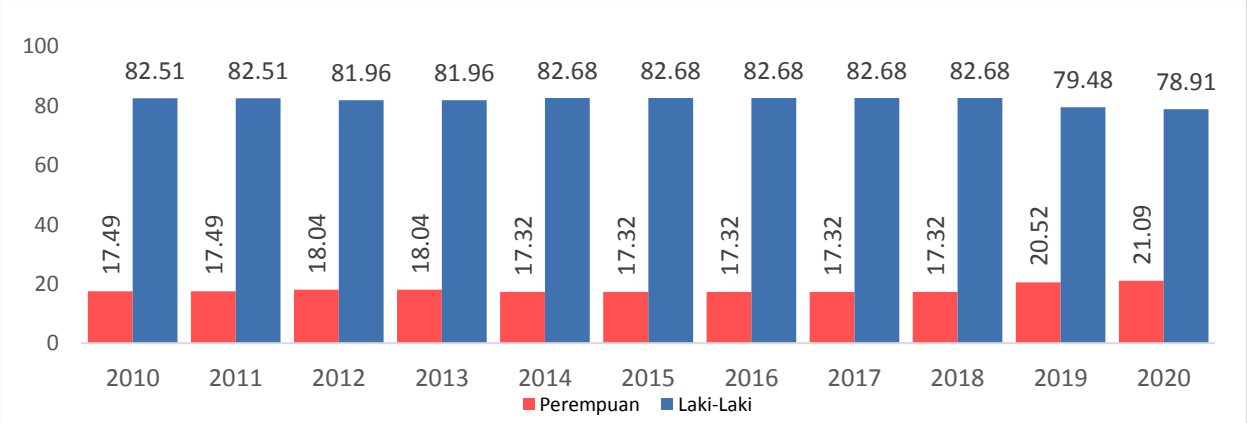

Sumber: BPS (2021)

Meskipun upaya peningkatan peran perempuan di bidang politik sudah didukung oleh berbagai kebijakan, namun representasi perempuan terutama di tingkat parlemen Indonesia masih belum mencapai target. Dari data hasil pemilu di tingkat DPR pusat memperlihatkan bahwa meskipun sudah diatur melalui Undang-Undang, tingkat partisipasi perempuan pada setiap pemilu masih belum mampu mencapai level 30%. Walaupun demikian, terlihat bahwa partisipasi perempuan secara umum mengalami peningkatan pada setiap tahun pemilu dan bahkan di tahun 2019 tercatat peningkatan dominasi perempuan di kursi legislatif pusat mampu mencapai di atas 20% dan jabatan ketua DPR Pusat diduduki oleh seorang perempuan untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah beserta *stakeholder* lainnya terus

berusaha untuk terus mengurangi ketimpangan gender di segala aspek, termasuk di bidang politik.

Gambar 60. Keterlibatan dalam Parlemen Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020

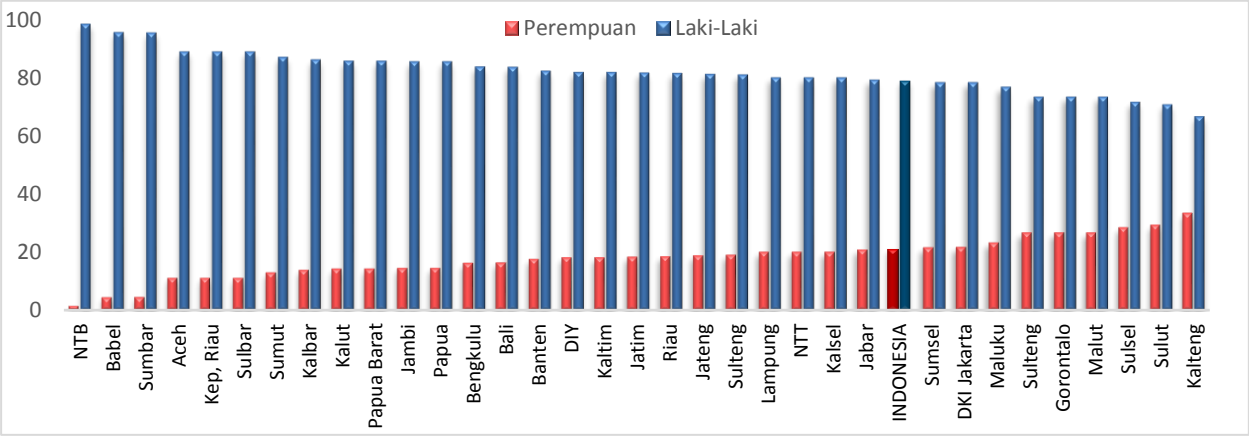

Sumber: BPS (2021)

Secara spasial, masih rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen tampak dengan masih tingginya ketimpangan di tiap provinsi. Hanya 9 (lima) provinsi yang ketimpangan di sektor politik yang lebih baik dari ketimpangan nasional, dimana sebagian besar provinsi tersebut berada di wilayah luar pulau Jawa, yakni provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Maluku, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Tengah. Bahkan, hanya ada satu provinsi yakni Kalimantan Tengah yang memiliki proporsi perempuan yang menduduki kursi di parlemen yang sudah di atas target pemerintah, yakni 33,33%. Sementara itu, provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki proporsi perempuan dalam parlemen yang terendah, yaitu hanya 1,56%. Dua provinsi lain juga memiliki keterlibatan perempuan di parlemen yang kurang dari 10%, yaitu provinsi Bangka Belitung (4,44%) dan Sumatera Barat (4,62%).

Gambar 61. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Keterwakilan di Parlemen

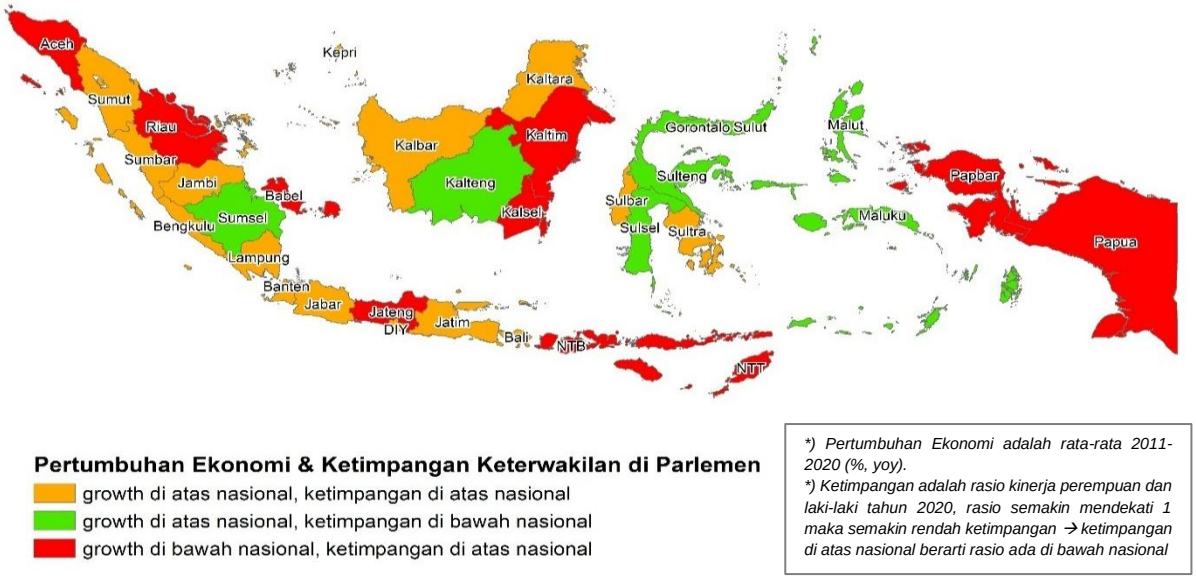

Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan pengelompokan daerah menurut pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan keterwakilan di parlemen selama kurun waktu tahun 2011 dan 2020, hasil pengolahan data menghasilkan pengelompokan 34 provinsi di Indonesia ke dalam tiga kuadran. Kesembilan provinsi yang memiliki ketimpangan lebih rendah dalam hal keterlibatan di parlemen dibandingkan ketimpangan level nasional juga memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, terdapat 10 provinsi yang perlu menjadi perhatian, karena memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional serta ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan nasional dalam hal keterlibatan di parlemen. Dari 10 provinsi tersebut, satu diantaranya berada di kawasan pulau Jawa, yakni provinsi Jawa Tengah, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian.

4.4.2. Partisipasi pada Sektor Pemerintahan dan Swasta

Partisipasi kepemimpinan perempuan pada sektor pemerintah di Indonesia juga memperlihatkan masih adanya ketimpangan yang cukup besar. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara, proporsi jumlah perempuan yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami peningkatan dalam beberapa tahun ini dan bahkan mulai mendominasi dibandingkan jumlah laki-laki mulai tahun 2017, dengan proporsi di tahun 2020 telah mencapai 52,22%. Hal ini memperlihatkan adanya peluang yang cukup besar bagi ASN perempuan untuk dapat menduduki suatu jabatan di lembaga pemerintahan sehingga diharapkan mampu merepresentasikan suara perempuan pada level ASN.

Gambar 62. Proporsi ASN Perempuan Berdasarkan Jenis Jabatan (% total per jabatan)

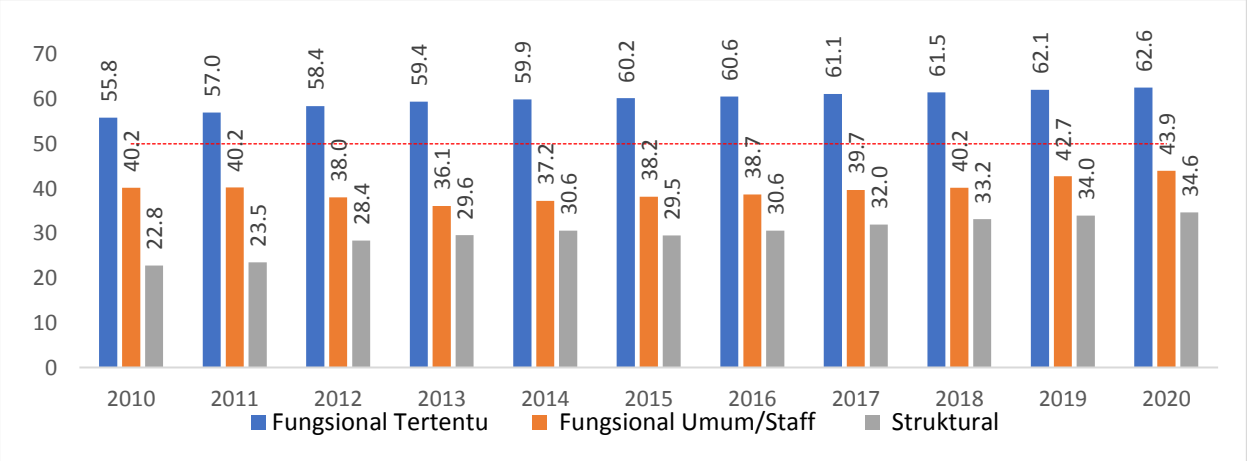

Sumber: BPS (2021)

Namun, banyaknya proporsi ASN perempuan dalam jumlah ASN keseluruhan tidak diimbangi dengan tanggung jawab jabatan struktural yang diberikan kepada ASN perempuan, meskipun saat ini ASN perempuan banyak yang berasal dari jenjang pendidikan minimal strata-1 yakni mencapai 69,1% dari total ASN perempuan. Dalam tiga jenis jabatan yang ada di struktur ASN, saat ini ASN perempuan lebih banyak mendominasi pada jabatan sebagai fungsional tertentu,

sementara untuk jabatan struktural dan fungsional umum (atau staf) masih didominasi oleh ASN laki-laki. Dari ketiga jenis jabatan tersebut, jabatan struktural merupakan jabatan yang paling sedikit diduduki oleh ASN perempuan dan kondisi ini tidak terlalu berbeda jauh jika dibandingkan pada beberapa periode sebelumnya meskipun secara tren dominasi perempuan pada jabatan struktural mulai mengalami peningkatan.

Gambar 63. Proporsi Perempuan di Jabatan Struktural ASN (% total per jabatan)

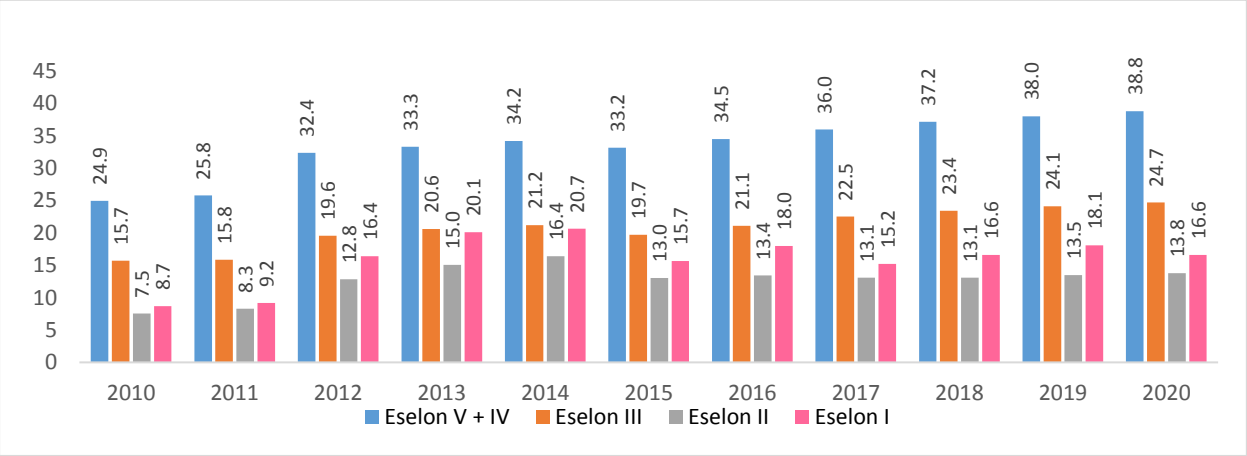

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (2021)

Lebih detail, dominasi perempuan pada jenjang jabatan di jabatan struktural lebih banyak terkonsentrasi pada jenjang struktural paling rendah, yakni pada jabatan eselon 5 dan eselon 4. Proporsi perempuan ini semakin mengecil terutama pada level struktural yang lebih tinggi, yakni pada jabatan eselon 2 dan eselon 1. Khusus untuk jabatan eselon 1 terlihat mengalami pergerakan yang fluktuatif jika dibandingkan dominasi pada tingkatan eselon lainnya, dan bahkan pada tahun 2020 dominasi ASN perempuan di tingkat eselon 1 mengalami penurunan, sementara jabatan pada tingkat eselon lainnya dalam tren peningkatan.

Sementara itu, peran kepemimpinan perempuan di sektor privat atau swasta juga masih memperlihatkan adanya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki baik yang terjadi secara global maupun di Indonesia. Dalam Global Gender Gap Index WEF mencatat bahwa peran perempuan hanya sekitar 27% dari total posisi managerial di seluruh dunia dan proporsi perempuan pada jabatan manajer senior hanya sebesar 41%. Ketimpangan peran perempuan yang menduduki jabatan managerial di Indonesia juga masih cukup besar. Berdasarkan data *Global Gender Gap Index* WEF di tahun 2020 memperlihatkan adanya pelebaran yang cukup signifikan pada porsi perempuan pada jabatan manager senior di Indonesia, dimana terjadi penurunan hampir setengah dari proporsi tahun 2019 menjadi sebesar 29,8% pada tahun 2020.

Gambar 64. Proporsi Jabatan Manajerial Berdasarkan Jenis Kelamin (%)

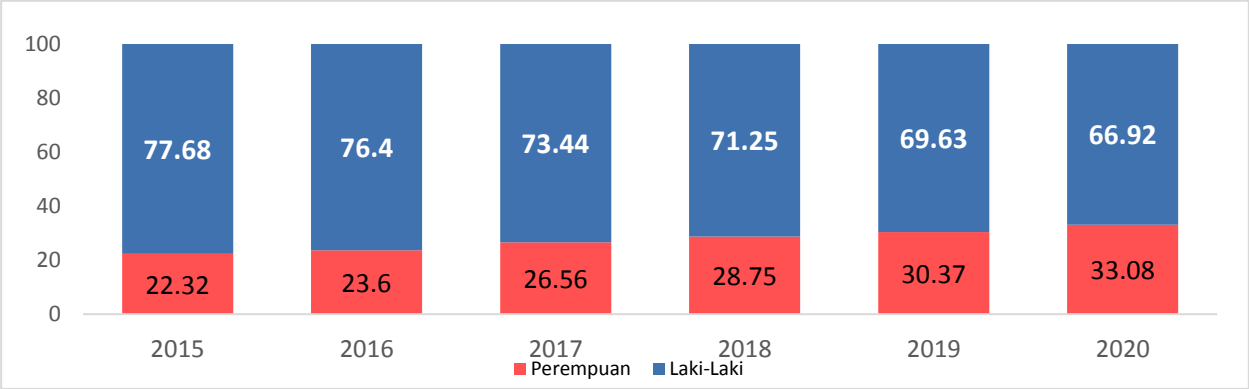

Sumber: BPS (2021)

Secara umum, partisipasi perempuan yang memegang jabatan managerial masih mengalami kesenjangan yang cukup signifikan dibandingkan laki-laki. Di tahun 2020, proporsi perempuan masih berada pada level 33,08% dari total jabatan managerial di sejumlah perusahaan. Meskipun demikian, proporsi perempuan secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan mulai adanya kemajuan untuk mengurangi ketimpangan pada jabatan managerial. Kemampuan perempuan dalam memegang jabatan managerial di sejumlah perusahaan mulai diperhitungkan sejalan dengan mulai meningkatnya kualitas perempuan, baik dari segi pendidikan maupun pengalaman dalam bekerja.

Gambar 65. Persentase Perusahaan dengan Manajerial Perempuan Berdasarkan Bidang Pekerjaan (%)

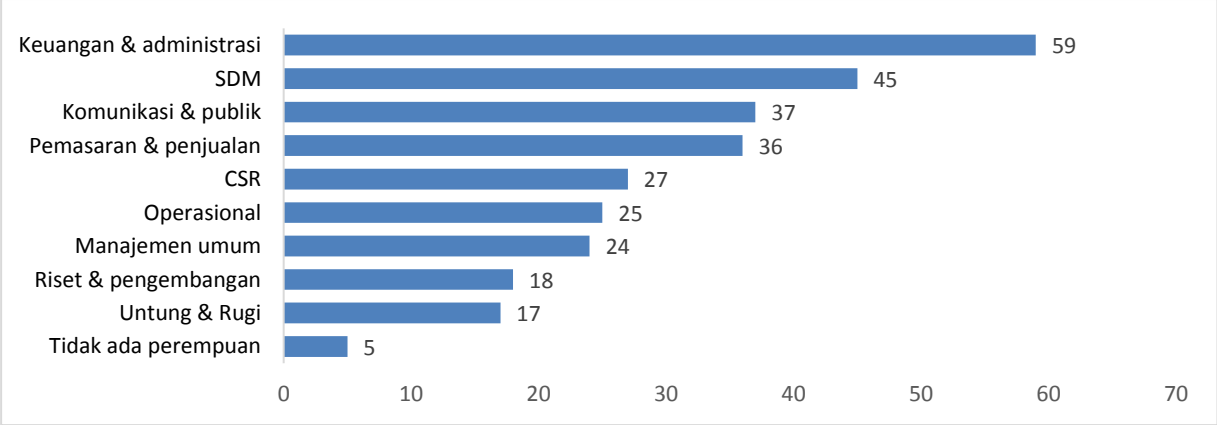

Sumber: ILO

Namun demikian, jika dilihat lebih dalam, berdasarkan data ILO memperlihatkan bahwa sebagian besar perusahaan menempatkan manajer perempuan pada bidang yang bersifat administrasi, seperti di bidang keuangan dan SDM, sementara itu, untuk bidang strategis dan yang bersifat *decision maker* masih didominasi oleh manajer laki-laki. Masih kurangnya jabatan managerial strategis yang dipegang oleh perempuan ini menandakan meskipun secara kualitas dan pengalaman kerja sudah dimiliki perempuan, namun masih terdapat keraguan di sejumlah perusahaan karena melihat adanya *stereotype* gender perempuan yang lebih mengedepankan emosi sehingga dikhawatirkan dapat berpengaruh negatif terhadap performa perusahaan.

4.4.3. Penyebab Umum Ketimpangan Gender dalam Aspek Politik dan Jabatan Publik

Berdasarkan hasil studi literatur, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan masih adanya ketimpangan gender yang terjadi di sektor politik maupun di pemerintahan dan swasta. Dari sisi politik, berbagai faktor eksternal dan internal menyebabkan masih tingginya ketimpangan gender dan kurangnya partisipasi perempuan di bidang politik. Dari sisi eksternal, perempuan dipandang masih memiliki kualitas yang lebih rendah jika dibandingkan laki-laki, dimana hal ini tidak terlepas dari masih melekatnya *stigma* dominasi laki-laki di bidang politik. Selain itu, perempuan lebih sering menghadapi berbagai masalah ketika akan masuk ke dalam ranah politik, baik dalam hal material maupun dari segi sosial untuk memenangkan pemilihan, sehingga hal ini turut menyebabkan perempuan enggan berpartisipasi dalam bidang politik.

Budaya patriaki yang melekat cukup kental di Indonesia turut menjadi salah satu faktor yang membuat perempuan kurang percaya diri untuk berpartisipasi dalam bidang politik (Kollo, 2017). Budaya patriarki ini memperlihatkan tingginya dominasi laki-laki sehingga perempuan merasa terdiskriminasi dan kurang dipercayai untuk maju ke panggung politik. Faktor eksternal lainnya adanya, masih tingginya resistensi dari para petinggi partai untuk membuka peluang bagi perempuan serta sikap yang cenderung meremehkan kemampuan politik perempuan (Wahyudi, 2018), sehingga saat ini sebagian besar posisi strategis dalam dunia politik masih banyak didominasi oleh oleh laki-laki. Dari sisi internal perempuan juga masih terdapat faktor yang mendorong kurangnya partisipasi perempuan di bidang politik, diantaranya karena masih adanya keterbatasan pendidikan perempuan sebagai dampak dari masih adanya ketimpangan di sektor pendidikan, masih minimnya jumlah perempuan yang berkualitas yang sudah berkecimpung di ranah politik, serta kurangnya minat perempuan yang mau untuk berkecimpung di bidang politik. (Wahyudi, 2018).

Sementara itu, keterlibatan perempuan dalam menduduki jabatan di ASN masih cukup rendah. Saat ini di lingkungan ASN sudah diterapkan konsep promosi jabatan dengan mengacu kepada sistem merit sebagaimana tertuang pada UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Konsep sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dengan sistem merit di manajemen sumber daya manusia ASN tersebut sebenarnya cukup membuka peluang bagi perempuan untuk dapat menduduki jabatan struktural, mengingat tidak adanya pembedaan gender dalam proses promosi jabatan. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan dalam penerapan konsep sistem merit ASN sehingga menyebabkan masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan struktural di level ASN, terutama disebabkan adanya kecenderungan ASN perempuan untuk lebih memprioritaskan keluarga dibandingkan karir dalam pekerjaan. Dengan semakin tinggi jabatan yang diemban maka konsekuensi beban pekerjaan juga meningkat sehingga menimbulkan kekhawatiran kurangnya fokus terhadap

keluarga dan pada akhirnya mendorong ASN perempuan lebih resisten terhadap promosi jabatan (hasil survey Cakra Wikara Indonesia, 2019). Promosi jabatan di pemerintahan yang menggunaan sistem merit cenderung masih bersifat netral gender (Bappenas, 2021). Selain itu, berdasarkan survey yang sama, memperlihatkan adanya beberapa pola promosi jabatan struktural yang mengharuskan untuk ASN perempuan tersebut dimutasi terlebih dahulu ke unit kantor vertikal, sehingga ASN perempuan enggan untuk promosi dengan alasan keluarga. Budaya partiarki juga masih cukup kuat di lingkungan birokrasi kementerian, seperti masih adanya insensivitas gender, kecenderungan meremehkan kemampuan perempuan, serta masih terjadi pelecehan verbal maupun nor-verbal terhadap perempuan. Selain itu, pembagian kerja politik jabatan juga masih cukup kental, terlihat dari minimnya perempuan dalam posisi strategis serta masih sedikit perempuan yang mengikuti *open bidding* (Cahyani, 2019).

Di sisi lain, peran perempuan dalam menduduki jabatan manajerial memang terlihat adanya peningkatan namun masih di bawah proporsi laki-laki. Hal ini menandakan mulai adanya kemajuan untuk mengurangi ketimpangan pada jabatan managerial sejalan dengan mulai meningkatnya kualitas perempuan yang mulai bekerja di sektor formal, terlihat dari sisi pendidikan maupun pengalaman kerja. Namun demikian, masih terdapat hambatan yang menyebabkan ketimpangan gender di jabatan managerial masih cukup tinggi, yakni masih terdapat keraguan di sejumlah perusahaan karena melihat adanya masalah *stereotype* gender perempuan yang lebih mengedepankan emosi sehingga dikhawatirkan dapat berpengaruh negatif terhadap performa perusahaan. Hal ini dikonfirmasi dari hasil survey yang dilakukan oleh ILO yang memperlihatkan masih minimnya peran perempuan di posisi yang lebih strategis, karena sebagian besar perempuan yang sudah menduduki jabatan managerial ditempatkan pada posisi bagian administrasi dan pengelolaan SDM.

4.5. Hasil Pemodelan Ekonometri

Pengaruh variabel-variabel terkait ketimpangan gender terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didapatkan dari hasil regresi data panel dengan model *fixed effect*, yang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Estimasi dengan Model Fixed Effect

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-statistic	P>|t|
RRLS	**0.0431892***	0.0173977	2.48	**0.014***
RHLS	0.0018136	0.0127543	0.14	0.887
RKK	0.0045214	0.0052507	0.86	0.390
RUHH	-0.160544	0.3613476	-0.44	0.657
RPPK	0.0021183	0.0070775	0.30	0.765
RTP	-0.0005762	0.0027283	-0.21	0.833
RSP	**0.0771981****	0.0142299	5.43	**0.000****
RTPAK	-0.004711	0.0055461	-0.85	0.396
F-statistic	27.98			0.0000
R-squared	0.4064			
Observations	369			

Keterangan	*signifikan pada α = 5% ; **signifikan pada α = 1%
RRLS = Rasio Rata-rata Lama Sekolah RHLS = Rasio Harapan Lama Sekolah RKK = Rasio Keluhan Kesehatan RUUH = Rasio Umur Harapan Hidup	RPPK = Rasio Pengeluaran Per Kapita RTP = Rasio Tenaga Profesional RSP = Rasio Sumbangan Pendapatan RTPAK = Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari taraf signifikansi α = 1%, yang berarti bahwa kesemua variabel bebas *(independent)* mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat *(dependent)*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan, ketimpangan gender dalam kesehatan, ketimpangan gender dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB.

Adapun apabila dilihat secara parsial berdasarkan hasil Uji T, terdapat dua variabel bebas *(independent)* yang probabilitasnya lebih kecil dari taraf signifikansi, yaitu Rasio Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) dan Rasio Sumbangan Pendapatan (RSP), sehingga kedua variabel tersebut signifikan mempengaruhi PDRB. Dengan demikian, secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan dari ketimpangan gender dalam pendidikan dan ketimpangan gender dalam ekonomi terhadap PDRB. Nampak bahwa apabila RRLS naik sebesar 1 persen maka secara signifikan akan mempengaruhi kenaikan PDRB sebesar 0,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil celah perbedaan rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan maka perekonomian daerah dan juga secara nasional akan semakin baik. Hal ini semakin menguatkan pentingnya menurunkan ketimpangan kesempatan menempuh pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Adapun apabila RSP naik sebesar 1 persen maka PDRB akan naik sebesar 0,08 persen. Hal ini juga berarti bahwa bila ketimpangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil, maka perekonomian daerah dan nasional akan lebih baik. Hal ini mengisyaratkan bahwa diskriminasi dalam kesempatan memperoleh pekerjaan yang berkualitas dan produktif serta mendapatkan upah yang setara antara laki-laki dan perempuan haruslah segera ditangani.

4.6. Daerah Prioritas Penanganan Ketimpangan Gender dan Karakteristiknya

Berdasarkan hasil analisis spasial yang membagi 34 provinsi ke dalam empat kuadran berdasarkan kondisi ketimpangan gender pada setiap indikator dan pertumbuhan ekonomi rata-rata selama 10 tahun terakhir, didapatkan bahwa secara spasial setiap provinsi memiliki kondisi yang beragam. Terdapat 10 provinsi yang memiliki indikator ketimpangan gender di atas ketimpangan nasional disertai pertumbuhan ekonomi rata-rata 10 tahun terakhir berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional (yang ditunjukkan oleh warna merah pada Gambar 66), yaitu Papua, Papua Barat, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, Jawa Tengah, Riau, Bangka Belitung, NTT. Sementara itu, provinsi-provinsi lainnya memiliki indikator ketimpangan

gender di atas ketimpangan nasional, namun pertumbuhan ekonominya berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional selama rata-rata 10 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil literatur review, normal sosial gender dan faktor budaya patriarki menjadi persoalan paling mendasar yang harus ditangani di seluruh wilayah. Berbagai aspek kesenjangan gender pada dasarnya berangkat dari pengaruh norma sosial budaya terkait stereotype dan peran gender yang mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, hingga pengambilan keputusan. Isu kelembagaan PUG di daerah juga merupakan isu generik yang terjadi hampir di seluruh provinsi dan kab/kota, yang meliputi lemahnya komitmen pimpinan, turn over SDM yang tinggi, kapasitas SDM yang terbatas, hingga belum tersedianya data terpilah. Selain itu, keterbatasan APBD dalam hal perencanaan dan penganggaran untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga menjadi isu generik di seluruh daerah.

Lebih lanjut, kajian ini akan berfokus untuk menganalisis karakteristik ketimpangan gender pada beberapa provinsi yang paling banyak memiliki indikator ketimpangan gender yang berada di atas ketimpangan nasional. Provinsi yang paling banyak memiliki indikator ketimpangan gender di atas ketimpangan nasional dan rata-rata pertumbuhan ekonominya berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional adalah provinsi Papua, Papua Barat, dan NTB. Kemudian provinsi yang paling banyak memiliki indikator ketimpangan gender di atas ketimpangan nasional namun rata-rata pertumbuhan ekonominya berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional adalah provinsi Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Tengah. Berdasarkan karakteristiknya, ketujuh provinsi tersebut direkomendasikan sebagai daerah prioritas penanganan ketimpangan gender.

Gambar 66. Ringkasan Ketimpanga Gender dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi

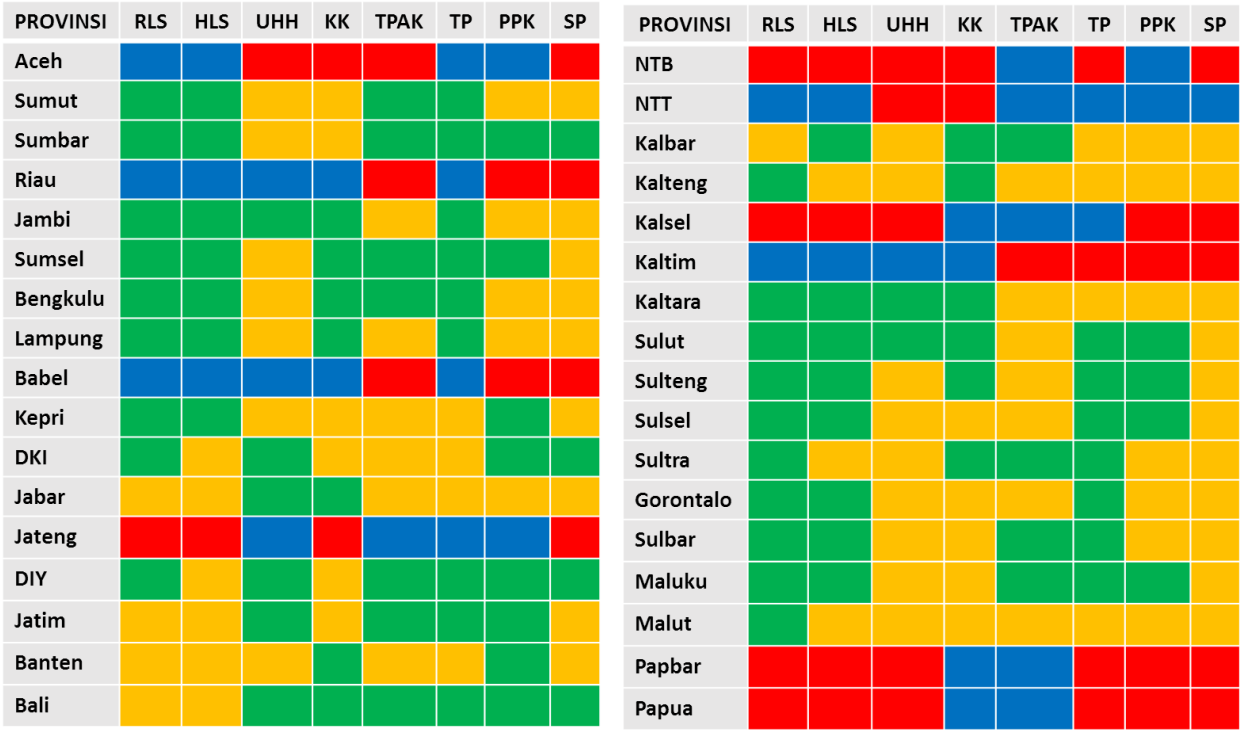

Keterangan:

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah; **HLS** = Harapan Lama Sekolah; **UHH** = Usia Harapan Hidup; **KK** = Keluhan Kesehatan; **TPAK** = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; **TP** = Tenaga Profesional; **PPK** = Pengeluaran Per Kapita; **SP** = Sumbangan Pendapatan	**ketimpangan di atas nasional**, pertumbuhan ekonomi di bawah nasional **ketimpangan di atas nasional**, pertumbuhan ekonomi di atas nasional ketimpangan di bawah nasional, pertumbuhan ekonomi di atas nasional ketimpangan di bawah nasional, pertumbuhan ekonomi di bawah nasional	*) Pertumbuhan Ekonomi adalah rata-rata 2011-2020 (%, yoy). *) Ketimpangan gender adalah rasio kinerja perempuan dan laki-laki tahun 2020; rasio semakin mendekati 1 maka semakin rendah ketimpangan.

Sumber: Pengolahan Data

4.6.1. Papua dan Papua Barat

Pada provinsi Papua dan Papua Barat, sebanyak 6 (enam) indikator menunjukkan ketimpangan yang lebih tinggi dibanding ketimpangan nasional, yaitu Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Umur Harapan Hidup, Tenaga Profesional, Pendapatan Per Kapita, dan Sumbangan Pendapatan. Karakteristik ketimpangan gender yang mendasar di Papua dan Papua Barat dapat dilihat dari aspek norma gender, pendidikan, ekonomi, serta penganggaran dan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).

Diskriminasi dan kesenjangan gender di Papua dan Papua Barat terjadi karena semua aspek kehidupan didominasi oleh laki-laki. Dari aspek norma gender, masyarakat Papua dan Papua Barat pada umumnya menganut sistem budaya patriarki, yang membedakan posisi, otoritas, serta peran laki-laki dan perempuan di ranah domestik maupun di ruang publik. Perempuan ditempatkan dalam subordinasi di bawah dominasi laki-laki. Peran publik laki-laki adalah menangani acara adat dan perang, sementara peran domestik perempuan adalah mengurus kebun, ternak, rumah tangga, dan mengasuh anak. Namun, kini perang tidak terjadi, adat memudar, dan laki-laki tidak berfungsi sebagai pencari nafkah. Walau terjadi disfungsionalisme struktural, laki-laki tetap ingin dilayani istri. Dominasi patriarki kian menindas, menimbulkan ketidakadilan gender, dan bermuara pada kekerasan perempuan seperti kekerasan fisik, seksual, emosional, verbal, psikologis, ekonomi, serta intimidasi dan ancaman. Kekerasan perempuan ini bervariasi, namun merata atau membudaya di banyak keluarga (You, et al, 2019). Kentalnya budaya partriaki ini sangat mempengaruhi kehidupan perempuan di Tanah Papua. Selain itu, sebagaimana yang umum terjadi di Kawasan Timur Indonesia, sistem kekerabatan (marga atau suku) memegang peranan penting sebagai unit kesatuan masyarakat, sedangkan peran keluarga inti tidak independen (Puspitawati, 2008). Hal ini turut mempengaruhi pembagian peran gender yang berbasis adat.

Di bidang pendidikan, perempuan di Papua memiliki rata-rata lama sekolah terendah di Indonesia, yaitu hanya 5,88 tahun, dan laki-laki hanya 7,43 tahun (BPS, 2020). Berdasarkan Tim Peneliti Indonesia Governance Index (IGI), anak perempuan di Papua cenderung lebih cepat 1,5

tahun untuk putus sekolah dibandingkan anak laki-laki. Secara nasional, tren anak perempuan lebih cepat putus sekolah juga memang terjadi. Namun, selisih waktu putus sekolah antara anak perempuan dan laki-laki di tingkat nasional "hanya" setengah tahun. Rata-rata nasional, anak laki-laki menempuh pendidikan selama 8 tahun sebelum putus sekolah, sementara anak perempuan 7,5 tahun. Apabila dibandingkan dengan kondisi yang terjadi di level nasional, kesenjangan bidang pendidikan di Papua terindikasi masih cukup tinggi.

Kondisi geografis Papua dengan cakupan wilayah remote area yang luas dengan akses transportasi dan informasi yang terbatas, serta norma budaya setempat merupakan salah satu faktor penyebab anak perempuan di Papua putus sekolah (Vetaroy, 2019). Fasilitas pendidikan terbatas dan sulit dicapai, dimana banyak siswa harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapainya atau meninggalkan daerahnya untuk dapat menempuh pendidikan. Pada lingkungan masyarakat yang masih tradisional, umumnya orangtua akan segan untuk mengirimkan anak perempuannya ke sekolah yang jauh karena mengkhawatirkan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu banyak anak perempuan yang terpaksa tinggal di rumah. Belum lagi beban tugas rumah tangga yang banyak dibebankan pada anak perempuan. Akumulasi dari faktor-faktor ini mengakibatkan banyak anak perempuan di Papua meninggalkan bangku sekolah.

Selain itu, Program wajib belajar 12 tahun belum berjalan optimal, terutama di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, Angka angka putus sekolah siswa SD hingga SMP paling banyak berada di 15 kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah Papua, di antaranya Lanny Jaya, Tolikara, Yalimo, Jayawijaya, Puncak, dan Puncak Jaya. Kondisi tersebut juga menyebabkan angka buta huruf di Papua masih tinggi. Siswa putus sekolah biasanya berdomisili di pedalaman yang minim akses transportasi. Minimnya akses dan sarana transportasi membuat anak-anak kesulitan menjangkau sekolah. Sementara rata-rata sekolah terletak di ibu kota distrik (setingkat kecamatan). Jarak ideal sekolah dengan rumah siswa seharusnya maksimal 3 kilometer. Namun, di pedalaman Papua, jarak kampung ke sekolah bisa mencapai puluhan kilometer. Para siswa berangkat dari rumah pagi hari dan tiba di sekolah siang hari. Kondisi tersebut tentunya lebih menyulitkan bagi anak perempuan. Penyediaan sekolah berasrama di pusat distrik dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan partisipasi wajib belajar di sekolah.

Dari sisi ekonomi, perempuan Papua dan Papua Barat, atau sering disebut “mama-mama Papua”, merupakan penggerak ekonomi khususnya di pertanian, dimana kontribusinya relatif besar di atas 60%. Mereka memperoleh pendapatan dari menjual sayur hasil berkebun. Berbeda dengan laki-laki yang memiliki akses dan kesempatan untuk bekerja di perkebunan yang berskala lebih besar, seperti industri kayu (penggergajian kayu) dan pertambangan. Di pasar-pasar tradisional Papua, mayoritas kegiatan di pasar dipegang oleh perempuan. Berbeda dengan perempuan pendatang yang menjual rupa-rupa produk, mama-mama Papua umumnya berjualan

pinang, sayur-mayur dan umbi-umbian dan bersifat subsisten. Tidak jarang mereka harus berhadapan dengan pola ekonomi pasar yang “memaksa” mereka beradaptasi, misalnya dengan menyewa kios di pasar, akses terhadap lembaga keuangan, dan sebagainya, yang tidak selalu sejalan dengan kemampuan ekonomi mereka. Selain itu, walaupun perempuan Papua dan Papua Barat adalah pemain utama dalam perekonomian, namun pengakuan atas kerja ekonomi maupun dukungan pengembangan dan pemberdayaannya masih terbatas (UNDP, 2012). Hal ini berpengaruh terhadap kualitas hidup perempuan di tanah Papua yang pada umumnya relatif jauh tertinggal dibandingkan dengan perempuan daerah lain di Indonesia.

Kemudian dilihat dari aspek penganggaran, Pemerintah Provinsi Papua menilai komitmen Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam pengaplikasian Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) masih rendah. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan PPRG masih belum optimal sehingga kurang tersedianya data terpilah gender pada seluruh SKPD. Perencanaan dan penganggaran kegiatan di Papua belum sepenuhnya mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender di dalam kebijakan dan program kerjanya. Akibatnya, program dan kegiatan yang disusun masih netral gender bahkan tak menutup kemungkinan untuk bias gender. Hal ini dikarenakan masih lemahnya pemahaman tentang isu gender di kalangan para perencana program dan kegiatan. Kesenjangan alokasi anggaran bagi kebutuhan kelompok perempuan masih menjadi pengalaman empirik perempuan di Papua. Tidak adanya perspektif gender dari para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan tidak adanya perhatian terhadap kebutuhan kelompok perempuan.

Secara umum, daerah-daerah di Provinsi Papua sudah melakukan penganggaran yang dialokasikan untuk perempuan meskipun banyak yang masih tergolong kecil. Menurut Sandila, et al (2020), daerah dengan indeks persentase alokasi APBD untuk perempuan paling besar adalah Kabupaten Deiyai, yang menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Deiyai memiliki kesadaran lebih terhadap pemberdayaan perempuan dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Papua. Daerah dengan indeks paling rendah adalah Kabupaten Biak Numfor, Mappi, Yalimo, dan Puncak, yang menunjukan bahwa Pemerintah Daerah setempat masih belum melakukan penganggaran yang lebih untuk pemberdayaan perempuan. Hal yang dapat terjadi jika APBD yang dialokasikan untuk perempuan kurang yaitu adanya bias dan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

4.6.2. Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan indikator ketimpangan dari sisi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki skor IDG yang paling rendah pada tahun 2020 yakni hanya sebesar 51,96. Rendahnya tingkat IDG di provinsi Nusa Tenggara Barat ini terutama disebabkan oleh persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen yang paling rendah, dimana saat ini hanya ada 1 anggota perempuan dari total 65 kursi di DPRD. Hal ini menyebabkan keterlibatan

perempuan dalam parlemen turun signifikan di tahun 2019-2020, yakni hanya sebesar 1,52% - 1,54%, dimana pada periode tahun 2010 hingga 2018 berada pada level 9 – 10%. Selain itu, komponen ekonomi dan ketenagakerjaan yang direpresentasikan oleh sumbangan pendapatan perempuan dan tenaga profesional perempuan juga masih berada di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, berdasarkan indikator ketimpangan yang digunakan dalam menghitung Indeks Pembangunan Gender (IPG), IPG provinsi Nusa Tenggara Barat dalam tren meningkat dari tahun ke tahun meskipun masih di bawah rata-rata nasional.

Sebagian besar indikator ketimpangan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat memperlihatkan ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan nasional. Sebanyak 6 (enam) indikator termasuk ke dalam kategori yang memiliki ketimpangan di atas nasional, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, Keluhan Kesehatan, Tenaga Profesional, serta Sumbangan Pendapatan. Sementara itu, hanya ada dua indikator yang relatif lebih baik dibandingkan ketimpangan nasional, yakni indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Pengeluaran Per Kapita. Dapat disimpulkan dari indikator ketimpangan yang cukup besar terjadi di sektor pendidikan dan kesehatan, sementara ketimpangan di sektor ekonomi relatif lebih baik. Pembahasan karakteristik ketimpangan gender yang mendasar di provinsi Nusa Tenggara Barat akan dilihat dari aspek pendidikan dan norma gender, kesehatan, ekonomi, serta penganggaran dan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).

Tingginya ketimpangan gender dari sisi aspek pendidikan secara umum disebabkan oleh masih rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Hasil survey yang dilakukan oleh UNICEF memperlihatkan hanya 39 % anak SD mampu mencapai ambang batas nasional minimum dalam kemampuan membaca dan 19 % anak dalam kemampuan matematika. Kondisi ketimpangan di sektor pendidikan tersebut diperparah dengan masih kentalnya budaya patriarki yang dianut masyarakat, sehingga hal ini turut membatasi akses perempuan dalam memperoleh pendidikan. Selain itu, masyarakat Sasak sebagai suku terbesar di pulau Lombok (yang merupakan pulau terbesar di provinsi Nusa Tenggara Barat) mengantut sistem patrilineal, yakni menarik garis keturunan pihak laki-laki. Dengan adanya sistem patrilineal ini turut mendorong melekatnya budaya patriarki sehingga anak laki-laki akan menjadi prioritas pertama dalam mengakses pendidikan (Nursaptini,2019). Dari aspek pendidikan, apabila dalam suatu keluarga masih ada anak laki-laki maka ialah yang akan mendapatkan prioritas untuk mengenyam pendidikan (Nasir & Lilianti, 2017).

Dari sisi ketimpangan di sektor kesehatan, tingginya ketimpangan pada aspek kesehatan ini salah satunya disebabkan oleh masih tingginya tingkat keluhan kesehatan yang dialami oleh perempuan di Nusa Tenggara Barat, bahkan rasio tingkat keluhan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di tahun 2020. Di sisi lain, berdasarkan survey UNICEF terlihat bahwa akses terhadap proses persalinan di Nusa Tenggara Barat mencapai 93% kelahiran sudah dibantu oleh tenaga kesehatan, dimana hal ini memperlihatkan kecenderungan kematian

perempuan saat proses melahirkan sudah relatif kecil. Namun demikian, jika dilihat dari layanan kesehatan reproduksi masih perlu ditingkatkan, terutama akses alat kontrasepsi modern. Kurangnya penggunaan alat kontrasepsi disebabkan beberapa faktor, beberapa diantaranya adalah masih kurangnya pengetahuan laki-laki di Nusa Tenggara Barat terhadap program Keluarga Berencana (KB), masih adanya keterbatasan distribusi alat kontrasepsi modern bagi laki-laki di provinsi Nusa Tenggara Barat, serta masih kentalnya budaya patriarki sehingga hal ini turut memaksa perempuan untuk tunduk kepada laki-laki (Permono, 2020).

Sementara itu, jika dilihat dari aspek ekonomi, ketimpangan di Nusa Tenggara Barat relatif lebih baik karena berada di bawah ketimpangan nasional. Hal ini salah satunya ditopang oleh rendahnya ketimpangan dari sisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sebagian besar perempuan di Nusa Tenggara Barat memiliki peran ganda dalam rumah tangga dan komitmen mereka untuk aktif di dalam pasar kerja. Namun, pekerja perempuan tersebut cenderung akan memilih untuk keluar dari pasar kerja sementara waktu ketika memasuki masa perkawinan, melahirkan dan membesarkan anak dan kemudian akan kembali ke dunia kerja ketika anak sudah besar (Kusuma, 2017). Meskipun angka TPAK di Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan cukup baik, namun sebagian sektor pekerja tersebut masih terpusat di sektor informal terutama di sektor pertaninan, yang sebagian besar bekerja untuk mengolah lahan pertanian milik keluarga sendiri. Perempuan pedesaan di Nusa Tenggara Barat tersebut bekerja untuk membantu suami karena rendahnya pendapatan keluarga, sehingga banyak angkatan kerja perempuan yang berstatus menjadi pekerja keluarga tidak dibayar. (Kusuma, 2017). Ditambah lagi, tingkat pendidikan perempuan banyak didomininasi oleh pendidikan rendah, yaitu SD maupun tidak tamat SD sehingga hal ini juga turut menyebabkan masih rendahnya kualitas TPAK di provinsi Nusa Tenggara Barat (Permono, 2020).

Isu lain yang juga mengemuka terkait ketimpangan gender di provinsi Nusa Tenggara Barat adalah isu perkawinan anak. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia setelah provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perkawinan anak merupakan permasalahan multidimensi yang memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi dan ketenagakerjaan. Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan angka perkawinan anak, yaitu dari 16,09% pada tahun 2019 menjadi 16,1% pada tahun 2020.

Dari sisi penganggaran, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan telah memiliki komitmen yang cukup besar untuk mengurangi ketimpangan gender, dimana hal ini terlihat dari adanya Peraturan Gubernur No. 39 tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Daerah Nusa Tenggara Barat serta tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 – 2023, yang secara eksplisit menyebutkan salah satu misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah mempercepat perwujudan masyarakat madani yang beriman dan

berkarakter dengan prinsip dasar menghargai kemanusiaan, keberagaman, dan kesetaraan gender yang proporsional. Meskipun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Jmemiliki *political will* terhadap anggaran yang responsif gender melaluI regulasi dan misi pembangunan yang ditetapkannya, namun terlihat belum maksimal dalam perencanaan dan implementasi anggaran (Kadri, 2020). Hal ini terlihat dari nilai anggaran bagi dinas yang bertugas memberdayakan perempuan hanya sekitar 0.23 % dari APBD, yang menunjukkan komitmen yang rendah untuk menjadikan program pemberdayaan perempuan sebagai program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kadri, 2020). Selain itu, komunikasi lebih banyak berlangsung secara internal pemerintahan, sementara komunikasi eksternal dengan *stakeholder* yang memiliki kompetensi di bidang pemberdayaan perempuan masih minim, sehingga hal ini menyebabkan masih terbatasnya informasi program kesetaraan gender kepada khalayak umum (Kadri, 2020).

4.6.3. Maluku Utara

Maluku Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki cukup banyak indikator ketimpangan gender yang berada di atas rata-rata nasional, meskipun provinsi ini memiliki pertumbuhan ekonomi di atas nasional selama rata-rata sepuluh tahun terakhir. Di masa pandemi Covid-19, Maluku Utara tetap dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya di sejumlah sektor dan mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat baik di triwulan IV 2020, yaitu sebesar 9,48% (yoy), sehingga menjadi salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif tertinggi di Indonesia. Pertumbuhan yang tinggi terutama didukung oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan komoditas nikel.

Meninjau masalah ketimpangan gender, dari delapan indikator ketimpangan gender yang digunakan dalam penelitian ini, sebanyak tujuh indikator di Maluku Utara ketimpangannya berada di atas rata-rata nasional, yang dijumpai baik pada aspek pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi dan ketenagakerjaan. Sebagai provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, Maluku Utara memiliki Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang masih berada di bawah rata-rata nasional dan cenderung stagnan selama beberapa tahun terakhir. Provinsi Maluku Utara hanya lebih baik dalam aspek keterlibatan perempuan di parlemen, dimana hal ini tercermin dari tingginya angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Maluku Utara yang nilainya terus mengalami peningkatan dan berada di atas nasional, yaitu menempati peringkat ke-3 di Indonesia pada tahun 2020.

Kondisi geografis Maluku Utara menjadi salah satu tantangan yang diindikasikan berpengaruh terhadap ketimpangan gender di provinsi tersebut. Maluku Utara merupakan daerah kepulauan dengan banyak pulau yang masuk dalam kategori 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan). Kondisi ini menyebabkan distribusi akses dan infrastruktur yang kurang baik antar daerah, padahal pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan merupakan salah satu aspek utama

dalam pencapaian kesetaraan gender. Sebagai contoh adalah Pulau Morotai yang merupakan salah satu pulau terbesar di Maluku Utara yang masuk ke dalam kategori 3T. Pulau Morotai memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah serta potensi pariwisata. Hal tersebut merupakan salah satu pendorong ditetapkannya KEK Morotai sejak tahun 2014 sebagai target destinasi wisata dan untuk menarik investasi, serta sumber bahan baku industri pengolahan perikanan sehingga dapat mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah tersebut. Namun, Pulau Morotai memiliki IPG terendah di Maluku Utara selama satu dekade terakhir yang tampak juga pada rendahnya IPM dan kualitas hidup masyarakatnya. Di sisi lain, Maluku Utara juga merupakan salah satu daerah multikultural di Indonesia yang memiliki sekitar 34 etnis dengan budaya masing-masing yang tinggal baik di perkotaan maupun pedesaan dengan peran gender yang berbeda (Nainggolan, 2020). Hal tersebut dapat berkontribusi terhadap perbedaan peran dan partisipasi baik perempuan maupun laki-laki dalam ekonomi dan ketenagakerjaan.

Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Maluku Utara per Agustus 2020 mengalami perbaikan dibandingkan periode Februari 2020 meskipun masih berada di bawah periode Agustus 2019 yang merupakan level sebelum pandemi Covid-19. Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)-nya mengalami peningkatan menjadi 5,15%, dari 4,26% pada Semester I 2020 sebagai dampak dari meluasnya penyebaran pandemi Covid-19 yang menyebabkan tumbangnya sejumlah sektor usaha. Pada umumnya perempuan di Maluku Utara telah berpartisipasi aktif dalam aktivitas perekonomian. Selama periode 2010-2019, TPT perempuan Maluku Utara selalu berada di atas laki-laki. Namun, pada tahun 2020 terjadi pembalikan karena TPT perempuan menjadi lebih kecil dari laki-laki yang kemungkinan merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Tenaga kerja perempuan di Maluku Utara cenderung bekerja di sektor pertanian yang memang merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi.

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara beberapa tahun terakhir terutama didorong oleh kinerja sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan (BI, 2021). Sementara itu, Sektor informal saat ini masih menjadi tumpuan mayoritas penduduk di Maluku Utara (66,13%) sehingga sebagian besar perempuan pun juga masih bekerja pada sektor informal dengan besaran upah yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki (BPS, 2020). Rendahnya tingkat pendidikan perempuan dan intensitas pada sektor jasa yang tidak memerlukan keterampilan khusus berdampak pula pada upah yang rendah (Nainggolan, 2020).

Dari aspek pendidikan, Maluku Utara hampir mencapai akses universal terhadap pendidikan dasar, namun kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama. Hanya seperempat anak sekolah dasar mampu mencapai ambang batas nasional minimum dalam kemampuan membaca dan 14% anak dalam kemampuan matematika (UNICEF). Secara spesifik, kualitas pendidikan perempuan di Maluku Utara masih lebih rendah dibandingkan laki-laki yang diantaranya terlihat dari rata-rata lama sekolah penduduk perempuan dengan usia lebih dari 25 tahun yang lebih

singkat dibandingkan laki-laki (BPS, 2020). Selain itu, perempuan juga menikmati pendidikan lebih pendek satu tahun dibandingkan laki-laki, yaitu selama 8,61 tahun atau setingkat kelas 2 pada sekolah menengah pertama. Namun, mayoritas penduduk perempuan hanya memiliki ijazah SD ke bawah. Meskipun demikian, angka partisipasi sekolah perempuan pada tahun 2020 untuk kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun sudah lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di samping itu, alokasi APBD untuk pendidikan di provinsi Maluku Utara pun masih tergolong rendah, yaitu sebesar 13,47% (Maharti et al., 2019).

Dari sisi kesehatan, kualitas layanan Kesehatan Maluku Utara semakin membaik dengan semakin meningkatnya umur harapan hidup penduduk selama sepuluh tahun terakhir. Meskipun demikian, angka kematian ibu dan kematian neonatal masih tinggi, sejalan dengan rendahnya angka persalinan dibantu nakes (UNICEF). Isu ini sebenarnya telah diantisipasi oleh Pemerintah Maluku Utara dengan mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan dan pendidikan perempuan antara lain untuk menurunkan Angka Kematian Ibu serta meningkatkan kesehatan reproduksi untuk perempuan di Maluku Utara (Alfana et al., 2020). Namun, alokasi APBD provinsi Maluku Utara untuk mendukung kesejahteraan perempuan masih relatif kecil, yaitu berkisar 0,19%-0,58% dari total APBD.

4.6.4. Jawa Barat dan Banten

Pada provinsi Jawa Barat dan Banten, sebanyak 6 (enam) indikator menunjukkan ketimpangan yang lebih tinggi dibanding ketimpangan nasional. Untuk Jawa Barat, ketimpangan lebih tinggi dibanding nasional terjadi pada Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tenaga Profesional, Pengeluaran Per Kapita, dan Sumbangan Pendapatan. Sementara ketimpangan di Banten terlihat pada Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tenaga Profesional, dan Sumbangan Pendapatan. Berdasarkan karakteristik, ketimpangan gender yang terjadi di Jawa Barat dan Banten dapat dilihat dari aspek norma gender, pendidikan, ekonomi, serta penganggaran dan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).

Peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat Sunda mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Di masa lalu, perempuan menempati kedudukan tinggi dan bahkan lebih tinggi dari laki-laki (matriarkhi). Hal ini tergambar dalam berbagai mitologi Sunda yang menempatkan perempuan pada kedudukan yang terhormat, sebagaimana *Dayang Sumbi, Sunan Ambu,* dan *Sri Pohaci*. Kedudukan, harkat, dan martabatnya tidak berada di bawah kekuasaan laki-laki, bahkan dalam hal-hal tertentu menduduki tempat strategis dalam kerangka melahirkan seorang manusia yang berkualitas (Heryana, 2012). Dalam perkembangannya, terjadi pergeseran dari sistem matriarkhi ke patriarki, yang dinyatakan Isti'anah (2020) berdasarkan beberapa sumber literatur bermula dari pengaruh budaya luar yang masuk dalam kehidupan masyarakat Sunda.

Budaya patriarki inilah yang kemudian membentuk kehidupan sosial yang masih dapat dirasakan hingga saat ini.

Sementara itu di Banten yang menjadi provinsi independen di Indonesia sejak tahun 2000, lebih dikenal sebagai daerah yang religius. Pada zaman dahulu, Banten dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam di pulau Jawa, yakni Kesultanan Banten, yang kental dengan nilai-nilai dan budaya Islam. Religiusitas tersebut tidak hanya tercermin pada ketaatan beribadah atau ritual agama, tetapi juga nilai hidup dan budaya. Hal itu pada satu titik menjadi dilema kultur dan praktik keagamaan yang kurang menguntungkan perempuan. Salah satu contohnya adalah kelaziman di kalangan masyarakat untuk memiliki istri lebih dari satu serta penempatan posisi perempuan dalam "baris kedua" dan berpengaruh pada karakter perempuan Banten yang cenderung menerima nasib sebagai bagian takdir yang tidak bisa dihindari (Perda Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah). Budaya yang mendekati partriarki inilah yang kemudian membentuk kehidupan sosial Banten hingga saat ini.

Ketimpangan pendidikan di Jawa Barat dan Banten masih terjadi dan terutama dirasakan oleh perempuan. Rata-rata Lama Sekolah perempuan di Jawa Barat dan Banten lebih rendah dibanding laki-laki. Berdasarkan data BPS tahun 2020, perempuan di Jawa Barat rata-rata mengenyam pendidikan selama 8,11 tahun, sementara laki-laki 8,97 tahun. Sementara itu di Banten, selisihnya lebih besar lagi yakni 8,45 tahun untuk perempuan dan 9,33 tahun untuk laki-laki. Artinya, secara umum Jawa Barat belum memenuhi standar wajib belajar 9 tahun, dan hanya laki-laki di Banten yang telah memenuhi standar wajib belajar 9 tahun. Jawa Barat dan Banten hampir mencapai *near-universal access* ke pendidikan primer. Namun, anak dari rumah tangga termiskin memiliki kesempatan lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikan menengah ke atas (UNICEF, 2015). Menurut Wardhana et. al. (2020), rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Barat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan rasio murid-guru. Satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah pemenuhan infrastruktur serta sarana dan prasarana sekolah di daerah pelosok, yang sebagian masih tertinggal bahkan di bawah standar nasional.

Selain Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah perempuan di Jawa Barat juga lebih rendah dibanding laki-laki untuk kelompok usia 16-18, 19-24, dan 19-23 (atau setara jenjang pendidikan SMA/SMK dan perguruan tinggi). Azmy et al. (2020) menyatakan bahwa partisipasi perempuan terhadap pendidikan formal yang lebih rendah tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, di antaranya faktor budaya, sosial, kebijakan yang kurang berpihak pada perempuan, hingga sebab-sebab struktural lainnya. Persentase laki-laki yang menamatkan pendidikan tinggi masih lebih besar dibanding perempuan. Pemprov Jabar (2010) menyatakan hal ini kemungkinan disebabkan kurangnya fasilitas sekolah atau perguruan tinggi yang mudah diakses di sekitar para perempuan tersebut. Faktor jarak tempuh menjadi pertimbangan orangtua untuk menyekolahkan

anak mereka, karena konsekuensinya tentu ke pengeluaran yang lebih besar. Kesempatan anak untuk mengenyam pendidikan tinggi mengecil, terlebih bagi anak perempuan karena masih lekatnya pemikiran kodrat perempuan ke pekerjaan domestik/dapur.

Tabel 2. Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Usia di Jawa Barat

Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Usia				
	7-12	13-15	16-18	19-24	19-23
Laki-laki	99,58	92,88	68,29	23,26	25,28
Perempuan	99,73	96,13	67,15	22,41	24,18

Sumber: BPS

Norma gender dan capaian pendidikan menentukan peran perempuan Jawa Barat dalam perekonomian. TPAK Perempuan di Jawa Barat pada tahun 2020 hanya sebesar 46,79%, salah satu yang terendah di Indonesia. Konstruksi gender menempatkan perempuan sebagai pengelola rumah tangga, yang dianggap tidak memerlukan pendidikan tinggi kecuali pengetahuan dasar. Dalam banyak kasus, orangtua menikahkan anaknya lebih cepat karena alasan ekonomi (supaya bebas tanggungan), sebagaimana yang terjadi terutama di Indramayu, Karawang, dan Garut (BKKBN dalam Tempo.co, 2016). Praktik pernikahan usia dini Jawa Barat mencapai 14% di tahun 2015, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sekitar 12% (UNICEF, 2015). Setelah menikah, perempuan kemungkinan besar akan tinggal bersama suaminya yang berperan sebagai pencari nafkah utama, sementara ia tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga. Hal ini turut menyebabkan rendahnya TPAK perempuan di Jawa Barat dibanding daerah lain. Sementara untuk penduduk perempuan di Jawa Barat yang masuk ke pasar tenaga kerja, tingkat probabilitasnya lebih besar bagi mereka dengan pendidikan lebih tinggi, usia lebih muda, dan status perkawinan cerai hidup (Khairunnisa, 2015).

Dalam kenyataannya, beban yang ditanggung perempuan (terutama kelas bawah) yang bekerja cukup berat. Bagi buruh perempuan kelas bawah, berbagai kegiatan produktif di dalam rumah, seperti mencuci, memasak, serta mengasuh dan menjaga anak tetap harus dilakukan. Berbeda halnya dengan perempuan kelas menengah yang bisa melimpahkan pelaksanaan kegiatan tersebut pada pembantu rumah tangga. Namun, hal ini mendorong berpindahnya marjinalisasi, subordinasi, dan beban kerja pada pembantu rumah tangga (Fakih, 1996). Hal ini juga yang dikisahkan oleh Setia (2003) tentang buruh perempuan di Majalaya yang harus mengurus anak di sela-sela waktu kerjanya, yang memang dimungkinkan karena jarak pabrik yang cukup dekat dan jam kerja relatif longgar. Kondisi ini menguatkan argumen bahwa beban kerja perempuan menjadi dua kali lebih besar dibanding laki-laki. Meskipun demikian, Setia (2003) menyatakan bahwa pekerjaan domestik ini seringkali dianggap rendah dan tidak pernah diperhitungkan sebagai bentuk kontribusi terhadap kelangsungan hidup rumah tangga.

Sama seperti Jawa Barat, kualitas pendidikan perempuan yang rendah menjadi salah satu pemicu utama yang menghambat keberhasilan pengarusutamaan gender di Banten. Salah satu

paradigma pada mayoritas masyarakat Banten yang menghambat keberhasilan pengarusutamaan gender adalah anggapan bahwa perempan yang berkiprah luas di luar domestik adalah tidak pantas, karena yang layak berperan di sektor publik adalah laki-laki. Selain itu, pengarusutamaan gender juga kerap kali dianggap budaya barat. Selain kualitas Pendidikan yang rendah, kreativitas dan keterampilan perempuan yang terbatas juga sangat memengaruhi pemiskinan ekonomi bagi perempuan. Ditambah anggapan bahwa perempuan hanya layak untuk berperan di sektor domestik, cukup menghambat langkah perempuan untuk berkarya dan melibatkan dirinya di berbagai bidang (Ritonga et. al., 2018).

Untuk mendukung upaya pengarusutamaan gender, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengatur anggaran responsif gender dalam Peraturan Gubernur Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Alokasi APBD untuk urusan Pemerintah di bidang pendidikan tahun 2021 cukup memadai, di mana Pemprov Jawa Barat mengalokasikan Rp16,5 triliun atau 37,06% dari total APBD-nya. Sementara itu, alokasi APBD 2021 untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih relatif kecil, yaitu Rp42,1 miliar (0,09%), dan diantaranya untuk Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp2,6 miliar (0,01%). Efektivitas implementasi pelaksanaan PUG di Jawa Barat berbeda-beda di setiap kabupaten/kota. Di Kota Bogor, misalnya, berdasarkan penelitian Azmy et al (2020), disimpulkan bahwa implementasi PUG pada pendidikan menengah belum maksimal akibat beberapa hambatan, seperti (i) PUG baru menjadi kepedulian di tingkat individu atau beberapa unit kerja dan belum menyeluruh, (ii) adanya keterbatasan SDM di instansi penyelenggara PUG bidang pendidikan, serta kurangnya pemahaman akan perspektif adil gender, dan (iii) aspek komunikasi dan koordinasi antar tim masih kurang, serta ketiadaan sosialisasi untuk penambahan pengetahuan.

Di Banten, kebijakan pengarusutamaan gender telah cukup lama diberikan landasan hukumnya, yakni melalui Peraturan Daerah Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Alokasi APBD untuk urusan Pemerintah di bidang pendidikan tahun 2021 cukup memadai, di mana Pemprov Banten mengalokasikan Rp4,3 triliun atau 34,65% dari total APBD-nya. Sementara itu, alokasi APBD 2021 untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih relatif kecil, yaitu Rp25,5 miliar (0,2%), dan diantaranya untuk Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp2,1 miliar (0,02%). Masih terdapat tantangan dalam pengarusutamaan gender di Pemerintah Daerah Banten, yakni antara lain adanya inkonsistensi penyelenggaraan program pengarusutamaan gender karena kurangnya koordinasi antardinas terkait gender serta fasilitas yang kurang baik. Selain itu, pergantian kedudukan jabatan dinas juga menyebabkan orang-orang yang telah menguasai perencanaan program responsif gender berganti, sehingga seringkali perencanaan penganggaran dilakukan oleh orang-orang yang baru

dan belum mengetahui secara mendalam tentang program responsif gender. Penganggaran untuk mendukung terlaksananya kebijakan PUG juga kerap kali dikurangi porsinya karena terhambat pemanfaatan anggaran (Ritonga et. al., 2018).

4.6.5. Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 6 (enam) indikator yang menunjukkan ketimpangan yang lebih tinggi dibanding ketimpangan nasional, yaitu Harapan Lama Sekolah, Umur Harapan Hidup, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tenaga Profesional, Pendapatan Per Kapita, dan Sumbangan Pendapatan. Pada tahun 2020, Kalimantan Tengah memiliki Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tertinggi di Indonesia, yang unggul pada komponen keterlibatan perempuan di parlemen yang mencapai 33,33%, namun komponen ekonomi dan ketenagakerjaan yang direpresentasikan oleh sumbangan pendapatan perempuan dan tenaga professional perempuan masih berada di bawah rata-rata nasional. Pembangunan manusia berbasis gender di Kalimantan Tengah yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2020 juga masih berada di bawah rata-rata nasional. Karakteristik ketimpangan gender yang mendasar di Kalimantan Tengah dapat dilihat dari aspek norma gender, pendidikan, ekonomi, serta penganggaran dan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).

Di Kalimantan Tengah, kehidupan komunal suku Dayak baik dalam rumah tangga maupun kehidupan hukum adat, pemerintahan dan politik masih didominasi oleh laki-laki, yaitu dominasi patriarki. Dalam kehidupan rumah tangga, perempuan Dayak lebih banyak mengerjakan pekerjaan pada ruang domestik, sedangkan laki-laki mendominasi ruang publik. Laki-laki bertanggung jawab pada masalah keamanan dan keselamatan keluarga, mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, keamanan, politik, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sementara perempuan lebih banyak terlibat pada kegiatan ritual keagamaan. Status sosial paling tinggi perempuan pada komunitas Dayak hanyalah sebagai wadian/basir (belian) baik pada ritual penyembuhan orang sakit maupun pada ritual kematian. Dalam kehidupan politik dan pemerintahan, perempuan Dayak masih jauh tertinggal (Widen, 2003 dalam Sekar, 2008).

Selain itu, dari segi mentalitas, perempuan Dayak kalah gesit dibanding perempuan lainnya di luar Dayak seperti perempuan Jawa, Batak, Manado, Banjar, Sunda, dan lain-lain. Perempuan Dayak bisa dikatakan kurang gesit, lamban, pasif, kurang kreatif, kurang berwibawa, kurang percaya diri dan kurang independen. Mentalitas perempuan Dayak ini sedikit banyak disebabkan oleh sistem dowry (palaku atau mas kawin), yang pada dasarnya merupakan sebuah transaksi ekonomi terselubung. Perempuan sebagai aset tenaga kerja yang secara ekonomis sangat lemah, yang diperjualbelikan dengan sistem perkawinan patrilokal dan dikompensasikan dengan dowry oleh calon suaminya sebagai pemilik kapital. Konsekuensinya adalah perempuan semakin tidak berdaya dan terkekang oleh kekuatan dominasi laki-laki sebagai pihak yang sudah “membeli” nya dalam transaksi perkawinan (Widen, 2003 dalam Sekar, 2008).

Di bidang pendidikan, menurut UNICEF, kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah masih relatif rendah, dimana hanya 50% anak Sekolah Dasar yang mampu mencapai ambang batas nasional minimum dalam kemampuan membaca, dan hanya seperlima dalam kemampuan matematika. Berdasarkan Renstra DP3APPKB 2016-2021 Provinsi Kalimantan Tengah, selain kualitas pendidikan yang masih relatif rendah, ketimpangan gender di bidang pendidikan di Kalimantan Tengah juga disebabkan oleh masih tingginya angka pernikahan anak, masih tingginya angka drop-out sekolah, masih tingginya kekerasan terhadap anak di sekolah, masih sedikitnya sekolah yang menuju Sekolah Ramah Anak, serta belum tersedianya Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS). Isu perkawinan anak cukup mengemuka di Kalimantan Tengah sebagai salah satu faktor penyebab ketimpangan gender tidak hanya pada bidang pendidikan, namun juga pada aspek kesehatan hingga hingga ekonomi dan ketenagakerjaan. Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia setelah provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Namun demikian, angka perkawinan anak di Kalimantan Tengah mengalami penurunan, yaitu dari 20,16% pada tahun 2019 menjadi 16,35% pada tahun 2020.

Dari sisi ekonomi, peluang kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki, walaupun demikian angka TPAK perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan TPAK perempuan ini tidak diikuti oleh peningkatan peluang kerja yang baik bagi mereka, sehingga menyebabkan produktivitas ekonomi perempuan belum optimal. Ada dua hal yang menjadi catatan yaitu, pertama, masih banyak perempuan Indonesia yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah); dan kedua, lebih dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi dalam pekerjaan yang bergaji rendah. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal dengan keahlian, keterampilan dan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki dan mereka juga mengalami perlindungan yang kurang optimal. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan di Kalimantan Tengah juga lebih tinggi dibanding TPT laki-laki. Basis ekonomi Kalimantan Tengah adalah sektor pertanian, dimana sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor ini, termasuk perempuan. Namun demikian, PDRB per kapita yang relatif rendah mencerminkan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya nilai tambah yang diciptakan perekonomian daerah.

Berdasarkan Renstra DP3APPKB 2016-2021 Provinsi Kalimantan Tengah, tenaga kerja perempuan terutama di sektor informal belum mendapat perhatian serius, antara lain dalam hal permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, upah sangat rendah, tanpa uang lembur, tanpa promosi kerja, tidak terorganisir, serta jaminan kesehatan akibat kerja. Sedangkan yang bekerja di perusahaan, tenaga kerja perempuan masih sering dieksploitasi oleh pengusaha, mendapat perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, pemberian upah yang lebih rendah, perlakuan diskriminatif di tempat kerja, jam kerja yang tidak menentu, serta terbatasnya kesempatan karir.

Dilihat dari aspek penganggaran, anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak di tahun 2020 masih relatif kecil, yaitu sebesar 10,79 Milyar atau 0,19% dari APBD. Selain itu, kapasitas kelembagaan dalm pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menutur jenis kelamin dalam siklus pembangunan, juga masih belum memadai. Pemahaman konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam perencanaan pembangunan, terutama di wilayah kabupaten/kota juga masih relatif rendah. Hal lain yang masih menghambat adalah belum optimalnya penerapan piranti hukum, analisis dan dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Renstra DP3APPKB 2016-2021 Kalteng). Namun demikian, beberapa program penguatan kelembagaan PUG pada provinsi Kalimantan Tengah seperti penyusunan Anggaran Responsif Geder (ARG) serta pelatihan ARG bagi *focal point* SKPD provinsi merupakan upaya penguatan kelembagaan PUG yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB V.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

1. Dalam hal perolehan akses, manfaat, partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya, masih terdapat kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender bukan hanya berarti hilangnya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, melainkan juga pemberian hak, peluang, dan tanggung jawab yang sama terhadap perempuan dalam pembangunan yang meliputi seluruh aspek baik sosial, kultural, politik, maupun ekonomi. Dalam hal ini, Indonesia masih menghadapi situasi ketimpangan gender di berbagai aspek kehidupan, antara lain kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, serta partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Beberapa indikator yang menggambarkan kondisi ketimpangan tersebut adalah kinerja perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki, dalam hal rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase tenaga profesional, pengeluaran per kapita, serta sumbangan pendapatan. Sementara ketimpangan yang menunjukkan kinerja laki-laki yang lebih rendah dibanding perempuan adalah dalam hal harapan lama sekolah dan umur harapan hidup.
2. Berbagai aspek kesenjangan gender pada dasarnya berangkat dari pengaruh norma sosial gender dan budaya patriarki, sebagai salah satu akar masalah yang mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, hingga pengambilan keputusan. Kesenjangan gender pada umumnya terjadi karena sering diabaikannya kondisi bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran yang bebeda, dan berbeda pula kebutuhan, pengalaman, permasalahan, dan aspirasinya. Perbedaan peran tersebut dapat mempengaruhi keduanya dalam memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, partisipasi dalam pembangunan, dan manfaat dari hasil pembangunan. Di sisi lain, regulasi yang netral gender, serta perencanaan kebijakan/program/kegiatan dan implementasinya yang bertolak dari pemikiran *stereotype*/pelabelan gender, juga dapat menjadi penyebab timbulnya kesenjangan gender.
3. Ketimpangan gender dalam pendidikan salah satunya tampak dari lama sekolah laki-laki yang rata-rata satu tahun lebih lama dibandingkan perempuan. Selain dipengaruhi oleh norma sosial budaya, faktor kemiskinan dan perkawinan anak menjadi salah satu faktor penyebab anak putus sekolah. Di beberapa daerah, kondisi geografis juga dapat menjadi salah satu kendala.
4. Dalam bidang kesehatan, meski umur harapan hidup perempuan lebih panjang dibandingkan laki-laki, namun keluhan kesehatan perempuan justru lebih tinggi. Selain itu, perempuan memiliki tantangan di bidang kesehatan yang cukup kompleks berkaitan dengan perannya

pada periode kehamilan dan kelahiran. Norma sosial budaya turut mempengaruhi kesehatan ibu/perempuan.

5. Relatif rendahnya partisipasi perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: (i) normal sosial budaya mengenai perempuan yang bekerja dan peran gender tradisional; (ii) beban ganda perempuan dalam keluarga (produktif dan reproduktif); (iii) kebijakan, regulasi, dan kondisi di tempat kerja yang kurang mendukung serta adanya diskriminasi mulai dari saat penerimaan, saat bekerja, dan purnakerja; (iv) masih terjadinya pelanggaran terhadap hak pekerja, terutama perempuan di tempat kerja (kekerasan dan pelecehan seksual).
6. Disparitas pembangunan gender dan pemberdayaan gender antar wilayah di Indonesia masih terjadi, dimana Kawasan Timur Indonesia cenderung memiliki capaian pembangunan dan pemberdayaan gender yang masih rendah. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan peran perempuan dengan laki-laki yang cukup signifikan dalam pembangunan regional. Terdapat 10 provinsi yang memiliki ketimpangan gender di atas nasional dan pertumbuhan ekonomi di bawah nasional, yaitu Aceh, Riau, Bangka Belitung, Jawa Tengah, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Dari kesepuluh provinsi tersebut, provinsi Papua, Papua Barat, dan NTB memiliki indikator ketimpangan gender yang paling banyak (6 indikator). Sementara itu, provinsi yang paling banyak memiliki indikator ketimpangan gender di atas ketimpangan nasional namun pertumbuhan ekonominya di atas nasional adalah provinsi Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Tengah, dimana masing-masing memiliki 6 (enam) indikator ketimpangan gender.
7. Hasil pemodelan ekonometri menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB. Secara parsial, rasio rata-rata lama sekolah dan rasio sumbangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Apabila rasio rata-rata lama sekolah naik sebesar 1%, maka secara signifikan akan mempengaruhi kenaikan PDRB sebesar 0,04%. Apabila rasio sumbangan pendapatan naik sebesar 1% maka PDRB akan naik sebesar 0,08%. Hal ini berarti bahwa peningkatan kinerja perempuan dalam hal rata-rata lama sekolah dan sumbangan pendapatan akan menyebabkan PDRB meningkat.
8. Selain berbagai tantangan yang sifatnya *local context* di tiap daerah, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta aspek kelembagaan PUG (terutama terkait pemahaman dan komitmen para pemangku kebijakan) merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi pengarusutamaan gender hingga di level daerah. Isu kelembagaan PUG di daerah juga merupakan isu generik yang terjadi hampir di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi lemahnya komitmen pimpinan, turn over SDM yang tinggi, kapasitas SDM yang terbatas, hingga belum tersedianya data terpilah. Selain itu, keterbatasan

APBD dalam hal perencanaan dan penganggaran untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga menjadi isu generik di seluruh daerah.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari kajian ini, perempuan menanggung beban paling berat akibat ketimpangan gender yang terjadi, dimana ketimpangan tersebut tidak hanya merugikan perempuan melainkan juga keluarganya, masyarakat, dan akhirnya merugikan perekonomian suatu wilayah. Apabila kesetaraan gender menjadi salah satu solusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, maka bauran kebijakan yang responsif gender dibutuhkan dalam rangka memperkecil ketimpangan gender. Sementara dari sisi kewilayahan, karakteristik setiap daerah yang berbeda-beda, mulai dari aspek norma budaya, demografi, hingga faktor geografis, merupakan suatu tantangan tersendiri untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan gender yang setara.

Intervensi pembangunan di berbagai bidang perlu dilakukan dengan pendekatan siklus hidup dengan menggunakan perspektif gender. Pendekatan siklus hidup dalam pembangunan sumber daya manusia dimulai dari tahap *prenatal, neonatal, infant, early childhood*, anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Intervensi yang dilakukan pada tahapan-tahapan tersebut didorong pada penguatan aspek pendidikan norma dan *life-skill*, kesehatan dan gizi, hingga kelanjutusiaan berbasis keluarga dan komunitas. Adapun intervensi yang dilakukan meliputi pemberian gizi yang baik, pengembangan anak usia dini, pendidikan, pembekalan keterampilan dan/atau kewirausahaan, pendidikan keuangan dan *financial literacy*. Pendekatan siklus hidup dengan perspektif gender dalam pembangunan sumber daya manusia diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang sehat dan cerdas, pemuda yang aktif dan produktif, tenaga kerja berdaya saing dan produktif, serta lansia yang sehat dan produktif, yang berkeadilan dan setara gender.

Secara umum, upaya pemberdayaan perempuan harus dilakukan secara komprehensif (*hardskill* dan *softskill* yang mendorong kepemimpinan perempuan, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, keberanian berpendapat) serta pelibatan laki-laki di dalam mendorong kesetaraan gender. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian beserta rekomendasi untuk mendorong kesetaraan gender di Indonesia adalah sebagai berikut:

5.2.1. Pembentukan Norma Gender

Ketidakpekaan terhadap isu gender dan norma sosial budaya di masyarakat, khususnya terkait masih kentalnya budaya patriarki, merupakan hulu permasalahan ketimpangan gender di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi salah satu penghambat kemajuan perempuan baik di ruang domestik maupun publik, diantaranya mempengaruhi perbedaan capaian rata-rata lama sekolah antara perempuan dan laki-laki, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, hingga

kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah norma sosial agar mendukung kesetaraan gender antara lain sebagai berikut:

(i) Pembentukan norma gender dimulai dari pendidikan keluarga dan pengasuhan, serta pendidikan formal dan nonformal, yaitu dari bagaimana anak perempuan dan laki-laki diajarkan mengenai konstruksi gender, yang dimulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Pengembangan kurikulum berbasis gender merupakan cara strategis untuk memasukkan nilai gender dan mengetengahkan perspektif perempuan dan perspektif laki-laki dalam konteks keadilan dan kesetaraan gender. Kurikulum gender ini harus tercermin pada materi ajar, buku ajar, metode ajar, dan perilaku mengajar, serta menjadikannya sebagai basis dalam pengembangan pola pengajaran, manajemen, dan hubungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan juga pengembangan program pelatihan kepada guru terkait metode pembelajaran dan konten yang peka gender. Hal ini dapat memberikan panduan kepada guru ketika mengajar anak laki-laki dan perempuan, baik untuk mendorong partisipasi, kinerja, keterampilan, serta untuk mengurangi stereotip dan bias gender, memastikan lingkungan belajar yang peka gender dan kondusif, dan mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender di sekolah.

(ii) Ketika sebuah masalah memiliki keterkaitan dengan norma sosial, maka intervensi berupa kebijakan pemerintah saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena yang harus diubah adalah nilai yang sudah mengakar di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pula adanya tambahan intervensi dari level rumah tangga dan komunitas, yaitu berupa dekonstruksi dan rekonstruksi melalui sosialisasi dalam keluarga, tempat kerja, organisasi, dan jaringan sosial.

(iii) Dari seluruh faktor penyebab ketimpangan gender, norma sosial gender dan budaya patriarki menjadi salah satu akar masalah, sehingga perlu untuk terus memperkuat literasi, pemahaman mengenai gender, tidak hanya kepada laki-laki namun juga kepada perempuan itu sendiri.

(iv) Upaya untuk meringankan beban ganda yang dijalani oleh perempuan dapat diawali dengan peningkatan *gender awareness* dan menghilangkan *gender stereotype*, serta pelibatan lali-laki dan pembagian peran yang seimbang dalam rumah tangga. Selain itu, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga perlu terus didorong sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan secara menyeluruh.

5.2.2. Pencegahan Perkawinan Anak

Respon kebijakan yang telah dilakukan pemerintah serta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan rekomendasi untuk menurunkan laju perkawinan anak antara lain sebagai berikut:

(i) Pencegahan perkawinan anak telah menjadi salah satu isu strategis dalam RPJMN 2020-2024 untuk Perlindungan Anak. Komitmen di dalam RPJMN ini juga diperkuat dengan penyusunan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Keputusan DPR untuk menaikkan usia minimum perempuan menikah menjadi 19 tahun adalah langkah yang baik, namun ada beberapa hal yang akan menjadi tantangan. Meningkatkan batas usia perkawinan dan memperketat aturan terkait dispensasi pernikahan, juga berisiko menyembunyikan perkawinan anak, dimana karena adanya pelarangan menikah di bawah umur dapat meningkatkan pernikahan tidak tercatat seperti kawin siri.

(ii) Upaya terintegrasi pencegahan perkawinan anak dari lembaga non-pemerintah dan pemerintah daerah perlu dikembangkan, melalui skema Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dimana masyarakat turut terlibat dalam melakukan intervensi pencegahan perkawinan anak. Kabupaten Lombok Barat dalam PATBM atau Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) telah mengembangkan program ini, dengan melibatkan kaum muda untuk berkontribusi di dalam ruang yang secara tradisional biasa dipimpin oleh orang dewasa. Skema perlindungan berbasis komunitas ini juga dapat direplikasi di daerah lain.

(iii) Penguatan Program Minimal Belajar 12 Tahun untuk Anak Perempuan dapat mendukung anak perempuan untuk menyelesaikan sekolah sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Data Susenas menunjukkan bahwa baik untuk anak perempuan maupun laki-laki yang menikah sebelum berumur 18 tahun, banyak yang jenjang pendidikan tertingginya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, perlu ada sistem pendidikan yang tidak mendiskriminasi anak yang sudah menikah atau anak yang sudah hamil untuk melanjutkan pendidikan, disertai dengan sosialisasi agar tidak terjadi perundungan (*bullying*).

(iv) Mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan anak dengan memadukan pendekatan sistem perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial. Keterpaduan program-program ini diperlukan, karena meskipun kemiskinan merupakan salah satu pendorong terjadinya perkawinan anak, tetapi bukan satu-satunya penyebab, melainkan juga dipengaruhi oleh akses yang buruk ke pendidikan formal dan kapasitas pengasuhan orang tua yang kurang.

5.2.3. Keberpihakan Pembangunan pada Perempuan *(Affirmative Action)* untuk Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Dalam rangka mendorong potensi perekonomian tumbuh tinggi, ketimpangan gender di bidang ketenagakerjaan harus diturunkan. Dengan meningkatkan peran perempuan di bidang ketenagakerjaan, produktivitas ekonomi akan meningkat yang pada gilirannnya akan

meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dengan bertambahnya penghasilan mereka. Langkah-langkah keberpihakan yang nyata pada perempuan diperlukan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Identifikasi upaya-upaya praktis yang inovatif untuk membantu perempuan dalam aspek ekonomi dan ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan menyediakan akses terhadap informasi, tempat dan lembaga keuangan bagi perempuan khususnya yang bergerak di sektor dominan seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan serta sektor informal. Program pemihakan terhadap perempuan ini perlu dilakukan dengan hati-hati disertai analisis gender yang memadai. Upaya peningkatan pemahaman masyarakat akan aspek sosial dan budaya terkait dengan kesetaraan gender perlu dilakukan ketika pendekatan rumah tangga digunakan dalam program pemberdayaan ekonomi perempuan.

Langkah-langkah kebijakan yang dapat meringankan beban ganda perempuan dan mendukung ekosistem tenaga kerja perempuan perlu terus diupayakan, diantaranya dengan kebijakan *maternity*, *paternity, child care*, dan insentif ketenagakerjaan lainnya bagi tenaga kerja perempuan. Penyediaan layanan pengasuhan anak (*child care*) yang terjangkau dan berkualitas, khususnya di daerah urban, dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan partisipasi dan kontribusi perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, misalnya dengan layanan pengasuhan anak berbasis komunitas. Layanan *child care* yang terjangkau dan berkualitas akan dapat membantu mengurangi pekerjaan tidak berbayar (pengasuhan) yang dilakukan perempuan, sehingga memberikan perempuan peluang dan kesempatan untuk masuk dan bertahan di pasar tenaga kerja. Selain itu perlu didukung pula oleh penyediaan sarana parasarana dan ruang publik yang mendukung dan aman bagi perempuan.

Pada kondisi pandemi yang kurang kondusif bagi sektor formal untuk berkembang, sektor informal menjadi lahan baru untuk penciptaan lapangan kerja yang turut membantu pemulihan perekonomian. Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini perlu menyeimbangkan penciptaan lapangan kerja pada sektor formal dan informal untuk penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Namun, karena sektor informal ini merupakan pekerjaan di luar hubungan kerja, perlu dipastikan regulasi untuk melindungi para pekerja di sektor ini diantaranya melalui penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Regulasi yang mengatur mengenai pekerja informal dan juga perlindungan terhadap pekerja khususnya pekerja perempuan serta perjanjian kerja harus diprioritaskan untuk melindungi hak-hak pekerja khususnya pekerja perempuan. Kesenjangan upah/gaji antara pekerja perempuan dan laki-laki harus diturunkan dan bahkan perempuan seharusnya menerima besaran upah/gaji yang sama dengan laki-laki apabila mereka memiliki tingkat pendidikan, kemampuan, dan jabatan yang setara.

Peningkatan akses dan fasilitasi kepada kegiatan ekonomi (bekerja atau berwirausaha) bagi perempuan perlu terus didorong, diantaranya melalui pelatihan keahlian kerja dan wirausaha,

informasi pasar kerja yang difokuskan pada kebutuhan perempuan (lapangan kerja part time atau pengaturan jam kerja yang fleksibel), layanan keuangan dan kredit mikro bagi perempuan, serta penegakan penerapan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan yang sama.

Ekonomi digital yang semakin berkembang saat ini juga perlu untuk lebih ditingkatkan karena memberikan fleksibilitas kepada perempuan dalam bekerja dan berkontribusi terhadap perekonomian, terlebih didukung oleh jumlah perempuan pengguna internet dan produk digital juga semakin meningkat jumlahnya setiap tahun. Akan tetapi, perlu disadari bahwa peningkatan ekonomi digital ini juga harus disertai dengan upaya peningkatan literasi keuangan digital, perlindungan konsumen khususnya bagi perempuan, pembangunan infrastruktur di daerah perdesaan dan tertinggal, serta optimalisasi TIK dalam rantai bisnis perempuan. Berkaitan dengan berkembangnya ekonomi digital khususnya semenjak pandemi Covid-19, perlu untuk meningkatkan kompetensi dan akses terhadap teknologi digital bagi perempuan agar dapat mengembangkan sumber diversifikasi pendapatan dan agar lebih berdaya saing dalam aspek ketenagakerjaan dan ekonomi. Terlebih lagi, perempuan terkena dampak yang lebih berat dibandingkan laki-laki sehingga harus menanggung beban yang lebih besar di masa pandemi, termasuk peran ganda yang diembannya. Di masa pandemi, platform digital merupakan salah satu hal yang membantu usaha mikro dan kecil bertahan khususnya bagi perempuan dan kaum muda dengan mempertimbangkan karakteristik bisnis, alternatif strategi, dan faktor eksternal lainnya. Hal ini dapat menjadi salah satu peluang bagi perempuan yang saat ini mayoritas bekerja sebagai tenaga kerja penjualan. Dalam hal ini, dukungan berupa kepemilikan smartphone, fasilitas dan fasilitator untuk belajar mengenai kompetensi digital, dan lokasi bisnis yang sesuai menjadi beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan untuk mendukung perempuan terlibat aktif dalam ekonomi digital. Bantuan sosial yang diberikan Pemerintah selama masa pandemi Covid-19 khususnya terkait dengan UMKM harus lebih menyasar lagi perempuan, karena masih banyak pengusaha UMKM perempuan yang belum menerima bantuan tersebut khususnya akses terhadap lembaga keuangan.

Implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) Perempuan dapat menjadi salah satu kebijakan yang menjembatani perempuan untuk mencapai dan menikmati pemberdayaan ekonomi. Keberadaan SNKI Perempuan mengusung kemandirian ekonomi perempuan, kesetaraan gender, dan penciptaan ekosistem yang ramah perempuan dengan menarget perempuan kelompok pendapatan 40% terendah, perempuan pekerja khususnya pekerja migran, perempuan pemilik UMKM, dan perempuan pengurus rumah tangga. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan luas cakupannya, implementasi strategi tersebut harus disertai juga dengan upaya peningkatan kerjasama antara Pemerintah dan sektor swasta sehingga dapat lebih memperluas inklusi keuangan dan juga jangkauan penciptaan lapangan kerja.

Pemberdayaan perempuan dalam perekonomian tidak akan optimal apabila tidak didukung oleh peningkatan akses pada layanan pendidikan, kesehatan, serta kepemimpinan. Layanan-layanan tersebut merupakan upaya mendasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangunan, termasuk perempuan. Peningkatan kesetaraan gender pada bidang pendidikan dilakukan melalui jalur jalur formal, khususnya untuk perempuan-perempuan pra-sejahtera, sementara untuk pendidikan non-formal mencakup pendidikan baca tulis, *life skill*, berpikir kritis, managerial, dan kepemimpinan perempuan. Sedangkan pada bidang kesehatan didorong melalui penyediaan layanan kesehatan, Keluarga Berencana (KB), kesehatan reproduksi, peningkatan gizi, serta perluasan cakupan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi kelompok perempuan secara menyeluruh.

5.2.4. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) untuk Pengembangan Ekonomi Lokal dan Aspek Prioritas

Kebijakan yang responsif gender diperlukan agar pihak-pihak yang berkepentingan (terutama Pemerintah Daerah) dapat memahami dan mendukung usaha-usaha ekonomi yang dilakukan perempuan di daerah, misalnya terkait dengan tempat usaha, pendampingan, akses informasi, dan pemasaran; guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain untuk pengembangan ekonomi lokal, kebijakan responsif gender juga diarahkan pada seluruh aspek prioritas yang dapat mendorong peningkatan kesetaraan gender. Rencana Aksi Daerah yang disusun berupa *policy direction* untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan gender.

Di daerah, sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), disusun suatu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD PUG ini merupakan kebutuhan-kebutuhan intervensi yang mendesak untuk dilakukan secara sistematis, integratif, dan implementatif, dalam rangka mendorong lebih cepat upaya mewujudkan kesetaraan gender.

Karena PUG di tingkat lokal telah memiliki cantolan dokumen yang kuat berupa RAD PUG, maka dokumen ini hendaknya diarahkan pada kebijakan, program dan kegiatan strategis yang membawa daya ungkit besar pada perubahan ekonomi lokal sesuai kebutuhan mendasar masyarakat setempat. RAD PUG perlu terus di-update dan disempurnakan untuk mencakup rencana pembangunan jangka panjang di bidang penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Untuk memastikan hal tersebut, aspek-aspek penting program RAD PUG perlu diintegrasikan dalam Rencana Jangka Panjang dan Jangka Menengah Provinsi. RAD PUG perlu memasukkan aspek pengembangan model-model ekonomi lokal yang potensial sesuai dengan konteks daerah, serta mengidentifikasi *local champion* untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi lokal dan masyarakat secara signifikan.

Kerjasama antara pemerintah dan para mitra pembangunan sangat penting untuk menjamin pelaksanaan RAD PUG dengan akuntabilitas yang memadai. Oleh karena itu, RAD PUG perlu disosialisasikan secara memadai kepada para pelaksana serta pemanfaat RAD PUG (masyarakat, khususnya perempuan), untuk memberikan pemahaman dan mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya. Jika memungkinkan, perlu dirumuskan mekanisme insentif yang memastikan implementasi RAD PUG dapat berjalan maksimal dalam menopang aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, Bappeda provinsi sebagai unsur penting dari Pokja PUG perlu mengembangkan diri sehingga memiliki kapasitas yang memadai untuk pelaksanaan RAD PUG untuk pengembangan ekonomi lokal dan seluruh aspek prioritas yang dapat mendorong peningkatan kesetaraan gender.

5.2.5. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Di bidang penganggaran, pemerintah telah mengintrodusir Anggaran Responsif Gender (ARG), yang terbagi atas tiga kategori, yaitu (i) Anggaran Khusus Target Gender, yaitu alokasi anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender, (ii) Anggaran Kesetaraan Gender, yaitu alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender berdasarkan akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan kontrol dalam pengambilan keputusan, serta manfaat dari semua bidang pembangunan, (iii) Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender, yaitu alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas (*capacity building*).

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dengan menggunakan *Gender Budget Statement* (GBS) akan mendorong penganggaran yang berbasis kinerja melalui proses yang praktis, serta mendorong peningkatan kinerja SKPD karena GBS di*drive* oleh indikator-indikator kinerja yang kuat untuk perwujudan kesetaraan gender. Dalam hal ini, GBS perlu merumuskan (i) analisis gender/kesenjangan gender secara singkat, (ii) intervensi repsonsif gendernya, (iii) memasukkan indikator input, output dan outcomes yang sensitif gender, (iv) memastikan alokasi anggaran yang responsif pada pesoalan gender yang diidentifikasi dan mencapai indikator output dan perubahan yang telah tercantum ke dalam RKA/KL.

Meskipun terdapat regulasi untuk mendorong penerapan ARG, *budget tagging* untuk ARG belum dilakukan secara maksimal oleh seluruh K/L, bahkan terdapat penurunan ARG dari tahun 2019-2021. Konsistensi dalam melakukan budget tagging ARG juga mengalami penurunan di tahun 2021. Tercatat hanya 17 K/L yang konsisten melakukan tagging tersebut dari tahun 2018 hingga 2021 (Bappenas, 2021). Dengan demikian, perlu ditingkatkan lagi kesadaran dan kepatuhan K/L dalam melakukan penandaan anggaran.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta aspek kelembagaan PUG (terutama terkait pemahaman dan komitmen para pemangku kebijakan) merupakan salah satu

faktor penting dalam implementasi pengarusutamaan gender hingga di level daerah. Salah satu hal yang menjadi tantangan dalam penerapan PPRG di tingkat nasional maupun daerah adalah terkait lemahnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan dalam pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan. Isu kelembagaan PUG di daerah merupakan isu generik yang terjadi hampir di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. PPRG secara kelembagaan umumnya masih bersifat formalitas atau *ad-hoc*, belum memadainya kapasitas SDM pelaksana PPRG, turn over SDM yang tinggi, serta kurang tersedianya data terpilah. Implementasi PPRG secara optimal baik di pusat maupun daerah perlu didukung kelembagaan PUG beserta terpenuhinya tujuh prasyarat PUG, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, serta partisipasi masyarakat.

Dalam hal penguatan PPRG, diperlukan penguatan dan peningkatan kualitas di seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pemeriksaan, dan pengawasan. Untuk memastikan PPRG dapat dilaksanakan di pusat dan daerah, penyediaan data terpilah gender menjadi keharusan, yang didukung dengan kemampuan SDM dalam melakukan analisis gender dan memanfaatkan data.

5.2.6. Pendekatan Perencanaan Program PUG yang Sesuai dengan Kondisi Lokal Daerah

Strategi implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di daerah harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan budaya setempat yang sangat mewarnai berbagai perilaku kehidupan dan struktur masyarakat. Beberapa penajaman konteks lokal yang dapat dijadikan pendekatan dalam upaya memperkecil kesenjangan gender dari sisi kewilayahan antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Wilayah Barat Indonesia dan Daerah yang Setipe

(i) Terkait dengan sistem kekerabatan dalam keluarga luas memegang peranan sangat penting sebagai unit terkecil dari masyarakat, maka pendekatan program dapat menggunakan unit keluarga luas sebagai satuan terkecil.

(ii) Terkait kondisi topografi dan infrastruktur dengan kondisi sebagian masih menggunakan transportasi lewat sungai, maka program-program bidang kesehatan diupayakan menggunakan strategi ganda, yaitu strategi “menunggu bola”, yaitu masyarakat yang harus datang ke Puskesmas/ Pustu/ Polindes untuk mendapatkan pelayanan, dan sekaligus melakukan strategi “menjemput bola”, yaitu para medis yang datang ke permukiman penduduk dalam jangka waktu tertentu secara regular, terutama pelayanan untuk masyarakat daerah terpencil karena kesulitan transportasi melalui sungai.

(iii) Terkait kondisi topografi dan infrastruktur, maka program-program bidang pendidikan diupayakan untuk mendukung pelaksanaan SD-SMP satu atap dan SMP-SMA satu atap serta peningkatan SMK untuk penguatan pendidikan vokasi.

(iv) Terkait sosial budaya masyarakat yang tidak terlalu kaku, maka perkuatan peran perempuan dalam berbagai program pembangunan harus lebih dioptimalkan dengan pendampingan yang intensif dan berkesinambungan serta bersinergi antar dinas-dinas terkait.

b. Bagi Wilayah Jawa dan Daerah yang Setipe

(i) Terkait sistem kekerabatan dalam keluarga inti memegang peranan sangat penting sebagai unit terkecil dari masyarakat, maka pendekatan program dapat menggunakan unit keluarga sebagai satuan terkecil.

(ii) Terkait fleksibilitas sosial budaya yang mendukung adanya peran ganda perempuan, maka penguatan peran perempuan dalam berbagai program pembangunan harus lebih dioptimalkan pada tahapan yang lebih memberikan wewenang perempuan pada peran yang lebih signifikan.

(iii) Terkait potensi SDM masyarakat yang sudah siap untuk melakukan program-program pembangunan, maka penekanan program kesejahteraan keluarga dan gender diarahkan pada penguatan teknologi pasca panen dengan pengolahan bahan pangan, penambahan modal usaha, perluasan usaha, dan perluasan pemasaran serta teknologi informasi.

(iv) Terkait adanya kesenjangan budaya dan tata nilai antara kelompok miskin dan kelompok kaya di masyarakat, maka perlu dipikirkan adanya musyawarah khusus baik bagi kelompok miskin maupun kelompok perempuan untuk menentukan kebutuhan bersama dan program-program yang diinginkan.

c. Bagi Wilayah Timur Indonesia dan Daerah yang Setipe

(i) Terkait sistem kekerabatan (marga atau suku) memegang peranan sangat penting sebagai unit kesatuan masyarakat, sedangkan peran keluarga inti tidak independen, maka pendekatan program bukan menggunakan unit keluarga sebagai satuan terkecil, namun menggunakan pendekatan unit marga atau suku sebagai satu satuan terkecil.

(ii) Program-program PUG sebaiknya dilakukan melakukan pendekatan pola tempat tinggal yang berkelompok, yaitu menurut desa atau suku yang merupakan kesatuan masyarakat semarga.

(iii) Terkait kondisi topografi dan infrastruktur, maka program-program bidang kesehatan diupayakan menggunakan strategi ganda, yaitu strategi “menunggu bola”, yaitu masyarakat yang harus datang ke Puskesmas/ Pustu/ Polindes untuk mendapatkan pelayanan, dan sekaligus melakukan strategi “menjemput bola”, yaitu para medis yang datang ke permukiman penduduk dalam jangka waktu tertentu secara regular, terutama pelayanan untuk masyarakat daerah terpencil karena kesulitan transportasi.

(iv) Terkait kondisi topografi dan infrastruktur, maka program-program bidang pendidikan diupayakan untuk mendukung pelaksanaan SD-SMP satu atap dan SMP-SMA satu atap serta peningkatan SMK untuk penguatan pendidikan vokasi.

(v) Terkait kendala sosial budaya yang sangat kaku dan jelas/ tegas, maka perkuatan peran perempuan dalam berbagai program pembangunan harus melibatkan para tetua di unit marga masing-masing.

5.2.7. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

(i) Dapat dilakukan analisis ketimpangan gender di level kabupaten/kota untuk mendorong percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di level kabupaten/kota bahkan sampai ke desa.

(ii) Selain terhadap pertumbuhan perekonomian wilayah sebagaimana yang telah dilakukan pada kajian ini, pengaruh ketimpangan gender dapat pula dikaji terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan PDRB per kapita sebagai variabel terikat (*dependent variable*), dengan disertai pengembangan pada variabel-variabel bebas (*independent variable*) yang digunakan.

(iii) Penelitian eksploratif pada kajian ini dapat pula dikembangkan menjadi penelitian studi kasus yang mengambil lokasi pada daerah-daerah prioritas penanganan ketimpangan gender, untuk memvalidasi temuan pada hasil kajian ini serta mempertajam analisis gender yang sifatnya *local content* beserta rekomendasi kebijakannya.

(iv) Mendiseminasikan hasil kajian kepada Kementerian/Lembaga dan daerah terkait sebagai bagian dari advokasi untuk mendorong peningkatan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

ADB. (2006). Indonesia Country Gender Assessment. Manila.

Alfana et al. (2020). Analisis Indeks Pendidikan dan Parameternya di Provinsi Maluku Utara. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36829.03041

Anonim. (2016). *Komitmen SKPD Masih Rendah Dalam Aplikasi PPRG*. Retrieved from https://www.papua.go.id/view-detail-berita-4086/komitmen-skpd-masih-rendah-dalam-aplikasi-pprg.html

Anonim. (2019, September 26). *Rendahnya Isu Gender dalam Program Pemerintah di Papua*. Retrieved from kabarpapua: https://kabarpapua.co/rendahnya-isu-gender-dalam-program-pemerintah-di-papua/

Antonopoulos, R. (2009). The Current Economic and Financial Crisis: A Gender Perspective. In *Working Paper Series No 562.* New York: Levy Economics Institute.

Astina, Chairani. (2006). Ketimpangan Gender dalam Pendidikan. *Jurnal Studi Agama dan Budaya.*

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Arini, M. (2018, April 21). *Memilih Desain Penelitian Mixed-Methods*. Retrieved from http://merita.staff.umy.ac.id/2018/04/21/memilih-desain-penelitian-mixed-methods/

Azmy, A.S., & Pertiwi, F. (2020). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pendidikan di Kota Bogor. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender 19 (2): 160-170*. https://doi.10.24014/Marwah.v19i2.10699

Baird, M., & Hill, E. (2020). *COVID-19 and Women's Economic Participation.* The University of Sydney: Sydney.

Bako, Mandy Jollie, and Jawad Syed. 2018. "Women's Marginalization in Nigeria and the Way Forward." *Human Resource Development International* 21 (5): 425–43. https://doi.org/10.1080/13678868.2018.1458567.

Bank Indonesia. (2021). Laporan Perekonomian Provinsi Maluku Utara.

Bappenas. (2020). Tanggapan dan Masukan terhadap Laporan Kajian "Analisis Ketimpangan Gender Spasial dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Wilayah". [Presentasi Powerpoint].

Bappenas. (2021). Tanggapan dan Masukan Terhadap Laporan Kajian "Analisis Ketimpangan Gender Spasial dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Wilayah".

Barnat, N., MacFeely, S., & Peltola, A. (2019). Comparing Global Gender Inequality Indices: How Well Do They Measure the Economic Dimension. *Journal of Sustainability Research*.

Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A Review of Child Stunting Determinants in Indonesia. Maternal and Child Nutrition, 14(4), 1–10. https://doi.org/10.1111/mcn.12617

Blanton, R., Blanton, S., & Peksen, D. (2019). *The Gendered Consequences of Financial Crises: A Cross-National Analysis.* Cambridge: Cambridge University Press.

BPS Provinsi Maluku Utara. (2021). Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara 2020.

Breda, Thomas, Elyès Jouini, Clotilde Napp, and Georgia Thebault. 2020. "Gender Stereotypes Can Explain the Gender-Equality Paradox." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 117 (49): 31063–69. https://doi.org/10.1073/pnas.2008704117.

Cahyani, Viona Budi (2019). Glass Ceiling pada Perempuan dalam Menempati Posisi Strategis Struktural di Birokrasi Kementerian Republik Indonesia. Surabaya: Universitas Airlangga.

Ceci, Stephen J., Donna K. Ginther, Shulamit Kahn, and Wendy M. Williams. 2014. "Women in Academic Science: A Changing Landscape." *Psychological Science in the Public Interest, Supplement* 15 (3): 75–141. https://doi.org/10.1177/1529100614541236.

Chakraborty, L., Ingrams, M., & Singh, Y. (2018). Fiscal Policy Effectiveness and Inequality: Efficacy of Gender Budgeting in Asia Pacific. *NIPFP Working Paper Series*.

Cobuild, C. 2010. Advanced Illustrated Dictionary. Harper Collins Publishers Ltd.: Great Britain.

Collins, Joshua C., Ciarán McFadden, Tonette S. Rocco, and Mary Katherine Mathis. 2015. "The Problem of Transgender Marginalization and Exclusion: Critical Actions for Human Resource Development." *Human Resource Development Review* 14 (2): 205–26. https://doi.org/10.1177/1534484315581755.

Cook, Sarah, and Shahra Razavi. 2012. "Work and Welfare."

Cornwall, Andrea, and Jenny Edwards. 2015. "Introduction: Beijing+20 - Where Now for Gender Equality?" *IDS Bulletin* 46 (4): 1–8. https://doi.org/10.1111/1759-5436.12149.

Costa, F. (2018, September 14). *Rata-rata Lama Sekolah di Papua Hanya Tujuh Tahun*. Retrieved from Kompas: https://www.kompas.id/baca/nusantara/2018/09/14/rata-rata-lama-sekolah-di-papua-hanya-tujuh-tahun/?status=sukses_login&status_login=login

Dow Jones Institutional News. (2020). *Coronavirus Is Exacerbating Work Intensity and Gender Imbalances in Labor*. Retrieved from Eurofound Says – Market Talk.

DP3APPKB Kalteng (2017). *Rencana Strategis Tahun 2016-2021.* Palangka Raya: DP3APPKB Kalimantan Tengah.

Duflo, Esther. 2012. "Women Empowerment and Economic Development." *Journal of Economic Literature* 50 (4): 1051–79. https://doi.org/10.1257/jel.50.4.1051

Fachrunnisa, R. (2020). "Education of Indonesian Girls: The Outlook of Discrimination, Rights, and the Impact on Society". *KnE Social Sciences*, 4(10), 349–359. https://doi.org/10.18502/kss.v4i10.7422

Fajriyyah, N., & I Nyoman B. (2015). *Pemodelan Indeks Pembangunan Gender dengan Pendekatan Regresi Nonparametrik Spline di Indonesia*. Jurnal Sains dan Seni ITS Volume 4.

Fakih, Mansour. (1996). “Gender Sebagai Alat Analisis Sosial” dalam *Analisis Gender Dalam Memahami Persoalan Perempuan*. Bandung: Yayasan Akatiga.

Floro, M., & Dymski, G. (2000). Financial Crisis, Gender and Power: An Analytical Framework. *World Development, 28 (7)*, 1269-1283.

Floro, M., Tornqvist, A., & Tas, E. O. (2009). The Impact of the Economic Crisis on Women’s Economic Empowerment. *Swedish International Development Agency, Working Paper Series.* Washington: Department of Economics, American University.

Forum, W. E. (2020). *The Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery.* Switzerland.

Hawley, J. (2016, February). *Why women's empowerment is essential for sustainable development*. Retrieved from International Institute for Environmental and Development: https://www.iied.org/why-womens-empowerment-essential-for-sustainable-development

Heise L, Garcia-Moreno C. 2002a. Intimate partner violence. In Krug et al., eds. World report on violence and health. Geneva, World Health Organization.

Heise L, Ellsberg M, Gottmoeller M. 2002b. A global overview of gender-based violence. International Journal of Gynecology and Obstetrics,78:S5–S14.

Heryana, Agus. (2012). Mitologi Perempuan Sunda. *Patanjala* (4), 156-169. Bandung: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung.

Hornby A. S. 2003. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford University Press: New York.

ILO. (2020, September). *Kesenjangan Upah Berbasis Gender di Indonesia*. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_755542.pdf.

Isti’anah. (2020). Perempuan dalam Sistem Budaya Sunda (Peran dan Kedudukan Perempuan di Kampung Geger Hanjuang Leuwisari Tasikmalaya). *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* (2), 195-204. https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v17i2.9328

Kadri (2020). Potret Kebijakan dan Implementasi Anggaran Responsif Gender di Pemerintah Provinsi NTB: Perspektif Komunikasi Organisasi. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* Vol. 14, No. 1 (2020), hal. 01-18. doi: 10.20414/Qawwam.v14i1.1991.

Kemen PPPA. 2016. Statistik Gender Tematik – Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa.

Khairunnisa, Ravinia. (2019). Skripsi: Faktor-faktor yang Memengaruhi Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Barat Tahun 2015. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Kollo, Fredik Lambertus (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

KPPPA. (2011). Policy Brief on Gender Equality. https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/eec77-buku-policy-brief-gender-equality.pdf

KPPPA. (2018). Profil Perempuan Indonesia 2018.

KPPPA. (2020). Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020.

Komnas Perempuan. (2021). Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19.

Kusuma, Panca (2017). Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram.

Leach, Melissa. 2015. *Gender Equality and Sustainable Development*. *Gender Equality and Sustainable Development*. https://doi.org/10.4324/9781315686455.

Lim, Y.C. Linda..1997. Capitalism, Imperialism and Patriarcy: The Dilemma of Third-World Women Workers in Multinational Factorie in Visvanathan, Naline (etal). The Women Gender and Development Reader. The University Press Limited: Dhaka. 215- 230.

Linus Ilika, Amobi. 2014. "Perception o f Partner Violence i n a Rural Igbo Community" 9 (3): 77–88.

Lukiswati, Intan, Anik D., & Utami D.S. (2019). *Regresi Panel Terboboti Geografis pada Indeks Pembangunan Gender Jawa Tengah Tahun 2011-2015.* http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/100751

Maharti et al. (2019). Analisis Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara. 10.13140/RG.2.2.11702.52800.

Marzuki. (2015). Perspektif Gender dalam Pelayanan Kesehatan. Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Yogyakarta.

McKinsey&Company. (2018). *The Power of Parity: Advancing Women's Equality in Asia Pacific.*

Mohammed, Margaret. 2008. *Gender and Time Use Surveys with a Focus on the Pacific and Unpaid Care Work USP Library Cataloguing-in-Publication Data*.

Nainggolan, B. (2020). Gender Dalam Masyarakat Multikultural Di Kota Ternate. Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama, 14(2). https://doi.org/10.46339

Nursaptini, dkk (2019). Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan. AL-MAIYYAH Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan. Mataram: Universitas Mataram.

OHCHR. 2014. Gender stereotypes and Stereotyping and women's rights. Geneva. https://www.ohchr.org/en/issues/women/wrgs/pages/genderstereotypes.aspx.

Pemprov Jabar. (2010). Penyusunan Kondisi Sosial Ekonomi Jawa Barat Tahun 2009-2010. https://jabarprov.go.id/root/sosek/12%20BAB%20VI.pdf

Perez-Felkner, Lara, Samantha Nix, and Kirby Thomas. 2017. "Gendered Pathways: How Mathematics Ability Beliefs Shape Secondary and Postsecondary Course and Degree Field Choices." *Frontiers in Psychology* 8 (MAR): 1–11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00386.

Permono, Adia Islami, dkk (2020). Analisis Indeks Pembangunan Gender Nusa Tenggara Barat 2019. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Permono, Adia Islami, dkk (2020). Analisis Indeks Pembangunan Pendidikan Nusa Tenggara Barat 2019. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Pollard, A. 2000, Givers of wisdom, Labourers without gain: Essays on women in the Solomon Islands, Institute of Pacific Studies, The University of the South Pacific and the University of the South Pacific in Solomon Islands, Suva, Fiji.

Prahasta, E. (2009). *Sistem Informasi Geografis : Konsep-Konsep Dasar (Perspektif Goedesi dan Geomatika).* Bandung: Informatika.

PROSPERA. (2021). Childcare Options for Promoting Women's Economic Participation in Urban Indonesia. www.prospera.or.id

PROSPERA, UNDP, UNICEF, & SMERU. (2021). *Household Impact of Covid-19 and Policy for 2021+.*

Pusdatin Kemnaker. (2021). Ketenagakerjaan Dalam Data Jilid 3 (Edisi 3 2021). Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan. https://satudata.kemnaker.go.id

Puspitawati, H. (2008). *Kajian Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Gender di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan.* Jakarta: Bappenas.

Putra, I Gusti Ngurah Edi. (2019). Addressing Gender Inequality to Improve Maternal Health in Indonesia. Proceeding of International Conference on Applied Science and Health No. 4.

Ritonga, D, Umdatul H., & Masykur. (2018). Laporan Penelitian Dasar Interdisipliner: Mewujudkan Masyarakat yang Adil Gender: Penerapan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Russo, Marianne Robin, and Kristin Brittain. 2014. "Women and STEM." *Handbook of Research on Education and Technology in a Changing Society*, 703–13. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6046-5.ch052.

Sahid, F. (2021, Maret 8). *Perspektif Gender dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Provinsi Papua dan Papua Barat*. Retrieved from Deskpapua Bappenas: https://deskpapua.bappenas.go.id/berita/detail-berita/perspektif-gender-dalam-pengembangan-ekonomi-lokal-di-provinsi-papua-dan-papua-barat

Sandila, Rona; Rizal, Muhammad; Satya, Fiqh Arya; Sulastri, Lis; Alfana, Muhammad Arif Fahrudin; Piyoto, Agus Joko;. (2020, Oktober 16). Analisis Kesetaraan Gender Provinsi Papua Tahun 2019. *Analisis Sumberdaya Manusia dan Ekonomi*.

Sarkar, N. N. 2008. "The Impact of Intimate Partner Violence on Women's Reproductive Health and Pregnancy Outcome." *Journal of Obstetrics and Gynaecology* 28 (3): 266–71. https://doi.org/10.1080/01443610802042415.

Sekar, A. (2008, Desember 8). *Ideologi Patriakhi dan Dampaknya dalam Kehidupan Perempuan di Kalimantan Tengah*. Retrieved from https://agnessekar.wordpress.com/2008/12/20/ideologi-patriakhi-dampaknya-dalam-kehidupan-perempuan-di-kalimantan-tengah/

Setia, Resmi. (2003). Perjalanan Hidup Seorang Buruh Perempuan: Antara Rumah Tangga, Tempat Kerja, dan Komunitas. *Jurnal Analisis Sosial Volume 8*. Bandung: Akatiga.

Sepúlveda Carmona, M 2013, Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights A/68/293 9 August 2013, available at: http://www. un.org/ga/search/view_doc.

Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., & Anggriani, S. (2020). Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia. *Journal of Strategic and Global Studies*, 40-63.

Smee, Sharon, and Rose Martin. 2016. "The Double Burden the Impact of Economic Empowerment Initiatives on Women ' S Workload," no. December: 6. https://www.iwda.org.au/assets/files/20161207-The-double-burden_digital-002.pdf.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabet.

Suleeman, E. (1995). Pendidikan Wanita di Indonesia. *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, 227-248. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sultana, Abeda. 2012. "Patriarchy and Women's Subordination: A Theoretical Analysis." *Arts Faculty Journal*, 1–18. https://doi.org/10.3329/afj.v4i0.12929.

Tempo.co. (2016). Rata-rata Perempuan di Jawa Barat Menikah Umur 18 Tahun. Bandung: https://nasional.tempo.co/read/819181/rata-rata-perempuan-di-jawa-barat-menikah-umur-18-tahun

United Nations Development Programme. (2020). Human Development Reports.

UNICEF. (2019). Children, Food, and Nutrition.

UNICEF Indonesia. (2015). *SDG untuk Anak-anak Indonesia: Profil Singkat Provinsi Jawa Barat*. https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2019-06/Bahasa%20West%20Java%20lowres2.pdf

UNICEF Indonesia. (2019). SDG untuk Anak-anak Indonesia: Profil Singkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2019-06/Bahasa%20NTB%20lowres2.pdf

UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, & Kementerian PPN/ Bappenas. (2020). *Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia

Vetaroy. (2019, Desember 23). *Peran Pendidikan dalam Kesetaraan Gender di Papua*. Retrieved from BKD Papua: https://bkd.papua.go.id/2019/12/23/peran-pendidikan-dalam-kesetaraan-gender-di-papua/

Wahyudi, Very (2018). Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender. Politea: Jurnal Politik Islam. Vol. 1 No. 1 (Jan-Jun) 2018, hal. 63-83. http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea.

Wardhana, A., Kharisma. B., & Lingga, A., (2020). Pencapaian Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Antar Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. *Journal FEB Unmul: Forum Ekonomi*. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI

Warth, L., & Koparanova, M. (2012, January). Empowering Women for Sustainable Development. *UNECE Discussion Papers Series No 2012.1.*

WEF. 2015. The Global Gender Gap Report. https://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/?doing_wp_cron=1627455768.4577589035034179687500.

WHO. 2009. “Promoting Gender Equality to Prevent Violence against Women.” *World Health Organization*, 1–18. http://www.who.int/violenceprevention/publications/en/ index.html%0Ahttp://apps.who.int/ iris/handle/10665/44098.

Wooldridge, J.M. 2010. *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. Cengage Learning.

World Bank. (2012). *Gender Equality and Development.*

World Bank. (2020). Gender for Development: Closing The Gap To Boost Growth.

World Bank. (2020). Indonesia Country Gender Assessment: Investing in Opportunities for Women.

World Economic Forum. (2021). *Global Gender Gap Report.*

Yildiz, E. (2016). The Importance of Women in Sustainable Development. *Social Sciences Research Journal, Vol 5, Issue 1*, 1-10.

You, Yanuarius; Rusmansara, Enos H.; Mansoben, Johz; Poli, Agustina Ivone. (2019, Maret). Relasi Gender Patriarki dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua. *Sosiohumaniora, Vol. 21, No. 1*, 65-77.

BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Gedung R.M Notohamiprodjo
Jl. Dr. Wahidin No.1
Jakarta Pusat 10710

Telp. +62 21 34833486
https://fiskal.kemenkeu.go.id
ikp.bkf@kemenkeu.go.id
BKFkemenkeu
@BKFkemenkeu
@BKFkemenkeu